



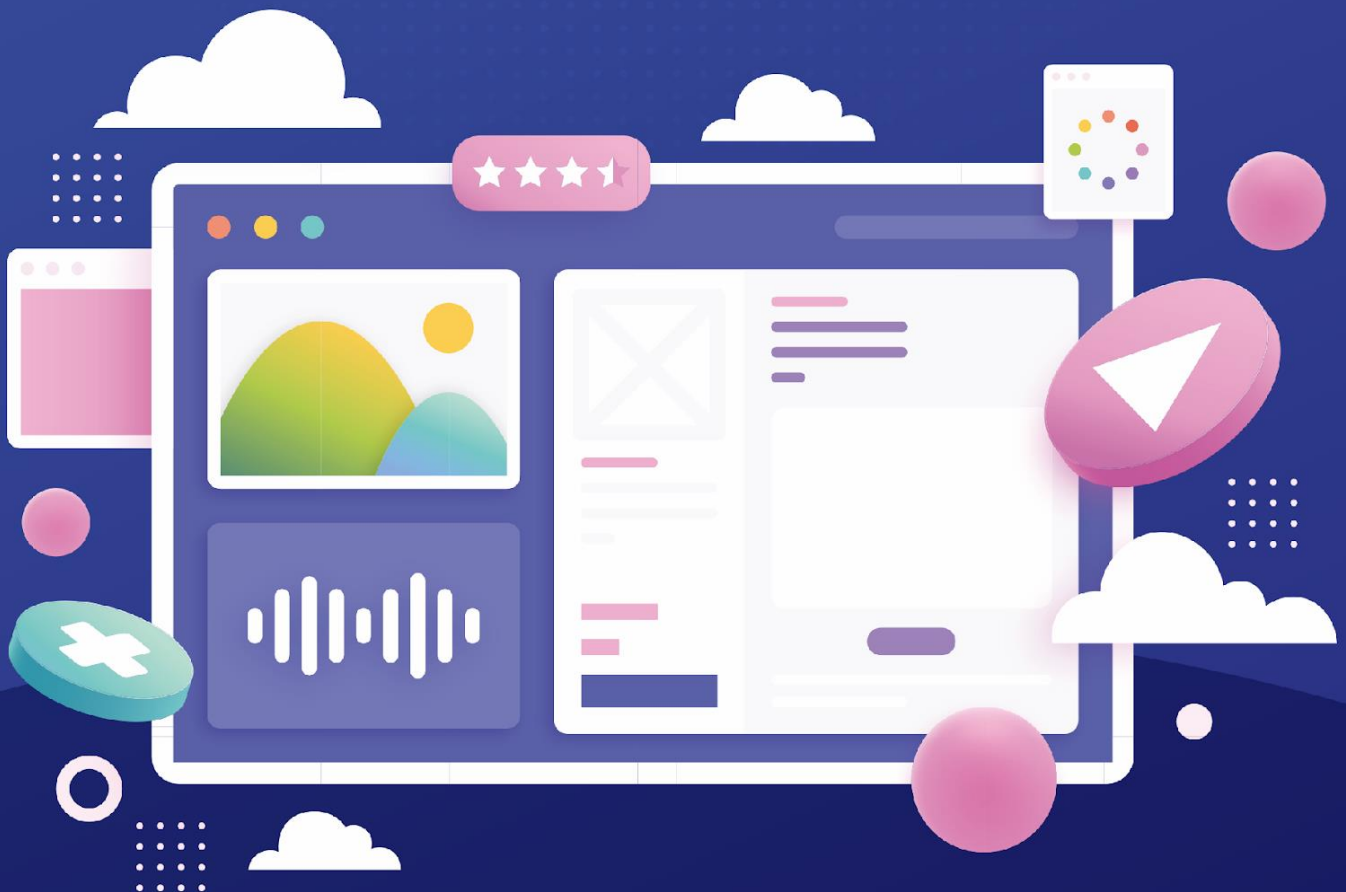
UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Sinopsis

2023

Research Days



KATA PENGANTAR

Kondisi global yang berubah cepat menghadapkan kita pada pergeseran besar atau disebut *megashift*. Tiga isu besar yang menjadi peluang dan tantangan adalah transformasi digital, inklusi sosial dan perubahan iklim. Pergeseran ini mengharuskan dunia akademik untuk terus berkontribusi dalam memahami dan menawarkan cara berpikir baru dengan terus melakukan adaptasi, transformasi dan inovasi keilmuan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) UGM menjadikan tiga topik tersebut sebagai *flagship* untuk pengembangan pengajaran dan penelitian.

Pertama, transformasi digital menawarkan kesempatan kemajuan ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan baru, namun pada saat bersamaan juga menghadirkan tantangan seperti digital kolonialisme dan kesenjangan akses. Kedua, dipicu oleh COVID-19 yang tidak hanya menghadirkan krisis kesehatan, namun telah membuka kotak pandora persoalan inklusi sosial, di tataran nasional maupun global. Ketiga, perubahan iklim telah menjadi risiko dan ancaman terberat bagi planet dan seluruh sistem kehidupan. Adaptasi terhadap perubahan iklim menunjukkan pentingnya transisi menuju pemenuhan kebutuhan dasar (mis. energi dan pangan) yang berkelanjutan, serta sistem tata kelola dan kebijakan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup (*green & blue economy*).

Sebagai bagian dari komunitas akademik, FISIPOL UGM berkomitmen menjadi *center of reference* dalam memahami dan menawarkan alternatif cara berpikir terkait dengan fenomena *megashift*. Salah satu bentuk komitmen ini adalah *Research Days* yang menjadi forum diseminasi hasil riset dosen, peneliti, dan mahasiswa. Topik *Research Days* tahun ini berkaitan dengan *flagship megashift* FISIPOL UGM, mencakup 60 judul penelitian. Selain hasil penelitian yang mendapatkan dukungan hibah riset Fakultas, *Research Days* juga menampilkan hasil riset hasil kolaborasi dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional.

Penelitian yang dipaparkan menunjukkan kolaborasi dosen dan peneliti FISIPOL UGM dengan berbagai mitra, baik dalam maupun luar negeri, baik dengan lembaga pemerintahan, bisnis, masyarakat sipil, maupun lembaga penelitiannya. Kolaborasi yang menunjukkan bekerjanya skema *triple-helix* dan *penta-helix*. Keterlibatan mahasiswa, baik S1, S2, maupun S3 dalam berbagai program riset Fakultas tercermin dalam berbagai judul penelitian yang akan dipresentasikan. Luaran dari *research days* selain dalam bentuk paparan, diharapkan juga berbagai publikasi artikel jurnal, monograph, buku, *policy brief*, dan luaran lain yang menunjukkan relevansi dan kontribusi FISIPOL UGM di era *megashift* ini.

Atas nama Fakultas, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Tim Dekanat dan tim UP3M yang sudah mempersiapkan pelaksanaan dan mengawal penyelenggaraan *Research Days* 2023. Semoga memberi manfaat untuk masyarakat dan memperkuat posisi Fisipol UGM sebagai *center of reference* di bidang sosial dan politik.

Yogyakarta, 10 November 2023
Dekan,
Wawan Mas'udi, Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF INTERNASIONAL.....	6
Venturing Ethical Dimensions of Global Technological Citizenship (GTC) in the Era of Digital Competitiveness and Transformation: Evidence from Indonesia.....	7
Mundane Circular Economy Policy: Mainstreaming CE Education through The Agency of Schools	9
Mapping Out the Indonesian Policy Makers' Perceptions on Electric Vehicles and Energy Transition	11
HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TRIPLE HELIX.....	13
Integritas Demokrasi Elektoral di Indonesia: Aktor, Strategi dan Konsekuensi	14
Akhir dari Pekerjaan Layak?: Dampak Informalisasi dan Kemitraan Semu terhadap Kondisi Pekerja Berstatus "Mitra" di Indonesia	16
DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN HUBUNGAN INTERNASIONAL	19
Towards a typology of stigma imposition in international relations: Indonesia as a freedom of religion and belief (FoRB) violator in 2011 and 2016-2017	20
Minilateralism and Indonesia's Power Projection in the Global Politics	24
DIPLOMASI AKTOR NON-NEGARA DARI GLOBAL SOUTH: MEMAHAMI UPAYA ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PASCA KONFERENSI BANDUNG.....	26
THE RELATIONSHIP BETWEEN SPORTS–POLITICS–RELIGION: A CASE STUDY OF THE FIFA WORLD CUP IN QATAR 2022	27
DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN ILMU KOMUNIKASI.....	29
Menguak Kebenaran Berita Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia versi Harian Jawa Pos.....	30
"I Want Her To Have Sex With Her" Mewujudkan Hasrat Seksual Dalam Fancomic Yuri	31
Keintiman Visual: Dinamika Ikatan Sosial dalam Praktik Digital	33
Kepercayaan (Trust) dalam Kompleksitas Manajemen Bencana: Studi Komparatif Dinamika Kepercayaan Publik di Wilayah Rawan Bencana di Indonesia.....	35
Historiografi Karier Perempuan sebagai Pekerja Film dalam Industri Film Indonesia Sebelum Reformasi (1926-1997).....	37
INFORMATIKA SOSIAL LAODIKIA DALAM CIPTA KONTEN DIGITAL (Social Informatics of Laodicean in Digital Content Creation	39
Antara Kontestasi Opini sampai Partisipasi Kolektif: Meneroka Komunikasi Politik Digital di Indonesia pada Era Media Sosial	41
Model Komunikasi Pemasaran dalam Mengembangkan Jaringan Anggota pada Bisnis Multilevel Marketing.....	43
Diversity of Content in the Free-to-Air Terrestrial Digital Television Industry in Indonesia:	

Reflection on the Impact of Digitalization Regulations	45
DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK.....	46
Birokrasi Indonesia Era Pandemi: Studi Komparatif Manajemen Inovasi Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara BAPENDA Jateng dan BPKA DIY	47
Collaborative Governance di BUMDes Sambimulyo, Prambanan, Sleman.....	49
DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN POLITIK & PEMERINTAHAN	51
Negara Pembangunan dan Rejim Ekstraktif Pasca Neoliberal: Sebuah Kajian Literatur 52	
Ruang Partisipatif Traditional Ecological Knowledge (TEK): Memahami Ulang Peran Keujreun Blang & Pemerintah dalam Pengelolaan Irigasi Sawah di Banda Aceh	54
Value Chain of Cassava Production and Smallholder Household in Register 44, Tulang Bawang Barat.....	56
Pengantar Ilmu Politik untuk Mahasiswa S1 Departemen Politik dan Pemerintahan	58
Economic Geography dan Hutan Tujuan Khusus: Memahami Livelihood Masyarakat di Desa Kawasan Hutan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.....	59
Sinergi Representasi Politik dengan Tautan Politik Perempuan Anggota Parlemen Lokal dalam Mewujudkan Anggaran dan Kebijakan Sosial Sensitif Gender	60
DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN SOSIOLOGI.....	62
Wacana dan Tantangan Isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Pasca UU TPKS	63
Youth and Spiritual Disruption: A Study of Indonesian Millennials Learning Buddhism during Religious Disaffiliation	64
Keadilan dalam Resolusi Konflik	66
The Birth of Teachers: Women Being and Becoming Early Childhood Education Teachers during ECE Expansion Period in Indonesia	68
DISEMINASI HASIL PENELITIAN PUSAT KAJIAN	69
From Vulnerability to Resilience: Enhancing Women and Children's Well-Being.....	70
Masa Depan Adopsi Edtech dan Pendidikan Hybrid di Indonesia Pasca-Pandemi.....	71
Riset Indeks Kualitas Perencanaan 2022 dan 2023: Menakar Dinamika Pembangunan Kota Balikpapan	72
Tanah yang Rumit: Papua, Konflik, dan Kemungkinan Solusi	75
Energy-Extractive Nexus.....	76
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S-3.....	78
Konten Budaya Jawa dan Konstruksi Identitas Masyarakat Transmigran: Studi pada Transmigran Jawa di Lampung	79
Destabilizing Knowledge Assemblage: Dinamika Teknologi, Sains, dan Sosial dalam Pengembangan Thorium untuk Energi Nuklir di Indonesia	81
Manajemen Media Sosial Pemerintah Daerah dalam Menciptakan High Quality Engagement; Studi Kasus pada Instagram dan Twitter (X) Pemerintah Kota Bandung, Indonesia	83
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S-2.....	85
Survei Nasional Melalui Nasional Melalui Tayangan Iklan Facebook dan Instagram	

dalam Evaluasi Citizen-Satisfaction terhadap Kualitas Layanan Telemedicine di Indonesia	86
Digital Feminist Artivism Networks in the Arena of Patriarchal Capitalism	88
Perempuan Pekerja Catur Warna; Negosiasi dan Resistensi sehari-hari dalam Kegiatan Ritual Adat Keagamaan di Bali	90
Manajemen Inovasi Jabar Digital Service dalam Mewujudkan Smart Governance di Jawa Barat	94
Budaya Demokrasi Masyarakat Sipil Manggarai di Media Sosial.....	96
Kepemimpinan Keamanan Siber dalam Menjaga Data Pemilih Pemilu (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi SIDALIH oleh KPU RI)	98
Potret Eksistensi Awig-Awig dalam Mewujudkan Well-being di Desa Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali	100
HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S-1	102
Strategi Bisnis Media Online: Studi Kasus Penerapan Model Bisnis pada Akun TikTok @tribunjogja Periode September 2022-Januari 2023	103
Negara Selatan dalam Negosiasi Perlindungan Lingkungan Internasional: Strategi Manajemen Stigma oleh Cina pada Conference of Parties 15.....	105
Konstruksi Realitas Pengukuran Tanah di Wadas dalam Media Online Nasional: Analisis Framing Pemberitaan Isu Wadas di Tempo.co Periode 8-11 Februari 2022.....	107
"Untitled" (2021): Kritik Estetika Dekolonial terhadap Referendum Kaledonia Baru	108
Rezim Pengetahuan Perdamaian dan Kekuasaan: Dekonstruksi Klaim Sukses Misi Stabilisasi PBB di Haiti, 2004-2017	110
<i>Siblingshood dalam Komunitas Biososial: Studi Fenomenologi pada Grup Jaya Musik (Komunitas Pengamen Difabel Netra di Malioboro, Yogyakarta)</i>	112
Praktik Jurnalisme di Media Sosial (Adaptasi Logika Media Sosial pada Berita Narasi Daily oleh @narasinewsroom).....	113
Ordenar La Casa Policy and the Exclusion of Migrants: Sebastian Piñera's Anti-Immigrant Policy in Chile, 2018-2022	116
Kapabilitas dan Relasi Antar Aktor Pemerintah dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul.....	118
Inklusivitas dalam Jurnalisme: Studi Kasus Praktik Jurnalisme Inklusif di Media Daring Tirto.id pada Tahun 2016-2022	119
Pemberdayaan Perempuan Melalui Perspektif Ekofeminisme (Studi Kasus di Bank Sampah Wirosaban Mandiri, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta).....	121
Politik dan Ruang Publik: Studi tentang Negosiasi dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar di Sepanjang Jalan Sudirman, Yogyakarta.....	124
Inklusivitas dan Politik Anak Muda dalam Pengorganisasian Aksi Kamisan Yogyakarta Periode 2018-2023.....	126

HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF INTERNASIONAL

Venturing Ethical Dimensions of Global Technological Citizenship
(GTC) in the Era of Digital Competitiveness and Transformation: Evidence
from Indonesia

Riza Noer Arfani, Nyarwi Ahmad, Arindha Nityasari,
Ni Made Diah Apsari Dewi, Vu Minh Anh

Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan Departemen Ilmu Komunikasi

In the age of digital transformation and ever-evolving technological advancements, the concept of competitiveness is usually understood at macro-analytical levels. This extends to digital competitiveness variants as well. However, the authors of this research article believe that there is a significant gap in the micro-level analysis of digital transformation and the corresponding dimensions of competitiveness, particularly within interpersonal experiential practices. This study, therefore, aims to bridge the gaps, both theoretically and empirically, by uniting macro-level analyses of national, industrial, and firm competitiveness with micro-level scrutiny, focusing on the ethical dimensions of technological development, especially in the context of digital technology advancement.

To achieve such goals, the authors of this research lay their analytical assessment based on three theoretical frameworks, namely the Digital Communication System (DCS) proposed by Flensburg & Lai in 2020, the Digital Intelligence Index (DII) platform created by Chakravorti et al. in 2020, and the Ethical Dimensions in Global Technological Citizenship (GTC) framework proposed by Nakaya and Fujiwara in 2023. Both qualitative and quantitative methods are adopted to answer two main research questions. First, by employing available/existing competitiveness measurements, how do we locate the levels of digital competitiveness of the country under study?. Layers of understanding to be covered include state/nation, industry and firm, and individual. Second, by referring to case stories and evidence from the country under study, how can we develop models of norm-setting and value-oriented attitudes among key players in digital transformational settings?

Quantitative data used are in the form of final data after collecting results of surveys, Focused Group Discussions (FGDs) and in-depth interviews with experts working in the digital field, showcasing the ethics in the GTC. Additionally, relevant documents and pieces of literature in both international and national settings are used to dig deeper into the aspects of digital competitiveness and digital transformation.

After the data collection and analysis process, it can be seen that Indonesia is rapidly evolving as a digital actor. However, there are still several pitfalls specific to Indonesia's context that need to be overcome for Indonesia to be fully competitive. Furthermore, digital development is mainly centered at the state and industrial level, while the individual level is lacking. On its ethical dimension, evidence from the Indonesian stories and cases illustrate how questions on the aspects of ethics, norms and values are to be mostly comprehended at the individual level, hence, putting these aspects as part of efforts toward strengthening digital literacy as they relate to the notions of digital competitiveness. However, there seems to be a lack of connection with the notion of specific ethics as part of practices of citizenship, but it is somewhat related to individual business practices. In other words, the Indonesian case confirms the need to explore comprehension that goes beyond the existing and given (taken for granted) models and practices of digital competitiveness and transformation that position individuals to take on their tasks and responsibilities on their own, while the state institutions and firms to be taken as mere facilitators.

Mundane Circular Economy Policy: Mainstreaming CE Education through The Agency of Schools

Suci Lestari Yuana^a, Wendi Wiliyanto^a, Tane A. Hadiyantono^a, Maria Josefina Figueroa^b, Maharani Hapsari^a, Milda Longgeita Br Pinem^c

^aDepartment of International Relations, Universitas Gadjah Mada, Indonesia;

^bDepartment of Management Society and Communication, Copenhagen Business School, Denmark; ^cDepartment of Social Development and Welfare, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

This research examines how implementing the Circular Economy (CE) principle in basic education in Indonesia contributes to advancing sustainability transitions. The research addresses two key questions: How can the disparity between Circular Economy (CE) principles and their application in everyday practices within educational institutions be effectively bridged? And to what extent does this bridging process facilitate the transformation of schools towards a circular paradigm? Employing Multi-Criteria Mapping methods, which combine quantitative and qualitative data, the study involves participatory workshops with school principals in Java Island, Indonesia, from 2022-2023.

The objectives of this research include constructing a comprehensive policy map, bridging the gap between the theoretical underpinnings of Circular Economy and their tangible implementation in schools, and outlining actionable strategies that foster a holistic understanding of CE principles among educators, students, and stakeholders. Additionally, the research seeks to navigate transformative trajectories towards circular schools, identifying key stepping stones, challenges, and best practices to facilitate the seamless integration of circularity into the fabric of basic education institutions.

The research output reveals the significance of practical mapping tools, specifically (1) the Mundane Circular School Decision Mapping, (2) the Mundane Decision Prioritization Map, and (3) the Transformative Pathways for Circular School Transition, in bridging the gap between CE principles and their practical application. Co-produced with researchers and school principals, these outputs draw insights from ongoing practices and reflections on the Indonesia Green Principle Awards program, fostering circular transformation in educational institutions. This research will contribute to introducing mundane circular economy practices at the grassroots level by integrating CE principles into basic education, contributing significantly to the broader sustainability agenda.

This study produces several insights. First, the Mundane Circular School Decision Mapping serves as an accessible entry point to translate theoretical Circular School principles into concrete practices. The Mundane Decision Prioritization Map plays a pivotal role in the transformation journey by helping the educators to set priorities. It helps educators discern where to commence their Circular School transformation, taking into account both short-term and long-term objectives. The Transformative Pathways for Mundane Circular School Transition provides an open and reflective framework for ongoing monitoring and evaluation. This tool guides educators in assessing their progress by delineating the transformation into three phases: niche building, niche mainstreaming, and unlocking the regime as a structured approach to reflection. Second, the maps serve as a means of bridging the academic discourse surrounding Circular Economy theories with the everyday implementation in educational contexts. Third, knowledge co-production represented by the practical maps have the potential to unlock the circularity regime by making everyday practices a focal point for change. This challenges the conventional view of regime shifts, which are often hindered by lock-in mechanisms in established systems (Klitkou, et al., 2015). By encouraging educators to adopt everyday circular practices, these maps empower individuals to become agents of change within their institutions (Lie and Sørensen, 1996), highlighting the importance of grassroots efforts in complementing top-down decisions for transformative change.

Mapping Out the Indonesian Policy Makers' Perceptions on Electric Vehicles and Energy Transition

Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP, Derajad Sulisty Widhyharto, S.Sos.,
M.Si, Kurnia Cahyaningrum Effendi, SIP, MPA, Marzuki, S. AN, Dian Silviani,
S.AP.

The energy transition to sustainable development is a significant propeller for achieving carbon neutrality and reducing the further impact of human-induced climate change through decarbonization of the energy sector. Indonesia has increased its target for electric vehicles as a developing country in order to accelerate the country's green energy transition, which is one of the government's commitments to achieve net zero carbon emissions by 2060. However, electric vehicle development is fraught with challenges, one of which is a conflict of interest between sectors that support and oppose electric vehicle development. As a result, the goal of this research is to identify policymakers' perspectives on the national development of electric vehicles in Indonesia. It also seeks to identify policymaker relationships to ensure energy transition policies and electric vehicles support low-carbon sustainable development. This research used qualitative methods such as interviews both online and offline, as well as secondary data analysis. We conducted interviews with over 36 informants representing various sectors including 6 Ministries, private sector, end-user communities, NGOs, academic, and SOEs. These interviews were conducted both in groups and individually using both online and offline mechanisms. Secondary data from books, archives, literature, mass media, the internet, and Indonesian energy and EV laws. This method analyses relevant literature for data. Literature studies validate interview and note data for text interpretation. Our finding: some views are common among policymakers on the following points: Electric vehicles can be regarded as a remedy for reducing emissions, diversifying energy sources, stimulating the economy, fostering technological advancements, and addressing regulatory obstacles. They have the ability to decrease carbon dioxide emissions, broaden the range of energy sources, promote economic expansion, generate employment opportunities, and enhance global competitiveness. It is imperative for policymakers to tackle these challenges. Indonesian energy policymakers encounter intricate connections that are shaped by political dynamics, economic interests, and individual objectives. They frequently engage in cooperation regarding energy security, resource management, and environmental sustainability. Competition arises due to the presence of ministries that have overlapping responsibilities, while negotiation entails the delicate

task of striking a balance between economic interests and environmental considerations. Indonesian energy policymakers face complex relationships influenced by political dynamics, economic interests, and individual goals. They often collaborate on energy security, resource management, and environmental sustainability but competition arises from overlapping ministries, while negotiation involves balancing economic interests and environmental concerns. The research indicates that the policy process on the acceleration program of electric vehicles for land transportation is dominated by top-down approaches, indicating potential conflicts of interest between government and industry. The absence of a bottom-up or participatory approach could lead to increased complexity and harm to the community. The research findings will be used as policy recommendations for the central government in order to develop the EV sector in a sustainable manner, specifically on policymakers' perspectives on EV development in Indonesia.

HIBAH PENELITIAN KOLABORATIF TRIPLE HELIX

Integritas Demokrasi Elektoral di Indonesia: Aktor, Strategi dan Konsekuensi

Dr. Abdul Gaffar Karim, Arga Pribadi Imawan, S.I.P., M.A., Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., Alvi Syahrina, S.T., M.Sc., Endah Ayuning Rostiati, Cindy Aulia Fitriana, Komisi Pemilihan Umum RI, Kurawal Foundation

Pendahuluan

Ada dua ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia: (1) ketidakpastian mengenai imparialitas penyelenggara pemilu, dan (2) ketidakpastian proses demokratisasi ketika kualitas demokrasi Indonesia terus mengalami kemunduran.

Penelitian ini memetakan aktor yang terlibat dalam proses pemilu, menjelaskan strategi yang mereka gunakan, dan konsekuensinya terhadap integritas pemilu di Indonesia. Analisis itu dilakukan dengan mengacu pada empat isu penting dalam pemilu 2024, yakni polarisasi politik, seleksi penyelenggara pemilu, sistem pemilu; dan aplikasi kepemiluan.

Dengan mengacu pada beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Garnett dan Zavadskaya (2018), studi ini akan fokus pada tindakan-tindakan para aktor politik, khususnya para petahana, kekuatan oposisi dan warga negara, yang merupakan penentu utama integritas pemilu. Masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana karakteristik aktor (petahana, oposisi, dan warga) dan strategi aktor dalam membahas isu-isu terkait integritas pemilu menjelang pemilu 2024?
2. Apa konsekuensi dari pilihan karakteristik dan strategi masing-masing aktor?

Isi

Pengumpulan dan analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara: *Focused-Group Discussion* (FGD), studi pustaka, dan analisis big data. Peneliti menggunakan analisis sentimen untuk membaca bagaimana wacana diciptakan dan disebar, serta social network analysis (SNA) untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat aktif dalam membentuk wacana integritas pemilu.

Jenis isu menentukan pola diskursus yang berkembang di ruang digital, dan berkorelasi dengan kluster aktor yang terlibat dalam proses pewacanaan. Riset ini menemukan bahwa setiap isu tidak selalu melibatkan semua kluster aktor. Setiap kluster aktor juga tidak selalu merepresentasikan sentimen yang sama dengan

strategi pewacanaan yang sama. Akibatnya, setiap isu memiliki konsekuensi yang beragam berdasarkan peta aktor dan strategi yang digunakan.

Penutup

Integritas pemilu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kerumitan interaksi antara aktor yang terlibat, isu-isu pemilu, strategi yang mereka gunakan, serta faktor internal dan eksternal. Upaya yang terus-menerus untuk memantau, mengatur, dan memperbaiki proses pemilu, sambil mendorong transparansi dan partisipasi warga negara, akan menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang lebih integritas dan mendukung perkembangan demokratisasi yang lebih baik di Indonesia. Selain itu, terkait metode, analisis big data menjadi alternatif penting dalam memahami kondisi masyarakat, terutama dalam konteks isu-isu sosial dan politik. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Pertama, ukuran data besar memerlukan manajemen sumber daya komputasi yang efisien, terutama jika data yang harus diolah sangat besar. Kedua, isu-isu masyarakat selalu berkembang, sehingga diperlukan deteksi awal isu-isu yang relevan sebelum analisis lebih mendalam. Tambahan data dan alat pendeteksian tren bisa membantu. Terakhir, akses berbayar ke data Twitter melalui API sejak Juni 2023 mempengaruhi ketersediaan data, sehingga alternatif sumber data perlu dipertimbangkan.

Akhir dari Pekerjaan Layak?: Dampak Informalisasi dan Kemitraan Semu terhadap Kondisi Pekerja Berstatus “Mitra” di Indonesia

Yeremias T. Keban, Susetyawan, Arif Novianto, Indri Islamiati, Fiky Yudhistira

PENDAHULUAN

Hubungan kemitraan yang dijalankan dalam konsep ekonomi berbagi, dalam cara pandang umum, ditempatkan sebagai bentuk pekerjaan masa depan (Van Dijk et al., 2018; Roy & Shrivastava, 2020). Beberapa peneliti menyebut hubungan kemitraan dan ekonomi berbagi ini sebagai hal positif, karena dinilai akan menciptakan keuntungan bagi semua pihak dan meminimalisasi terjadinya eksploitasi (Sundararajan, 2017; Muñoz & Cohen, 2017; Mont et al., 2020). Bentuk hubungan kemitraan ini, pada abad-21 digunakan oleh perusahaan platform seperti Uber, Gojek, dan Grab untuk mengklasifikasikan pengemudinya. Dengan klasifikasi sebagai “mitra”, diklaim dapat membuat pengemudi menjadi memiliki kebebasan memilih bekerja kapan, di mana, dan pendapatan berapa—sesuatu yang tidak akan pekerja didapat ketika pekerja diklasifikasikan sebagai buruh/karyawan (Revenelle, 2019). Berbeda dengan berbagai klaim di atas, penelitian ini berupaya mendemistifikasi kepentingan ideologis dan membuka realitas tersembunyi dalam klaim-klaim positif tentang kemitraan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan beberapa hal:

A. Pekerja berstatus “mitra” tidak mendapatkan hak-haknya sebagai mitra.

Para pekerja yang berstatus mitra, tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam regulasi dan dalam esensi hubungan kemitraan. Alih-alih memiliki posisi yang setara dengan perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan, relasi antara perusahaan dengan pekerja berstatus mitra sangatlah timpang. Sebanyak 69,4 persen responden, bahkan tidak memiliki hak untuk mendiskusikan perjanjian kemitraan dan proses kerja. Akibat status sebagai mitra, maka para pekerja tidak mendapatkan hak-hak kerja layak, seperti upah minimum, jaminan sosial, hak libur tetap dibayar, cuti haid, waktu kerja 40 jam/minggu, dan yang lain. Status mitra justru membuat sebanyak 78,9% pekerja harus menyediakan sarana kerjanya sendiri.

- B. Informalisasi atau pengklasifikasian pekerja sebagai “mitra” telah menjauhkan pekerja dari kondisi kerja yang layak dan adil, sehingga telah menyebabkan terjadinya super-eksploitasi.

Proses informalisasi atau pengubahan klasifikasi pekerja formal menjadi informal, berlangsung meluas sejak era *booming* ekonomi gig. Sejak tahun 2020/2021, sebagian besar kurir yang sebelumnya berstatus sebagai pekerja tetap/kontrak, diubah klasifikasinya sebagai mitra. Informalisasi tersebut telah menciptakan terjadinya praktik super-eksploitasi, yang terlihat dalam tiga hal. Pertama, terjadinya praktik intensifikasi kerja, baik melalui target kinerja yang ditingkatkan dan juga melalui gamifikasi yang membuat para pekerja bekerja semakin intensif; Kedua, ekstensifikasi kerja yang membuat pekerja berstatus mitra bekerja semakin lama. Pada Juni 2021, rata-rata waktu kerja pekerja berstatus mitra di sektor pengantaran barang dan penumpang adalah 10 jam 22 menit per hari dan meningkat menjadi 11 jam 12 menit per hari pada Juni 2023. Ketiga, bayaran yang diterima oleh pekerja berstatus mitra, cenderung semakin dibawah komponen hidup layak. Selain itu, akibat status sebagai mitra, maka risiko kerja semakin banyak yang ditanggung oleh pekerja.

- C. Tidak adanya penegakan hukum oleh pemerintah yang dipengaruhi kuatnya kekuatan modal dibanding kekuatan pekerja, telah membuat praktik kemitraan semu berlangsung

Berlangsungnya praktik kemitraan semu, yang mana pekerja berstatus mitra dilanggar hak-haknya oleh perusahaan, dimungkinkan untuk terjadi karena sedikitnya perlindungan dan penegakan hukum dari pemerintah. Kondisi itu terjadi, karena kekuatan modal/pemberi kerja lebih kuat dibandingkan kekuatan pekerja. Hal itu terlihat dari keterlibatan dalam organisasi (komunitas formal dan serikat pekerja), di mana 11,4 persen, sementara sebanyak 88,6 persen. Lemahnya gerakan atau kekuatan pekerja, telah membuat pemerintah menjadi cenderung untuk membiarkan praktik kemitraan semu berlangsung, dengan berbagai alasan tertentu.

PENUTUP

Berlangsungnya kemitraan semu dan super-eksploitasi terhadap pekerja berstatus mitra, telah membuat para pekerja tidak mendapatkan kondisi kerja yang layak dan adil. Kondisi itu, pada praktiknya terus meluas, seiring dengan meluasnya

informalisasi kerja di berbagai sektor di Indonesia. Perluasan tersebut, telah menjadi preseden buruk bagi perlindungan terhadap pekerja untuk memastikan kesejahteraan dan kondisi kerja yang lebih baik. Jika praktik informalisasi dan kemitraan semu ini terus berlangsung dan meluas, maka akhir dari pekerjaan layak dapat terjadi. Dampaknya, tidak ada lagi pekerjaan yang memberi kesejahteraan bagi pekerja.

DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN HUBUNGAN
INTERNASIONAL

Towards a typology of stigma imposition in international relations: Indonesia as a freedom of religion and belief (FoRB) violator in 2011 and 2016-2017

Rizky Alif Alvian, MIR

Introduction

This article constructs a typology of stigma imposition strategies in international society, defined as processes where agents portrayed others as deviant or transgressive. It argues that stigma imposition strategies are composed of three elements, which are labelling (highlighting certain attributes of the targets), stereotyping (representing the attributes negatively), and separation (portraying the targets as being different from the normal members of international society). Each of these elements can be further distinguished into low and high intensity variants. A stigma imposition strategy can, thus, be described in terms of the intensity of their elements, such as low level labelling, low level stereotyping, and low level separation (LLL). Applying this framework to speeches directed against Russia in the general debate of the 77th session of the UN General Assembly, this article shows that four strategies are salient: LLL, HLL, HHL, and HHH. This article further shows that these strategies advance different understandings of transgression, thereby producing uncertainties on the meanings of normality and abnormality in international relations.

A typology of stigma imposition in international relations

An analysis of speeches articulated during the General Debate of the 77th session of the UNGA demonstrates that states adopt heterogeneous strategies in imposing stigma. Many countries used their speeches as platforms to stigmatise Russia. However, their strategies of stigmatisation are markedly different in terms of their intensity. To unpack the spectrum of stigma imposition strategies, we may examine how states perform labelling, stereotyping, and separation.

Through labelling, states spotlight particular attributes of the target states in order to make the features representative of the targets. From the case of Russia's stigmatisation in the General Debate, states' strategies in performing labelling can be located within a low-high spectrum. The intensity depends on whether the target states are narrated as being fully responsible for the highlighted attributes. Low intensity labelling typically portrays the stigmatised state as partially responsible for

the deviant attributes. Meanwhile, high intensity labelling declares that the stigmatised state is fully responsible for the underlined attributes.

Once attributes are highlighted, stigmatising states need to negatively represent the attributes. Again, strategies of stereotyping can be represented as a spectrum, with low and high levels stereotyping as its extreme poles. Low level stereotyping is characterised with its focus on how the attributes disrupt international flow of goods and resources. High level stereotyping highlights how the attributes challenge fundamental norms and institutions that underpin the modern international order.

As attributes are labelled and negatively portrayed, stigmatising states move to the third step of stigma imposition, namely, separation. Through separation, stigmatising countries seek to represent the stigmatised states as being external to the 'normal' international community. Separation strategies can be located within a spectrum of low and high levels of separation. In low level separation strategies, the stigmatising states consider the stigmatised countries as deviant. But, the stigmatising states retain the belief that the stigmatised targets are capable of correcting themselves. In this way, the deviant state is not truly an outsider. It remains enmeshed in the dominant normative fabric of the international society, although its capability to exercise its normative commitment may be wavering. However, with encouragement from the normal members of the international community, it may be possible to guide the straying member of the community into the correct pathway. In high intensity separation strategies, the stigmatising states maintain that the error of the deviant state can only be corrected by inflicting status and material loss to the target. This can be expressed in the forms of condemnation or insult. The stigmatising states may also mobilise economic sanctions against the deviant and challenge the international institutional position that the target state occupies.

Since the strategies of labelling, stereotyping, and separation in stigma imposition can be divided into low-intensity and high-intensity forms, stigma imposition strategies can be theoretically classified into eight types. These types differ in the configuration of labelling, stereotyping, and separation strategies. States may opt for two extreme options: low labelling, low stereotyping, and low separation (or LLL to simplify) or high labelling, high stereotyping, and high separation (or HHH to simplify). Between these extremes, six options are theoretically possible (LLH, LHH, LHL, HLL, HLH, and HHL). Figure 1 represents the positions of these variations of stigma imposition strategies in a three-dimensional space.

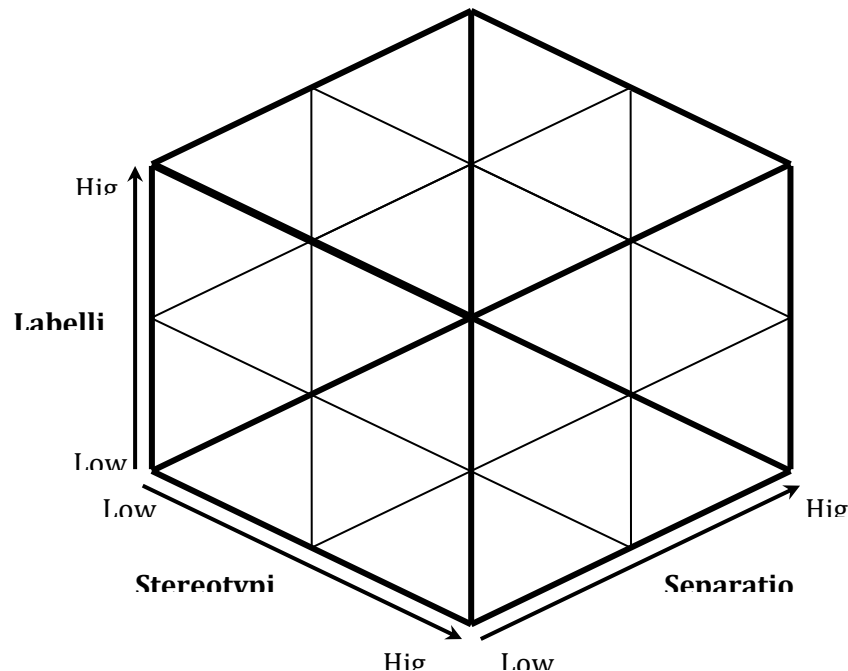


Figure 1. Varieties of stigma imposition strategies

Conclusion

This article has developed a framework for identifying and describing the diversity of stigma imposition strategies in international relations. By differentiating labelling, stereotyping, and separation into low and high intensity variants, this article produces a framework that may allow researchers to specify the characteristics of particular stigma imposition strategies. It is important to map the variation of stigma imposition strategies, as different strategies may propose different conceptualisations of deviance and prescriptions in dealing with transgressive behaviour. More broadly, this study implies that efforts to consolidate the meanings of deviance in international relations are plagued by fragmentation. As agents conceptualise deviance differently, they advance divergent ideas on the boundary between normality and abnormality in international politics, thereby producing uncertainty on what counts as unacceptable in international interaction.

Minilateralism and Indonesia's Power Projection in the Global Politics

Muhammad Irfan Ardhani, MIR

Para sarjana telah menyoroti kemunculan minilateralisme di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir. Pada umumnya mereka berusaha memahami dampak kemunculan kerja sama seperti AUKUS, The Quadrilateral Security Dialogue (Quad) 2.0, mekanisme Lancang Mekong Cooperation (LMC), patroli trilateral Laut Sulu, dan inisiatif “Our Eyes” bagi rivalitas negara adikuasa dan ASEAN. Sebagian dari sarjana melihat perkembangan ini dengan pesimis karena minilateralisme dianggap membahayakan sentralitas ASEAN (Ha, 2022). Efektivitas minilateralisme akan membuat mekanisme ASEAN ditinggalkan sehingga menggerus pengaruh normatif dari organisasi regional tersebut. Di samping itu, minilateralisme merupakan alat negara adikuasa, baik Amerika Serikat ataupun Cina, untuk mengeksklusi rivalnya (Kan, 2014; Fisher, 2008; Cohen, 2006). Meskipun demikian, tidak sedikit yang menganggap bahwa minilateralisme memiliki dampak positif khususnya bagi ASEAN. Efektivitas kerjasama minilateral dapat menjadi bagian komplementer yang memaksimalkan fungsi ASEAN (Teo, 2018; Heydarian, 2017).

Terlepas dari perdebatan tersebut, studi yang ada memiliki dua kelemahan utama. Pertama, mereka memiliki kecenderungan bias negara adikuasa sehingga tidak mengetengahkan aspirasi dari negara-negara kecil terhadap arsitektur keamanan regional yang sangat dinamis. Hal ini bisa berdampak pada langgengnya dominasi negara besar terhadap negara-negara kecil. Kedua, sebagian kajian melihat ASEAN sebagai aktor yang netral dan solid. Hal ini tentu problematik karena mengabaikan fakta bahwa ASEAN merupakan palagan bagi sejumlah negara untuk berebut pengaruh. Akibatnya, kita tidak mendapat gambaran siapa yang diuntungkan ataupun dirugikan atas munculnya minilateralisme. Oleh karena itu, tulisan ini akan menutup celah tersebut dengan menelusuri dampak dari minilateralisme bagi politik luar negeri salah satu negara yang merupakan pemain penting dalam percaturan politik di Kawasan Indo-Pasifik – Indonesia. Secara spesifik, kajian ini menelusuri pengaruh minilateralisme bagi proyeksi kekuasaan Indonesia yang ingin menjadi regional great power sebagaimana tercermin di Visi Indonesia 2045.

Konstelasi baru politik regional ini pada gilirannya meningkatkan kompleksitas bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan aspirasinya untuk menjadi pemain penting dalam politik regional. Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa lagi hanya bergantung kepada strategi tunggal yang selama ini telah digunakan dalam bentuk ASEAN

Centrality sebagai batu pijakan untuk meraih status regional great power setidaknya karena tiga hal. Pertama, legitimasi ASEAN-led mechanism yang semakin melemah karena menjamurnya minilateralisme. Kedua, minilateralisme menjadi indikasi bahwa negara adikuasa tidak akan dengan mudah membiarkan munculnya newcomer dalam palagan persaingan mereka. Ketiga, menjamurnya minilateralisme membuat Indonesia harus mencurahkan sumber daya yang lebih besar agar bisa mendapat rekognisi dari berbagai kerja sama minilateral atas status regional great power yang ingin dicapai.

Pilihan kebijakan yang bisa diambil adalah memperkuat institusi ASEAN misalnya melalui penguatan implementasi komitmen yang telah dicapai di ASEAN Summit. Hal itu harus dibarengi dengan kohesivitas internal ASEAN Member States yang menjadi prasyarat organisasi regional ini untuk tetap berpengaruh di Indo-Pasifik (Acharya, 2018).

Terlepas dari pentingnya ASEAN bagi politik luar negerinya, Indonesia juga harus memanfaatkan organisasi ini berdasar kekuatan dan kelemahannya secara tepat sembari mempertimbangkan opsi kebijakan di luar ASEAN demi tercapainya peranan Indonesia yang lebih besar dan aktif dalam politik global (Nandyatama, 2022). Merangkul minilateralisme merupakan pilihan rasional dalam rangka order.

Diplomasi Aktor Non-Negara dari *Global South*: Memahami Upaya
Organisasi Masyarakat Sipil Pasca Konferensi Bandung:

Randy Wirasta Nandyatama

Konferensi Bandung menandakan sifat diplomasi yang berbeda dalam politik global. Meskipun diplomasi seringkali dipahami sebagai kapasitas keterlibatan negara dan pejabat pemerintah di kancah internasional, Konferensi Bandung menunjukkan pola keterlibatan yang jauh lebih kompleks, terutama dengan semakin meningkatnya keterlibatan aktor non-negara dalam berbagai isu global. Berfokus pada kebutuhan untuk lebih menyadari upaya diplomasi aktor non-negara dan penggunaan lensa diplomasi baru, makalah ini mengkaji bagaimana aktor non-negara menjalankan strategi mereka kepada audiens internasional. Secara khusus, penelitian ini mengkaji dan membandingkan dua organisasi yang erat kaitannya dengan Konferensi Bandung, yaitu *Afro-Asian People Solidarity Organization* (AAPSO) dan *Afro-Asian Journalist Association* (AAJA). Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi efektivitas aspek aktivisme transnasional aktor non-negara serta peran dan praktik mereka dalam menciptakan diplomasi baru yang berbeda di arena global.

The Relationship between Sports-Politics-Religion: A Case Study of The FIFA World Cup in Qatar 2022

Dr. Siti Muti'ah Setiawati

Qatar's hosting of the FIFA World Cup allows exploration of the complex relationship between sport, politics and religion. On the one hand, sporting events such as the World Cup have long been seen as opportunities for countries to demonstrate their political and economic power on the global stage. On the other hand, religion plays an important role in Qatar's cultural fabric and has influenced various aspects of the preparation and hosting of the World Cup. The relationship between sport-politics-religion appears to be used to introduce Qatar as an Islamic country that implements Islamic sharia. The research question is why Qatar uses the momentum of sports to introduce Islamic values? How does Qatar carry out public diplomacy to counter negative opinions? This research is a descriptive qualitative study to understand a case of holding the football world cup in Qatar 2022.

The FIFA World Cup is not just a sporting event but also a platform for countries to showcase their political, economic and cultural might on the global stage. The decision to award hosting rights to the FIFA World Cup to Qatar was heavily influenced by political and economic factors. Qatar's bid to host the World Cup was met with scepticism and criticism due to concerns about the country's human rights record, particularly regarding the treatment of migrant workers and women's rights. Qatar's selection to host the 2022 World Cup has sparked controversy and raised questions about the intersection of sport, politics and religion. Religion also plays an important role in the relationship between sport and politics in Qatar. Qatar is an Islamic country, and hosting a global sporting event such as the World Cup in a Muslim-majority country has implications for how sport intersects with religion. Sport is often used as a tool of soft power and nation-building, and governments use major sporting events to enhance their international reputation and increase national pride. But Qatar's hosting of the World Cup has sparked debate and discussion regarding labour conditions, workers' rights and human rights violations.

The results of the research show that Qatar as a sovereign country has the authority to implement laws and in its territory which is used to introduce Qatar as an Islamic, sovereign and economically powerful country. Economic power is used to respond to negative opinions about Qatar's policies during the match through

effective public soft power diplomacy so that negative opinions about the holding of the match do not interfere with the success of holding the 2022 FIFA World Cup.

DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN ILMU KOMUNIKASI

Menguak Kebenaran Berita Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung
Republik Indonesia versi Harian Jawa Pos

Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar

Polri tidak bisa dilepaskan dari penanganan berbagai peristiwa kriminal penting yang pernah terjadi di tanah air. Kontribusinya sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama menyangkut penyebab kejadian itu. Ini juga terjadi dalam kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Indonesia (GKAI) pada 20 Agustus 2020. Monograf ini mencoba mengkaji delapan berita tentang kebakaran GKAI pada 20 Agustus 2020. Hasilnya mungkin mengejutkan, tetapi mungkin pula tidak. Yang jelas, dengan menggunakan analisis isi kuantitatif terhadap semua berita itu diperoleh kesimpulan: *Jawa Pos* cenderung menerima saja informasi yang berasal dari narasumber, yang sebagian besar merupakan polisi dan jaksa.

Dengan profil berita seperti, rasanya *Jawa Pos* tidak layak menyandang predikat surat kabar terbaik Indonesia tahun 2014. Adakah alasan kuat dibalik penampilan semua berita itu? Ternyata *Jawa Pos* sengaja merendahkan dirinya untuk menyiasati arogansi polisi.

Nah arogansi polisi inilah sebenarnya yang perlu diperbincangkan lebih lanjut. Memang monograf ini sudah membicarakan soal arogansi polisi ini. Namun, sebaiknya pembicaraan tentang ini harus tetap dilanjutkan. Paling tidak agar *motto* Polri melindungi dan melayani masyarakat tidak hanya jadi slogan kosong untuk pencitraan saja.

Selengkapnya terdapat enam bab dalam monograf ini, meliputi: *Bab I Pendahuluan, Bab II Berita-Berita tentang Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung di Harian Jawa Pos: Dari Berita Bencana Ke Berita Kriminal, Bab III Anatomi Berita Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung di Harian Jawa Pos: Terhimpit oleh Berita tentang Djoko Tjandra, Bab IV Polisi sebagai Narasumber Berita Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung: Tercemarnya Prinsip Melindungi dan Melayani Masyarakat, Bab V Berkurangnya Ruang Publik Masyarakat: Terhimpit oleh Romantisasi dan Kuasa Polisi, dan Bab VI Penutup.*

“I Want Her To Have Sex With Her” *Mewujudkan Hasrat Seksual Dalam Fancomic Yuri*

Dr. Ardian Indro Yuwono

Penelitian ini bertujuan menjawab bentuk-bentuk pewujudan (*embodiment*) hasrat atau fantasi komikus *fancomic yuri* di Indonesia. Tumbuhnya konsumsi audiens anime, manga, gim, maupun *virtual* YouTuber di Indonesia beberapa tahun ke belakang melonjakkan jumlah audiens media hiburan ini. Pada saat bersamaan, cukup luwesnya penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) anime, manga, maupun gim memberikan banyak kesempatan bagi audiens untuk berpartisipasi dengan mengembangkan teks dari pakem yang telah ada. Salah satunya adalah partisipasi audiens untuk membuat *fancomic* bergenre *yuri* atau genre yang menceritakan hubungan antarperempuan.

Dengan menggunakan metode wawancara dan etnografi berbasis fenomenologi, artikel ini menelusuri pengalaman dua anggota dari lingkaran berkarya (lingkarnya) yang berfokus pada genre *yuri*, Yuri Nakama, yakni Momo dan Nattamon. Momo merupakan laki-laki berasal dari Yogyakarta yang telah fokus membuat komik orisinal maupun parodi bergenre *yuri* sejak kuliah terutama dari seri *Love Live!* dengan pasangan utama Nico Yazawa dan Maki Nishikino, NicoMaki, sementara Nattamon berdomisili di Jakarta dan lebih banyak membuat *artbook* dari seri-seri yang ia ikuti seperti *Puella Magi Madoka Magica*. Penulis melihat fenomena ini dengan psikoanalisis, utamanya Lacanian, serta dari Freudian dan Jungian dengan patokan hasrat, pewujudan, fase cermin, dan ketidaksadaran. Selain itu, penulis juga melihat budaya partisipasi audiens dalam proses produksi *fancomic*.

Penelitian ini kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa hasrat dan ego ideal pengarang sering diwujudkan dalam karya pengarang. Ketiadaan editor dalam memproduksi komik independen ini memberi cukup banyak keleluasaan bagi subjek untuk mewujudkan hasrat dalam mengatasi *lack* yang tidak disediakan secara gamblang oleh teks pakem. Dengan begini, mereka menggunakan ketidaksadaran dalam menggambar untuk “mengasupi diri” sendiri. Dalam kasus Momo, ia menghasratkan situasi yang romantis dan membakar semangatnya dalam berkarya dari pasangan NicoMaki favoritnya. Nattamon sementara itu suka melihat karakter-karakter manis dengan kostum imut dengan menaruh hasratnya untuk memiliki rambut yang bergelombang ke dalam salah satu karakter orisinalnya. Hanya saja, ketidaksadaran dan ruang tata simbolik seperti moral, ideologi, dan desakan dari kelompok asing sering mengganggu keleluasaan berkarya. Momo mengakui ia telah

berhenti menggambar hubungan dewasa antarperempuan karena merasa bahwa tidak semua orang dapat menyukai hubungan seksual lesbian yang eksplisit terutama dibuat oleh laki-laki sebagai bagian dari komunikasinya di dalam komunitas selama ini selain tidak lagi menggambar karakter laki-laki di dalam komiknya sebagai perwujudan diri dalam karya. Nattamon sendiri mengaku kurang dapat terbuka di kehidupan fisiknya kalau menggambar komik, terutama bergenre *yuri*. Ia juga melihat bahwa hubungan antarperempuan yang ia buat masih memiliki nafas heteronormatif dengan pembagian peran maskulin-feminin. Lanjutnya, alasan ia menggambar dua perempuan karena tidak merasa laki-laki pantas mengenakan baju manis/imut yang ia sukai. Berbeda dengan Nattamon yang tidak peduli dengan pasar, Momo secara sadar membentuk pasar yang dapat membeli karyanya sehingga sekarang fokus membuat komik komedi yang dapat diterima banyak orang dan dapat dijual bebas. Di sisi lain, partisipasi seniman *yuri* seperti kedua subjek membuat *fancomic* bisa dilihat sebagai sebuah *audience labor* yang disodorkan Smythe dengan senang hati dan murah dengan mempromosikan suatu produk media secara gratis sekalipun audiens juga mendapatkan keuntungan materiil maupun pamor di dalam komunitas.

Keintiman Visual: Dinamika Ikatan Sosial dalam Praktik Digital

Dian Arymami

Media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kaum muda saat ini. Di sebagian besar platform media sosial, interaksi antara pengguna hadir dalam bentuk *linking*, *commenting*, atau *reposting*. Fitur berbagai hadir pada tiap platform media sosial, meski menggunakan istilah berbeda; seperti *retweeting* yang dikenal di Twitter, *sharing* sebagai istilah dalam Facebook dan *reposting* di Instagram. Fitur berbagai secara garis besar merupakan penerusan unggahan media sosial pengguna lain ke jaringan personal.

Di tengah penggunaan media sosial dalam keseharian masyarakat, platform Instagram merupakan media sosial favorit pengguna. Cerita Instagram atau *Instagram story* merupakan salah satu fitur teratas yang memenangkan hati pengguna Instagram dalam sekejap mata sejak integrasi pertama mereka ke dalam platform. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi kisah personal dalam waktu 24 jam. Pada prakteknya fitur ini melahirkan fenomena baru terkait dengan artikulasi relasi sosial antar pengguna. Praktik *tagging* dan *reposting* cerita berkembang pesat antar pengguna Instagram dalam upaya artikulasi perhatian dan hubungan ikatan sosial. Instagram story dalam perkembangannya di Indonesia digunakan sebagai medium untuk saling berkomentar, mengucapkan terimakasih, dan selamat antar pengguna. Praktik ini dengan sendirinya menciptakan ruang baru ikatan interpersonal yang dipertontonkan di ruang publik. Fenomena unik ini membuka pertanyaan mengenai nilai sosial dari interaksi online.

Aktivitas yang berlangsung dalam ruang digital ini melibatkan pembinaan dan pengekalan interaksi sosial melalui budaya visual yang dijalin dengan lapisan norma dan harapan pribadi yang lazim. Memahami fenomena ini adalah penting untuk memahami makna dan praktik hubungan sosial yang mempunyai akibat penting untuk cara orang hidup dan cara mereka memahami dunia. Kajian ini dijalankan melalui pendekatan etnografi virtual dalam kalangan 8 pengguna Instagram harian. Kajian ini menunjukkan bahawa *tagging* dan *reposting* menimbang struktur dan pemeliharaan ikatan dan konektivitas sosial. Praktik cerita Instagram merupakan budaya keintiman visual dalam media sosial mendedahkan landskap pelbagai rupa yang mempengaruhi dan membentuk interaksi dan hubungan sosial saat ini. Ia terjalin dalam dinamika relasi dalam korelasi dengan kualitas ikatan sosial. Interaksi simbolik yang menandakan ruang untuk rekognisi, penghargaan, evaluasi relasi, serta hasrat untuk berhubung dalam era digital.

Kepercayaan (Trust) dalam Kompleksitas Manajemen Bencana: Studi Komparatif Dinamika Kepercayaan Publik di Wilayah Rawan Bencana di Indonesia

Prof. Dr. Hermin Indah Wahyuni

Riset ini bertujuan untuk menginvestigasi dinamika kepercayaan pada pemerintah, media, dan antara sesama anggota masyarakat atau komunitas di wilayah rawan bencana di Indonesia. Dimensi kepercayaan menentukan respon atas bencana dan dalam konteks lebih luas berimplikasi pada manajemen bencana. Kepercayaan pada pemerintah misalnya dapat membuat upaya relokasi dari daerah-daerah rawan bencana berlangsung optimal atau sebaliknya. Selain itu, konstruksi yang dibentuk oleh media atas bencana yang terjadi bisa menentukan seperti apa persepsi masyarakat atas risiko yang mereka hadapi. Lalu, situasi kepercayaan antara anggota masyarakat atau komunitas juga membawa dampak pada aspek ketahanan terhadap bencana yang mereka hadapi.

Meskipun kepercayaan dianggap penting dalam konteks kebencanaan, namun hal ini belum cukup dieksplorasi terutama dengan komparatif kasus bencana yang karakteristiknya berbeda.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil dua wilayah bencana yakni Semarang dan Yogyakarta sebagai kasus yang diteliti. Bencana banjir rob telah berlangsung beberapa dekade di Semarang dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta menempatkan masyarakat yang tinggal di lereng-lerengnya pada kondisi yang riskan. Prosedur pengumpulan data penelitian adalah wawancara dengan masyarakat yang tinggal di kedua wilayah dengan karakteristik bencana yang berbeda ini. Jumlah narasumber penelitian ini adalah 15 orang dengan latar belakang yang beragam.

Hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah, media, dan antara masyarakat di kedua wilayah bencana ini menunjukkan potret yang berbeda pada beberapa hal dan sama pada beberapa hal lain. Kepercayaan pada pemerintah di kedua wilayah meskipun berbeda potretnya, menunjukkan bahwa aspek distribusi bantuan menjadi penentu penting dalam dinamika kepercayaan. Sementara itu, kepercayaan pada media baik di Semarang maupun Yogyakarta menunjukkan fakta yang cenderung negatif ketika beberapa narasumber menyampaikan bahwa media terkadang meleboh-lebihkan berita mengenai bencana yang terjadi. Hal yang cukup berbeda adalah kepercayaan horizontal atau kepercayaan antara masyarakat yang cenderung positif di Yogyakarta namun

sebaliknya di Semarang. Penelitian ini menunjukkan pentingnya kepercayaan dalam manajemen bencana berdasarkan potret dari dinamika kepercayaan pada tiga dimensi di atas. Karakteristik bencana yang berbeda antara banjir rob dan gunung berapi nampaknya menentukan dinamika kepercayaan. Pilihan untuk menempatkan aspek kepercayaan dalam framework manajemen bencana merupakan sesuatu yang diperlukan untuk menjamin upaya penanganan bencana dan pengurangan risikonya optimal. Peran media dalam membangun realitas bencana dan membawa masyarakat pada kondisi ideal dalam merespon bencana yang terjadi di wilayah mereka akan optimal ketika masyarakat menaruh kepercayaan mereka pada institusi ini.

Riset ini membawa implikasi teoritis pada kajian mengenai kepercayaan dan bencana dengan menawarkan pembacaan atas kasus komparatif yang memang perlu diupayakan lebih luas.

Beberapa temuan riset ini menegaskan sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya dan beberapa fakta lain mengisi celah pemahaman selama ini dalam kajian kepercayaan dan bencana. Dalam hal yang praktis, hasil riset ini mendorong framework manajemen bencana yang perlu menempatkan aspek kepercayaan yang multi-dimensi sebagai salah satu pilar pentingnya.

Historiografi Karier Perempuan sebagai Pekerja Film dalam Industri Film Indonesia Sebelum Reformasi (1926-1997)

Novi Kurnia

Populernya kajian mengenai karier perempuan sebagai pekerja film didominasi kajian sutradara perempuan karena sutradara dianggap elemen produksi film yang paling berpengaruh terhadap praktik dan representasi perempuan. Kajian-kajian sutradara perempuan dalam sinema Indonesia di era reformasi berkembang pesat sejak tahun 2000-an. Kajian-kajian tersebut memberikan catatan bahwa kehadiran mereka mengubah lanskap sinema Indonesia dengan hadirnya ruang dan suara perempuan 'baru'. Sementara, kajian dengan perspektif historis tentang sutradara perempuan sebelum reformasi tidak banyak dilakukan. Kalaupun ada, terbatas pada kajian yang menunjukkan ketidakberdayaan mereka dalam industri film yang patriarkis.

Riset ini menjawab kekosongan tersebut dengan mempertanyakan historiografi karier perempuan sebagai pekerja film dalam industri film Indonesia sebelum reformasi (1926-1997). Metode yang digunakan adalah studi kasus berdasarkan perspektif feminis media historis. Adapun teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen mengenai enam sutradara perempuan sebelum reformasi, yakni: Ratna Asmara, Roostijati, Sofia WD, Chitra Dewi, Ida Farida, dan Rima Melati. Data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis berasal dari beragam dokumen, terdiri dari: surat kabar, majalah, naskah film, film, kritik film, katalog film, buku, artikel jurnal, maupun dokumentasi tertulis lainnya.

Secara umum, temuan riset ini menunjukkan bahwa tidak hanya berperan sebagai sutradara, enam perempuan yang diteliti juga berperan sebagai pekerja film lainnya: produser, penulis naskah maupun bintang film. Secara khusus, riset ini menunjukkan berbagai temuan spesifik. *Pertama*, penulisan sejarah yang mengaburkan fakta terkait sutradara pertama di Indonesia sehingga perlu diluruskan. Bukan Sofia WD yang tertulis di sebagian dokumen sebagai sutradara perempuan pertama melainkan Ratna Asmara yang menyutradarai film pertamanya, *Sedap Malam*, pada tahun 1951. *Kedua*, nyaris semua sutradara perempuan memulai kariernya sebagai bintang film, bukan sutradara. Hanya Ida Farida yang memulai kariernya asisten sutradara sebelum menjadi sutradara. *Ketiga*, nyaris semua sutradara perempuan lebih menekuni kariernya sebagai bintang film selama karier mereka kecuali Ida Farida. *Keempat*, sutradara film perempuan yang 'bertahan' hidup dalam industri film mengalami proses maskulinisasi baik dari

internal maupun eksternal ekosistem film. Maskulinisasi tidak hanya terlihat dari penampilan dan caranya bekerja yang menyesuaikan gaya (sutradara) laki-laki, namun juga caranya mengadopsi perspektif laki-laki dalam membingkai karakter perempuan dalam film mereka. *Kelima*, kajian yang terbatas mengenai sutradara perempuan sebelum reformasi cenderung melihat ketidakberdayaan mereka dalam industri film yang dikuasai oleh laki-laki. Namun, studi ini menunjukkan bahwa ada agensi di antara enam sutradara perempuan yang diperlihatkan dengan dampingan Sofia WD sebagai senior terhadap Ida Farida saat memulai kariernya sebagai sutradara. *Keenam*, sebagian besar karier enam sutradara perempuan berakhir sebagai bintang film, kecuali Ida Farida yang berpindah profesi menjadi penulis dan sutradara serial televisi.

Studi ini menunjukkan bahwa menjadi bintang film adalah sejarah karier paling dominan sebagian besar sutradara perempuan sebelum reformasi. Temuan ini mencerminkan pandangan bahwa akting lebih mudah daripada mengarahkan, yang memiliki tanggung jawab lebih besar—dan secara inheren mengharuskan perempuan untuk mengelola pekerja film laki-laki. Selain itu, dalam industri film yang didominasi laki-laki, perempuan lebih berharga di depan kamera sebagai tontonan dibandingkan di belakang kamera sebagai sutradara, ‘pembuat tontonan’.

Kata kunci:

perempuan, pekerja, sutradara, industri film, Indonesia, sebelum reformasi

Informatika Sosial Laodikia dalam Cipta Konten Digital (*Social Informatics of Laodicean in Digital Content Creation*)

Prof. Dr. YA. Nunung Prajarto

Teknologi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat modern. Hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan persinggungan antara teknologi dan masyarakat di berbagai bidang, termasuk kesehatan, politik, dan sosial. Dalam hal ini, sorotan tentang kehidupan masyarakat tertaut dengan teknologi kebanyakan dilimpahkan pada sisi muara, yang dalam aktivitas komunikasi, cenderung tertuang dalam sejumlah kajian mengenai strategi, efektivitas, dan dampak.

Namun demikian, hal yang tak kalah atau bahkan lebih penting, perhatian juga perlu ditimpakan pada sisi hulu dalam aktivitas komunikasi. Hal substantif pada sisi hulu ini sangat layak dikaji manakala aktivitas komunikasi diarahkan untuk mendapatkan atau mencapai kualitas komunikasi yang utuh secara baik. Asumsi dan penjelasan yang diberikan di dalam penelitian ini pada dasarnya sangat sederhana, yakni meyakini bahwa rekayasa komunikasi yang dilakukan sejak di area hulu justru semakin memudahkan segala upaya dan pencapaian tujuan komunikasi secara utuh di berbagai hal, termasuk dalam kaitannya dengan kebijakan komunikasi, sistem komunikasi, komunikasi strategis, dan media komunikasi.

Kehadiran teknologi dalam persinggungannya dengan masyarakat pun dengan sendirinya menuntut perhatian lebih pada sisi hulu penciptaan atau penyusunan pesan. Salah satu wujud yang perlu diperhatikan terletak pada penciptaan konten digital yang dalam penelitian ini mengarah pada berbagai temuan mengenai rekayasa komunikasi terhadap para pencipta, pengunggah, atau penebar konten digital serta peredaran konten digital dalam berbagai kategori penghormatannya pada perizinan, aturan, dan kesepakatan. Relasi dalam berbagai bentuk cipta konten digital juga menunjukkan titik ekstrim antara mereka yang berkomitmen pada penciptaan konten digital secara baik dan mereka yang menunjukkan atau memiliki karakter laodikia.

Meskipun terdapat sejumlah limitasi, setidaknya penelitian ini telah menunjukkan pentingnya memperhatikan dan mengembangkan tiga hal. Pertama, rekayasa komunikasi sebagai salah satu area dalam kajian ilmu komunikasi yang harus disadari sangat potensial untuk dikembangkan. Kedua, perlunya menggeser aktivitas penyadaran kehadiran teknologi, tidak lagi sekadar difokuskan pada kawasan hilir tetapi lebih ke arah hulu, atau setidaknya dilakukan secara berimbang. Ketiga, perlunya membuka wawasan dan memberi pemahaman tentang

profesionalitas, komitmen, dan regulasi dalam cipta konten digital, sehingga pertumbuhan dan perkembangan pencipta konten digital dapat didominasi oleh mereka yang tidak terbelenggu karakter laodikia.

Antara Kontestasi Opini sampai Partisipasi Kolektif: Meneroka Komunikasi Politik Digital di Indonesia pada Era Media Sosial

Wisnu Martha Adiputra

Perkembangan media baru dan teknologi informasi dan komunikasi mengubah karakter dan proses komunikasi politik di Indonesia. Kehadiran internet di tengah masyarakat pada awal dekade 1990-an mendorong semakin terbukanya informasi dan partisipasi warga yang pada akhirnya ikut mendorong perubahan politik pada tahun 1998, yang dikenal sebagai Reformasi. Perkembangan tersebut yang kemudian menjadi landasan bagi perubahan karakter komunikasi politik digital yang dirasakan oleh warga sampai saat ini. Perubahan tersebut adalah semakin sadarnya warga atas hak-hak mendasarnya, termasuk hak atas informasi dan berkomunikasi. Lebih jauh lagi, media sosial kemudian berkembang lebih maju menjadi beberapa jenis, antara lain media sosial.

Proses komunikasi politik Indonesia menuju era media sosial terbagi dalam tiga periode waktu. Periode pertama adalah menjelang 1998 di mana internet sebagai media baru sudah mulai dikenal. Milis *Apakabar* menjadi saluran utama dari media baru yang turut mendorong proses Reformasi. Selain media baru, media alternatif juga mengambil peran untuk menyebarkan ide dan semangat untuk menurunkan rejim yang berkuasa.

Kedua, adalah periode 1999 sampai dengan 2010, di mana media massa semakin canggih, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan juga semakin dominan, terutama media televisi. Media sosial sudah mulai dikenal sejak tahun 2007, namun menjadi populer pada tahun 2010. Kehadiran media sosial bahkan dianggap menghilangkan fenomena blog dan blogger yang baru mulai populer pada saat itu. Blog yang dianggap sebagai pilar kelima demokrasi seakan menghilang tanpa jejak.

Periode ketiga, yaitu tahun 2010 sampai dengan sekarang, adalah periode yang paling signifikan bagi media sosial dalam mempengaruhi komunikasi politik Indonesia. Peran media sosial penting sekali bagi kontestasi politik, terutama pada tahun 2014 dan 2019. Media sosial menjadi arena bagi kontestasi opini di mana warga beropini dan berekspresi dengan relatif bebas pada masa-masa itu. Namun opini yang terbentuk, opini pro atau kontra, terhadap suatu isu bukan didasarkan atas fakta dan pertimbangan yang matang, namun lebih karena kedekatan emosi. Gejala ini dikenal sebagai era pasca kebenaran. Bila pada masa sebelumnya opini publik berjarak dengan realitas, pada era media sosial realitas sosial, realitas media, dan

realitas virtual seperti berelasi. Fenomena ini yang dikenal dengan virtualitas nyata, bukan hanya realitas virtual. Ruang publik yang sebelumnya abstrak dan bersifat imajiner menjadi lebih nyata dan dapat dikategorisasi secara spesifik demi penentuan strategi dan tindakan politik. Semakin lama anonimitas pada media sosial dapat lebih mudah diatasi walaupun era media sosial menjadi *dark social* karena tersebarnya hoaks dan juga ujaran kebencian.

Partisipasi politik warga juga mengalami perubahan yang berarti. Partisipasi kolektif mulai dapat dilakukan melalui media sosial, terutama untuk penggalangan dana dan mengkoordinasi kegiatan. Partisipasi kolektif terjadi bukan hanya pada ranah media sosial, melainkan juga terjadi pada dunia sosial yang nyata sehingga perubahan politik menjadi lebih mungkin dilakukan. Berpartisipasi dan berkolaborasi adalah dua aktivitas yang paling mungkin dilakukan di era media sosial. Kontestasi opini dan partisipasi kolektif menjadi dua hal penting di dalam komunikasi politik pada era media sosial. Namun hal yang paling penting adalah tetap mengutamakan hak-hak berkomunikasi warga dan terus memperbaiki kualitas demokrasi seperti yang telah diperjuangkan bersama pada seperempat abad yang lalu.

Model Komunikasi Pemasaran dalam Mengembangkan Jaringan Anggota pada Bisnis
Multilevel Marketing

Widodo Agus Setianto

Penelitian ini membahas komunikasi pemasaran perusahaan multilevel marketing yang didirikan dan beroperasi saat pandemic COVID-19. Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh pemerintah, aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Salah satu dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar adalah terganggunya aktivitas ekonomi perusahaan. Proses pemasaran tidak dapat berjalan dengan efektif, banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi dengan baik. Distribusi produk terhambat karena banyak jalan dan jalur alternatif yang ditutup. Pada akhirnya banyak perusahaan yang tutup atau menutup sementara operasinya. Hal ini tentu sangat mempengaruhi ekonomi perusahaan. Masalah yang dihadapi adalah menghadirkan perusahaan agar dapat diterima konsumen dan konsumen menjadi anggota untuk ikut mengembangkan jaringan di tengah kecamuk wabah COVID-19, persaingan pasar dan menurunnya kepercayaan masyarakat pada bisnis multilevel marketing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui model komunikasi pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan jaringan. Penelitian dilakukan dengan metode single instrumental case study berdasarkan metodologi yang dijelaskan Stake (2005). Peneliti memilih menggunakan metode studi kasus Stake karena peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini. Ini merupakan bentuk penelitian yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai sebuah isu. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap direksi dan beberapa master leader. Analisis data dilakukan dengan menggunakan empat bentuk analisis data menurut kriteria Stake; 1) categorical aggregation, 2) direct interpretation, 3) correspondence and pattern, 4) naturalistic generalization. Analisis data dimulai dengan 1) mencari suatu kumpulan contoh data dan mencari makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; 2) membuat interpretasi langsung dengan menarik data secara terpisah dan menempatkannya kembali bersama-sama agar lebih bermakna; 3) membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori; 4) mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data. Hasil penelitian: PT BBC merupakan sebuah perusahaan baru yang berhasil membangun dan mengembangkan bisnis perusahaannya di tengah-tengah situasi usaha yang sedang lesu karena pandemic COVID-19, sikap resisten masyarakat terhadap bisnis dengan sistem MLM, dan

persaingan dengan perusahaan dengan lini bisnis yang sama. Dalam membangun keberhasilan bisnisnya PT BBC bertumpu pada substansi bisnis dan komunikasi pemasaran yang efektif. Substansi bisnisnya pada penjualan produk kesehatan herbal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah-tengah kekhawatiran masyarakat akan obat-obatan sintetik berbasis bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping jangka Panjang. PT BBC mengemas model bisnisnya dengan model bisnis yang mudah dan dapat dijalankan oleh siapapun dengan riang gembira tanpa tekanan dari perusahaan. PT BBC mengembangkan model komunikasi pemasaran dengan menggunakan model fungsional, model pendistribusian informasi dan model PESO. Model komunikasinya berbasis pada komunikasi verbal melalui komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, komunikasi digital dengan menggunakan web perusahaan dan media sosial yang disampaikan secara terintegrasi. Model komunikasi pemasaran dilakukan melalui tiga model. Pertama, model komunikasi interpersonal dalam bentuk komunikasi kelompok melalui acara presentasi peluang bisnis oleh para leader dengan sistem benteng Stelsel. Kedua, model pembinaan kepercayaan dan keterampilan anggota dalam bentuk komunikasi kelompok melalui pertemuan bersama direksi dan para leader. Ketiga, menggunakan media sosial, website, brosur, dan publikasi media massa sebagai media informasi. Hasil penelitian memberikan perspektif baru dalam komunikasi pemasaran dan pengembangan bisnis multilevel marketing.

Diversity of Content in the *Free-to-Air* Terrestrial Digital Television Industry in
Indonesia: Reflection on the Impact of Digitalization Regulations

Dr. Rahayu

This research aims to discuss and explore the impact of broadcasting's digitalization policy towards "diversity of content." This research argues that digitalization policy innovations in broadcasting have the potential to enrich content diversity. This potential could be fulfilled if digital television commits to public service and its supporting regulations. This research integrates the theory of democratic broadcasting, diversity of content, and media regulation in developing the conceptual framework. To discuss digital broadcasting, this research focuses on 2 provinces, DKI Jakarta and Daerah Istimewa Yogyakarta. These choices are made based on the distinct, comparable characteristics reflected by these two provinces. This research is a "desk study" consisting of: 1) data collection of digital television documents, including their main program information, 2) coding and categorizing of the data collected, noting as well the broadcast timings, 3) processing and analyzing the coded and categorized data. These research findings show that digitalization broadcasting regulation in Indonesia has yet been satisfactory in enriching content diversity. The number of categorial diversity in programs is still minimal, and there are evident regulatory gaps in terms of promoting and maintaining diversity of content. This research asserts the need for regulators to formulate relevant policies encouraging diversity of content so that the public's rights pertaining to television broadcasting consumption could be sufficiently fulfilled.

Keywords: Content Diversity, Digital Television, Marketplace of Idea, Broadcasting

**DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN MANAJEMEN
KEBIJAKAN PUBLIK**

Birokrasi Indonesia Era Pandemi: Studi Komparatif Manajemen Inovasi
Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara BAPENDA Jateng dan BPKA
DIY

Suripto

Pandemi covid-19 merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang memberikan pengaruh yang luas dan mendalam dalam berbagai sektor. Tantangan pandemi COVID-19 bukan hanya dihadapi oleh pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Sebagai contoh, dua provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun pertama pandemi COVID-19. Menariknya, pada tahun kedua pandemi COVID-19, Provinsi Jawa Tengah berhasil kembali meningkatkan pendapatan daerahnya namun Provinsi DIY tetap mengalami penurunan pendapatan daerah. Kontradiksi performa pendapatan daerah ini menjadi fenomena utama yang diteliti pada penelitian ini. Terutama berfokus pada mendalami mengapa dua provinsi yang menghadapi gejala yang sama yaitu pandemi COVID-19 dapat memiliki performa pendapatan daerah yang berbeda.

Penelitian ini menduga bahwa terdapat perbedaan inovasi kebijakan publik dibalik perbedaan performa ini. Penelitian ini kemudian berfokus untuk menganalisis bagaimana inovasi kebijakan terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang merupakan sumber utama pendapatan pajak daerah di Jawa Tengah dan DIY. Analisis dilakukan untuk melihat tata kelola inovasi kebijakan berdasarkan indikator tata kelola adaptif yaitu flexible arrangement (fleksibilitas proses pengambilan keputusan, fleksibilitas konten kebijakan, dan fleksibilitas struktur organisasi) dan barriers to flexible arrangement (distribusi kewenangan, distribusi biaya & manfaat dan manajemen *distrust*). Analisis juga dilakukan untuk melihat komponen inovasi kebijakan yaitu inovasi teknologi, inovasi strategi, inovasi struktur & SDM, dan inovasi *measurement system*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 3 kesimpulan utama dapat dirumuskan. Kesimpulan pertama yaitu terkait flexible arrangement baik Jawa Tengah dan DIY relatif memiliki kesamaan dalam hal fleksibilitas proses pengambilan keputusan dan konten kebijakan. Sementara untuk aspek struktur organisasi keduanya relatif tidak fleksibel. Hal yang membedakan adalah di Jawa Tengah terdapat skema kerjasama yang lintas organisasi yang lebih fleksibel. Hal ini terlihat dari skema kerjasama dibalik SAMSAT Budiman.

Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki kemitraan yang lebih luas untuk pembayaran PKB dengan berbagai bank, platform digital, Pos Indonesia dan jaringan waralaba minimarket. Kesimpulan kedua yaitu terkait barriers to flexible arrangement baik di Jawa Tengah dan DIY memiliki distribusi kewenangan dan trust building yang relatif sama. Namun demikian, terkait pembagian biaya dan manfaat di DIY lebih bersifat terpusat namun di Jawa Tengah terdapat skema insentif kompetitif. Hal ini utamanya diterapkan pada SAMSAT Budiman. Kesimpulan ketiga adalah terdapat perbedaan terkait aspek desain komponen inovasi kebijakan di Jawa Tengah dan DIY. Terkait inovasi teknologi, Jawa Tengah berbasis pada digitalisasi penuh sementara DIY berbasis pada pendekatan digitalisasi hibrid. Terkait inovasi strategi, Jawa Tengah melakukan digitalisasi penuh yang ditopang dengan kemitraan yang lebih luas dibandingkan kemitraan di DIY yang lebih terbatas. Terkait struktur organisasi dan SDM keduanya dalam menghadapi pandemi COVID-19 sama-sama tidak mendirikan task force dan melakukan penambahan SDM.

Terakhir, dalam hal measurement system di Jawa Tengah mempertahankan target penerimaan PKB sementara di DIY dilakukan penurunan target penerimaan PKB. Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam membangun kemitraan strategis dengan organisasi lainnya merupakan faktor penting dalam proses adaptasi dan inovasi. Kemudian, skema pembagian biaya dan manfaat dapat mendorong peran aktif atau justru membuat pasif aktor-aktor dalam organisasi atau yang bermitra dengan organisasi.

Samodra Wibawa dan Hibah Huwaidaul Husna

Pendahuluan

BUMDes merupakan amanah dari UU No. 6/2014 ttg Desa, diharapkan menjadi pendorong kemandirian ekonomi desa. Karena diwajibkan, maka jumlah BUMDes meningkat pesat dari hanya 1.022 pada 2014 menjadi 60.417 buah pada 2022, namun mungkin hanya 10%-nya yang sukses. Studi ini meneliti keberhasilan BUMDes Sambimulyo di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kab. Sleman, DIY, yang bisnis utamanya adalah wisata Tebing Breksi. Teori yang digunakan adalah *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2008), dan metode penelitiannya kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan para informan di desa dan dianalisis secara konvensional/manual.

Hasil penelitian

BUMDes Sambimulyo didirikan tahun 2016, tapi baru aktif sejak 2019. Pada awal pembentukannya BUMDes belum dipercaya oleh masyarakat, kualitas SDM-nya rendah, dan karena itu mati suri. Pada 2019 terjadi pergantian pengelola, dan disertai tanggung jawab untuk mengelola Tebing Breksi yang baru saja mengalami kekisruhan manajemen di bawah Pokdarwis. Sejak itu BUMDes Sambimulyo menjadi stakeholder utama dalam pengelolaan bisnis desa, dan mampu menyumbangkan PAD hingga Rp1,270 M kepada Desa.

BUMDes melaksanakan tugasnya secara kolaboratif dengan lembaga lain di desa, yaitu Pokdarwis, Desa Wisata dan Pemkal, juga dengan lembaga eksternal -- perguruan tinggi, swasta, pemerintah pusat, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan kerangka pikir Ansell and Gash (2008), proses kolaborasi dimulai dari dialog di antara para pelaku tersebut, lalu timbul kepercayaan, terbentuk komitmen dan pemahaman bersama di antara mereka, dan kemudian terwujudlah *output* maupun *outcome* yang diharapkan.

Dialog atau komunikasi di antara para stakeholder tersebut kebanyakan berlangsung secara informal dan tidak terjadwal rutin. Adanya pelaku yang menjabat di dua posisi (yaitu Direktur BUMDes merangkap sebagai Wakil Ketua Pokdarwis, sementara Ketua Pokdarwis menjabat Sekretaris Kalurahan) menjadikan komunikasi dan koordinasi antar lembaga desa berlangsung lebih lancar. Dialog, rapat dan negosiasi yang tidak mudah akhirnya menumbuhkan kepercayaan. Dialog dan rapat-rapat menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam regulasi, di mana tugas dan

kewajiban setiap lembaga ditegaskan. Semua pihak memiliki pemahaman bersama terhadap tujuan yang jelas, visi dan misi, dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Dan kemudian setiap lembaga berkomitmen untuk mematuhi, lalu bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Hasilnya adalah ramainya pariwisata di Desa Sambirejo, kas desa memperoleh pemasukan, dan masyarakatnya juga memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai pekerja wahana wisata dan unit bisnis lain dari BUMDes maupun sebagai pemilik UMKM.

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* telah menjadikan BUMDes Sambimulyo sukses menjalankan perannya sebagai lembaga bisnis desa. Dengan kolaborasi bersama aktor terkait, wisata di Desa Sambirejo telah berkembang dengan baik. Apa yang terjadi di Sambirejo ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap BUMDes pada umumnya dan terhadap BUMDes yang bergerak di bidang wisata pada khususnya. Namun harus diingat karakteristik desa, termasuk lingkungan yang melingkupi setiap BUMDes. Untuk agenda penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi komparasi pada beberapa BUMDes yang sejenis maupun yang berbeda usahanya, dengan karakteristik internal dan eksternal yang sama maupun berbeda. Studi kasus yang lebih mendalam juga disarankan, di mana peneliti tinggal di lokasi selama beberapa minggu untuk memperoleh data yang lebih kaya.

Kata kunci: *collaborative governance*, karakteristik desa, dialog, komitmen, pemahaman bersama, *outcome*.

DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN POLITIK &
PEMERINTAHAN

Negara Pembangunan dan Regim Ekstraktif Pasca Neoliberal: Sebuah Kajian Literatur

Hasrul Hanif, Ph.D.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana transformasi negara pembangunan sering dengan meredupkan ideologi neo-liberalisme di *Global South*. Secara khusus, kajian ini melihat bagaimana rejime ekstraktif di negara-negara kaya sumber daya alam di *Global South* bertransformasi di tengah menguatnya praktik nasionalisme sumberdaya, transisi energi dan perubahan iklim yang mendorong *mining rush* pada proses ekstraksi mineral kritis. Riset ini dikemukakan karena studi-studi negara pembangunan yang ada lebih banyak melihat bagaimana negara pembangunan di tengah *booming* sumberdaya alam di era neoliberal.

Meskipun banyak penelitian berfokus pada perdebatan saat ini mengenai dampak politik dan sosial-lingkungan dari transisi mineral dan energi penting di negara-negara Selatan, perdebatan konseptual yang kuat mengenai transformasi negara dengan mengeksplorasi praktik negara pembangunan – sebagai rezim ekstraktif –dalam konteks pasca-neoliberalisme belum sepenuhnya dieksplorasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan kunci berikut ini: “*Bagaimana kajian terkini mengeksplorasi transformasi negara pembangunan sebagai rejim ekstraktif di Global South dalam konteks perubahan yang sedang berlangsung?*”

Dengan menjadikan esktraktif rejim sebagai *baseline* dan melihat nasionalisme sumberdaya sebagai momen krusial, riset ini menemukan berbagai studi tentang negara pembangunan/rejim ekstraktif pasca neoliberal memberikan label yang berbeda. Pertama, developmentalisme baru. Label developmentalisme baru digunakan untuk menggambarkan adanya trend baru menguatnya intervensi negara dalam pembangunan yang menjadi praktik tanding atas gagasan neoliberalisme yang membatasi peran negara. Namun pada saat bersamaan pilihan strategi ekonomi negara bersifat heterodoks dan adaptif. Kedua, post neoliberalisme. Label ini menggambarkan seperangkat kebijakan baru yang lebih pragmatis sifatnya namun tidak sepenuhnya berbeda dengan neoliberalisme. Dengan beberapa kontradiksi dan ketegangan, langkah post-neoliberalisme berusaha untuk tidak mengadopsi kebijakan neoliberal yang khas namun tidak juga mencerminkan serangkaian kebijakan yang ketat atau rezim kebijakan yang jelas. Ketiga, pembangunanisme yang dirubah. Label ini mengidentifikasi adanya semangat untuk

tetap menjaga urgensi transformasi ekonomi dan pembangunan namun sedikit bergantung pada peran negara. Ideologi utama bagi bertumpu pada pembangunan meskipun tidak lagi menjadi ideologi tapi lebih merupakan instrumen dari kebijakan.

Berbagai literatur yang ada menggarisbawahi bahwa trend nasionalisme sumber daya masih berlanjut pada rejim ekstraktif, namun kini berjalan seiring dengan agenda global baru berupa eksploitasi mineral kritis untuk kebijakan industri ramah lingkungan. Negara menjadi agen penting dalam mendorong kebijakan industri yang menopang inisiatif rendah karbon melalui intervensi perilaku konsumen, pemberian insentif serta dukungan atas inovasi rendah karbon. Di tengah konteks geopolitik yang kini lebih multipolar, model kapitalisme negara menguat. Proses ini disertai dengan menguatnya model perencanaan terpusat yang berkelindan yang mimpi inovasi dan kebijakan industri yang konkrit.

Ruang Partisipatif Traditional Ecological Knowledge (TEK): Memahami Ulang Peran Keujreun Blang & Pemerintah dalam Pengelolaan Irigasi Sawah di Banda Aceh

Arga Pribadi Imawan

Sebagai wilayah pasca konflik, Aceh ikut terdampak dari adanya pendekatan negara yang cukup sentralistik dalam pengelolaan berbagai tata kelola pemerintahan. Tata kelola irigasi persawahan di Aceh selama ini menunjukkan adanya dominasi dan intervensi kuat dari pengetahuan pemerintah dalam skema pengelolaan melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Hakim & Mahmuddin, 2017; Nugroho, Carden, & Antlov, 2018; Kiawan, 2017). Qanun No 12 tahun 2017 misalnya, turut memberikan penekanan terhadap sempitnya ruang akomodasi pengetahuan tradisional dari lembaga adat di Aceh bernama *Keujreun Blang* dalam tata kelola irigasi.

Keujreun Blang yang merupakan aktor lembaga adat dan mengemban tugas untuk menjaga irigasi persawahan di wilayah desa di Aceh, justru tidak mendapatkan ruang akomodasi atas tata kelola irigasi sawah di Banda Aceh. *Keujruen Blang* seringkali terdiskriminasi oleh pendekatan negara yang sentralistik dalam pengelolaan irigasi. Sebagai contohnya adalah pengelolaan irigasi oleh P3A yang dijalankan sejak Orde Baru. Pengelolaan oleh P3A ini pada perjalanannya justru menghapus posisi *Keujruen Blang* sebagai lembaga adat yang berperan mengatur irigasi pertanian (Kiawan, 2017).

Dalam tujuannya untuk mengulas makna dan peran dari *Keujreun Blang*, penelitian ini menggunakan framework dari Joks & Law (2017) tentang *Traditional Ecological Knowledge* (TEK) yang dimana menjangkau dalam melihat bangunan pengetahuan saintifik dan tradisional dengan melihat pola-pola relasi sosial keseharian dari setiap aktor. Dengan mengambil studi kasus di Aceh Besar, penelitian ini bertujuan melihat konstruksi pengetahuan antara pemerintah dan Keujruen Blang dimana kategorisasi terbagi atas dua yaitu *Scientific Knowledge* (SK) dan *Traditional Ecological Knowledge* (TEK). Tujuannya adalah melihat ulang ruang bagi pengetahuan lokal dalam tata kelola kebijakan irigasi di Aceh.

Riset ini menemukan bahwa negosiasi antara pengetahuan tradisional dan saintifik tidak pernah berlangsung. Bukti atas pernyataan ini tercerminkan dengan makna dan peran *Keujreun Blang* yang tidak terdefiniskan dengan jelas di regulasi, utamanya Qanun. Justru sebaliknya, peran pemerintah dalam Qanun terdefiniskan lebih dominan dibandingkan dengan *Keujreun Blang*. Ketidakjelasan atas makna dan

peran *Keujreun Blang*, berdampak kepada pemaknaan ganda dalam tata kelola irigasi air. Konteks wilayah dan jumlah *Keujreun Blang* mempengaruhi terhadap pola hubungannya dengan pemerintah. Semakin banyak *Keujreun Blang*, maka pemerintah cenderung tidak melihat *Keujreun Blang* sebagai sosok yang memiliki daya tawar tinggi, pun sebaliknya.

*Value Chain of Cassava Production and Smallholder Household in
Register 44, Tulang Bawang Barat*

Devy Dhian Cahyati

Singkong menjadi salah satu komoditas pangan yang penting di tingkat global. Seiring dengan perkembangan teknologi, singkong dimanfaatkan untuk memproduksi tepung tapioka maupun makanan lain seperti mocaf dan keripik singkong. Studi ini akan menjelaskan tentang rantai komoditas singkong sebagai bahan pangan yang dihasilkan oleh berbagai daerah di Indonesia. Provinsi Lampung yang menjadi penghasil terbesar komoditas singkong memiliki keunikan tersendiri karena singkong yang dihasilkan berasal dari Kawasan hutan negara yang dikelola oleh transmigran. Penelitian ini akan mengeksplorasi value chain dari produksi singkong dan kontribusinya pada kesejahteraan petani yang merupakan kelompok transmigran. Lebih spesifik, studi ini menjelaskan asimetrisme kekuasaan di dalam rantai dan bagaimana negara berperan di dalamnya. Penelitian yang akan dilakukan di Register 44 Tulang Bawang Barat menarik untuk ditelisik lebih dalam mengingat status hutan negara yang melekat pada area perkebunan singkong. Studi ini ingin menjawab pertanyaan besar yaitu: Bagaimana value chain dari produksi singkong dan pengaruhnya kesejahteraan rumah tangga petani kecil? Studi ini berargumen bahwa value chain dari komoditas singkong yang ditanam di Kawasan hutan negara melibatkan interaksi berbagai aktor baik petani, broker, pemerintah maupun swasta. Studi ini melihat di tengah ketidakpastian tentang status tanah, rumah tangga petani kecil tetap mendapatkan nilai lebih dari produksi singkong dan memanfaatkan hasilnya untuk kegiatan ekonomi yang lain. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami value chain komoditas singkong yang ditanam di wilayah hutan negara.

Kawasan Register 44 merupakan Kawasan hutan negara yang kewenangannya berada di tangan Kementerian Kehutanan. Kawasan ini terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Way Kanan. Di Register 44 ini, PT Inhutani V berhasil mendapatkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pasca reformasi, register 44 tidak lagi hanya dikuasai oleh PT Inhutani V untuk menanam karet. Pada periode ini, banyak masyarakat yang tinggal di Provinsi Lampung mulai masuk ke areal hutan, termasuk ke Kawasan register 44. Motivasi para penduduk masuk ke areal hutan karena adanya desakan ekonomi, disamping dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Di awal, mereka membuat arang

kayu, menanam karet dan kelapa sawit, sebelum kemudian beralih ke singkong. Bukan tanpa alasan warga beralih menanam singkong. *Pertama*, perawatan singkong relatif lebih mudah. *Kedua*, masa panen singkong yang cepat berkisar antara 5 bulan sampai dengan 7 bulan. Ketiga, tersedianya pasar yang siap menerima singkong dari petani. Pasar komoditas singkong yang terus stabil di Lampung menghadirkan perusahaan dan lapak-lapak serta tengkulak yang selalu siap menampung hasil panen dari petani. Keberadaan perusahaan ini tidak terlepas dari peran PT Inhutani V yang memegang izin penggunaan hutan. Keuntungan yang didapatkan oleh warga yang mendiami Kawasan register membuat mereka lebih sejahtera dibandingkan di tempat asal mereka. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketimpangan dalam penguasaan lahan sehingga kondisi perekonomian antar warga pun bervariasi. Ketimpangan yang terjadi di Kawasan register pun menjadi persoalan tersendiri, selain mereka juga menghadapi persoalan atas ketidakpastian penguasaan tanah di Kawasan hutan negara.

Pengantar Ilmu Politik untuk Mahasiswa S1 Departemen Politik dan
Pemerintahan

Joash Tapiheru

Penelitian ini berfokus pada upaya untuk mencari jalan tengah antara orientasi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Politik, dan tuntutan pengembangan karir bagi mahasiswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi. Ada dua presuposisi sentral dalam penelitian ini, yaitu: (i) Ilmu Politik yang menjadikan 'kuasa' sebagai obyek utama kajiannya, memiliki cakrawala kajian yang lebih luas dari yang saat ini umumnya dipahami dan (ii) Orientasi pengembangan karir dalam Pendidikan tinggi, yang tertuang dalam skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mensyaratkan mahasiswa untuk menentukan pilihan karirnya sejak awal kuliah dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut (heutagogy). Penelitian ini melibatkan eksperimentasi dengan desain substansi perkuliahan dan desain delivery berdasarkan dua presuposisi tersebut sebagai asumsi dasarnya. Eksperimentasi yang dilakukan juga termasuk implementasi delivery desain pembelajaran yang dihasilkan dengan melibatkan 6 mahasiswa sebagai peneliti mitra. Sejumlah catatan didapatkan dari proses implementasi eksperimental tersebut. Dua catatan penting adalah: 1. Mahasiswa merasakan bahwa memilih rencana karir di awal perkuliahan seperti "dipaksa menjadi dewasa". 2. Pilihan karir ini perlu dikawal lebih lanjut, dengan pilihan antara "mengintegrasikannya dengan mata kuliah yang ada" atau melalui "mata kuliah Pengembangan karir yang menjadi mata kuliah ko-kurikuler".

Economic Geography dan Hutan Tujuan Khusus: Memahami Livelihood Masyarakat di
Desa Kawasan Hutan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

Mahesti Hasanah

Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana kondisi geografi suatu daerah mempengaruhi hubungan antara negara dan karakter perekonomian masyarakat di kawasan hutan. Kondisi geografis Indonesia yang beragam, termasuk hutannya yang luas, menjadi faktor menarik sekaligus penting dalam diskusi demokratisasi pemerintahan di level mikro. Studi tentang hubungan negara dan masyarakat didominasi oleh pendekatan demokrasi institusionalis dan terbatas pada dikotomi formal dan informal. Untuk mengisi gap dalam studi yang ada, penelitian ini berangkat dari perspektif masyarakat di desa kawasan hutan. Lebih khusus, studi ini ingin mengetahui relasi negara dan masyarakat yang memiliki kondisi geografis khusus, yakni Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini dilakukan di desa Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, atau salah satu desa yang berada di dalam KHDTK. Untuk menangkap kondisi khusus geografisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan *economic geography*, yakni sebuah pendekatan yang fokus melihat distribusi spasial kegiatan ekonomi dan dampak kegiatan ekonomi terhadap wilayah, lingkungan, dan masyarakat. Secara teoritis, pendekatan ini membantu kita untuk melihat bagaimana sistem ekonomi berfungsi dalam konteks geografis yang berbeda dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi perkembangan dan karakteristik sosial, budaya, dan politik suatu tempat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan tiga sumber data, yakni wawancara, observasi langsung dan data sekunder dari pemerintah dan studi lain yang berkaitan.

Sinergi Representasi Politik dengan Tautan Politik Perempuan Anggota
Parlemen Lokal dalam Mewujudkan Anggaran dan Kebijakan Sosial Sensitif Gender
(Penelitian terhadap Anggota Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2019 - 2024)

Dr. Ratnawati

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: “bagaimana sinergi representasi politik dengan tautan politik perempuan anggota parlemen lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2019 -2024 dalam mewujudkan anggaran dan kebijakan sosial sensitif gender?”

Sebagai acuan, penelitian ini menggunakan konsep tipologi representasi politik dari Pitkin. Menurutnya, tipologi tersebut satu sama lain saling terintegrasi, sehingga penelitian ini tidak melihat begitu saja yang dilakukan oleh para anggota parlemen perempuan sebagai representasi deskriptif. Secara deskriptif, kehadiran perempuan di parlemen memang mewakili perempuan, namun bisa jadi mereka tidak hanya bekerja untuk kelompok perempuan. Penelitian ini menempatkan representasi deskriptif sebagai label pensifatan untuk menunjukkan sejauh mana para anggota parlemen perempuan bekerja (apakah aktif, pasif, ataupun simbolik karena pada saat yang sama juga mewakili partai tertentu). Oleh karena itu, tipologi representasi politik dilihat dari 3 (tiga) model, yaitu representasi deskriptif-aktif, representasi deskriptif-pasif, dan representasi deskriptif-simbolik. Sedangkan untuk model political linkage menggunakan konsep dari Kitschelt (dengan modifikasi), dimana ada 3 (tiga) *political linkage* yaitu *pseudo-programmatic charismatic linkage* dan *clientelist linkage*.

Sementara itu, realisasi anggaran dan kebijakan sosial yang sensitif gender ini oleh anggota DPRD perempuan, dilihat dari pertama, bagaimana anggota parlemen perempuan memiliki komitmen politik terkait isu-isu gender, bagaimana memahami kehadirannya merepresentasikan kepentingan perempuan sekaligus kepentingan gender, memposisikan dirinya sebagai representasi dari kelompok organisasinya, orang-orang terdekatnya (tim pemenang) atau bahkan cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi (*self-interest*). Kedua, bagaimana orientasi penyusunan realisasi kebijakannya, apakah untuk kepentingan masyarakat banyak, atau apakah lebih memprioritaskan tim pemenangnya (atau orang-orang terdekatnya) serta daerah pemilihan di mana mereka dipilih, atau merealisasikan kepentingan elit-elit kharismatik yang mendukungnya, ataukah untuk kepentingan

dari mereka yang selama ini mendukung anggota parlemen perempuan secara material.

Atas dasar konsep-konsep tersebut, proposisi penelitian ini adalah “jika anggota DPRD perempuan mempunyai komitmen politik terkait isu-isu gender, memahami kehadiran mereka di parlemen untuk merepresentasikan kepentingan perempuan dan kepentingan gender serta orientasi atau target kebijakannya untuk kepentingan masyarakat banyak, maka anggaran dan kebijakan sosial yang sensitif gender akan terwujud”.

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa (1) realitas anggaran dan kebijakan sosial di DIY sampai saat ini masih timpang dan belum sensitif gender. Hal ini disebabkan karena anggota DPRD DIY belum berperspektif gender, adanya depolitisasi demokrasi dan reduksi makna demokrasi, serta adanya dominasi budaya patriarki; (2) model representasi politik anggota DPRD DIY perempuan beragam. Ada beberapa yang masuk dalam model representasi politik deskriptif-aktif (mempunyai perspektif gender dan mengawal anggaran dan kebijakan sosial). Tetapi di saat yang sama mereka ini masuk dalam model representasi politik deskriptif-simbolik (mempresentasikan ormas keagamaan tertentu). Dan ada juga yang masuk dalam model representasi politik deskriptif-pasif (tidak memiliki komitmen politik yang jelas dalam mengawal anggaran dan kebijakan sosial yang sensitif gender); (3) anggota DPRD DIY perempuan cenderung mempraktekkan political linkage pragmatik Hal ini disebabkan dalam menentukan program-program pembangunan prioritas, mereka lebih mengutamakan pada daerah pemilihan yang mendukung perolehan suara bagi keterpilihannya.

DISEMINASI HASIL PENELITIAN DOSEN SOSIOLOGI

Wacana dan Tantangan Isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Paska UU
TPKS

Dr. Phil. Desintha Dwi Asriani

This study discusses the challenges faced by Indonesian women activists, analyzing the practice of advocacy on sexual violence issues in local community, especially after Law of Anti Sexual Violence (LASV) is passed. The empirical data in this study was obtained from observation and interview with women activists working with the local community. The struggle initiated by women activist for the enactment of LASV implies the typical practice of feminist agency advocating gender sensibility in regulation. This study suggests the implementation of LASV will be challenging to deal with norms regulated through customary law in community. Community appears to believe that they already have systems in place to address the problem of sexual violence. However, the lack of gender perspective and the high social acceptance for cultures normalizing sexual violence drives injustice for the victims. Thus, the simultaneous approach is needed. The implementation process should cover the specific types of programs that rendezvous the concept of justice interpreted by community and criminal justice process focusing on victim's rights.

Youth and Spiritual Disruption: A Study of Indonesian Millennials Learning Buddhism during Religious Disaffiliation

Fuji Riang Prastowo

From the positive youth development perspective, Indonesian millennials are in a transitional phase to adulthood, vulnerable to identity crises. Pressures from social and cultural constructs present various challenges to their well-being during this transitional phase. This chapter explores the religious identity of millennials drawing upon several concepts from youth studies. In addition, this article is in the final editing and layout process as of 17 October 2023 as a Book Chapter published by ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore.

Many existing studies have highlighted the phenomenon of urban middle-class youth experiencing a quarter-life crisis, leading to spiritual disruption and “the death of God”. Secularization, atheism and agnosticism are widespread in the Western world, which prioritizes rationality (Bellour 2016; McGrath 2004; Williams-Oerberg 2021). The central questions in this study are: How do Indonesian millennials interpret the importance of their spiritual identity in the transitional phase? What causes them to experience religious disaffiliation and motivates their interest in learning Buddhism as an alternative to managing their mental health? Moreover, how do they negotiate their spiritual values and practices with their families and social environment?

Data was collected at Karangdjati Monastery in the student city of Yogyakarta from 2020 to 2023. The data collection method involved participatory observation of a purposive sample of 10 informants. A narrative model was used to analyze their life histories. In conclusion, this study is in line with several previous studies on youth and spirituality. The main finding was that the informants were interested in Buddhism because of its universal appeal and inclusive nature regardless of one’s faith, the absence of formal conversion orders, and its Ehipassiko principle of critical thinking. The middle path of Buddhism is to realize the Buddha’s teachings in the face of suffering.

Through this study, it was found that non-Buddhist millennials who studied Buddhism at Vihara Karangdjati in Yogyakarta interpret spiritual identity as a process of searching for meaning and purpose in their lives during their transition to adulthood. What motivated these millennials to study Buddhism was its rationalism, inclusiveness and focus on mental health, and, in some cases, their nostalgia for Indonesia’s ancient Hindu-Buddhist civilization. Critics of studies on millennials in

Indonesia often use moral lenses to judge the religious disaffiliation that the younger generations experience—that is, their resistance to the religious values passed down by their parents.

The main argument in this paper is that Indonesia's state power, which requires that every citizen should have a religion that should be stated on their ID card and that they should practise its teachings, causes a sense of exclusion for Indonesian millennials who practise religious teachings flexibly. To overcome the spiritual disruption they experience, some millennials negotiate their identity by converting or by reconstructing a hybrid identity as a process of self-discovery. Moreover, there are no conversion rules in Buddhism, so anyone can learn Buddhism without having to leave the religion of their birth.

Keadilan dalam Resolusi Konflik

Dr. Lambang Trijono

Konflik kekerasan terjadi di masyarakat perlu mendapatkan perhatian bagaimana mendapatkan resolusi konflik dan keadilan tercapai sedemikian rekonsiliasi berlangsung dan perdamaian dicapai di masyarakat. Sejauh ini konflik kekerasan telah terjadi baik secara kolektif maupun individual perlu mendapat penyelesaian. Mediasi dan penyelesaian konflik perlu dilakukan terutama dalam lembaga peradilan. Pencapaian keadilan dalam bekerjanya lembaga peradilan penting mendapat perhatian dan bagaimana rekonsiliasi dan transformasi berlangsung di masyarakat. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada konflik berlangsung di masyarakat dalam jenis dan intensitasnya dan bagaimana penyelesaian konflik berlangsung melalui lembaga peradilan. Bagaimana perwujudan keadilan dicapai dalam bekerjanya resolusi konflik dalam lembaga peradilan secara khusus mendapat perhatian. Demikian pula pencapaian keadilan dalam efektifitasnya secara imperatif dan atributif diberlakukan dan mendapat validitas normatif dan legitimasi serta menemukan jalan bagi rekonsiliasi dan transformasi berlangsung di masyarakat. Sejauh ini studi telah dilakukan terhadap jenis konflik, resolusi, rekonsiliasi, keadilan dan transformasi dalam konflik separasi dan komunal. Namun bagaimana pencapaian keadilan didapatkan dalam penyelesaian konflik masih kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pola dan karakteristik sebelum reformasi, pada awal reformasi, sesudah reformasi. Sebelum reformasi, konflik kekerasan pemerintah dan rakyat akibat pemerintahan dan pembangunan yang represif. Pada awal reformasi, konflik kekerasan separasi, komunal, benturan massa pergerakan politik. Sesudah reformasi sampai sekarang konflik kekerasan rutin dalam berbagai jenis konflik, protes kebijakan, konflik pertanahan, konflik sumberdaya, unjuk rasa, perkelahian geng, kekerasan domestik, kriminal dan masalah sosial endemik. Dalam penanganan terjadi pergeseran dari penanganan aparat pemerintah yang represif, inisiatif agensi pembangunan, aktivis masyarakat sipil, aparat keamanan telah mengalami reformasi, aparat penegakan hukum polisi dan kejaksaan, lembaga keadilan. Penelitian ini menemukan bahwa peradilan terhadap pelanggaran hukum berat dalam tindak kekerasan dalam konflik represi, separasi, komunal dilakukan melalui peradilan HAM, peradilan ham permanen, peradilan HAM ad.hoc. Konflik agraria mendapat penanganan cukup aktif meski masih sangat kurang mengingat banyaknya konflik agraria terjadi. Peradilan sengketa agraria dilakukan melalui investigasi, pendampingan dan proses peradilan. Sesudah melalui proses peradilan, rekonsiliasi

dan transformasi dilakukan di masyarakat dalam prakarsa mandiri dan peran pemerintah dan masyarakat dalam kolaborasi melakukan rekonsiliasi dan transformasi.

The Birth of Teachers: Women Being and Becoming Early Childhood Education Teachers during ECE Expansion Period in Indonesia

Yulida Pangastuti

What makes a teacher?

The development of ECE in Indonesia, albeit relatively brief, has been supported by the contributions of female educators who emerged alongside the government's efforts in ECE-isation. Due to the pressures of expansion, many of these women are recruited and employed as educators, with various limitations regarding educational qualifications, relevant teaching experience, and training opportunities. This phenomenon has resulted in ambiguous tensions between prioritizing formal qualifications for the teaching profession, the ambition to rapidly expand ECE coverage, and the recognition from the community. These tensions are recorded, stored, and documented through the actions and strategies employed by women teachers' embodiment.

This research positions the educational process as an active bodily process, transcending professional boundaries (such as classrooms, the education sector, divisions among educators, and employment; Bandelow, 1998), which in this case undertaken by women recruited as ECE teachers in the 2000s.

This research aims to provide a comprehensive examination of the formation of roles and identities among Early Childhood Education (ECE) teachers in Indonesia, incorporating embodiment as a vital methodological and theoretical element. Going beyond the lens of professional competencies and policy-defined vocations, the study explores the positioning and interpretations of female ECE educators within the broader social, historical, political, and economic contexts. By integrating an embodied perspective, the research acknowledges the significance of bodily experiences, practices, and interactions in shaping teachers' identities. This approach recognizes embodiment as a crucial element in understanding the multifaceted dimensions of teachers' professional development and self-perception within the Indonesia's ECE landscape.

DISEMINASI HASIL PENELITIAN PUSAT KAJIAN

From Vulnerability to Resilience: Enhancing Women and Children's Well-Being

ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada

Women and children in ASEAN are exposed to various problems, such as human trafficking, gender-based violence, and child labor (ASEAN, 2022). Human trafficking is a major problem in the ASEAN region, with women and children, particularly vulnerable. Gender-based violence is another issue that disproportionately affects women in ASEAN. Domestic violence, sexual assault, and harassment are common problems, and many cases go unreported due to cultural stigma and fear of retaliation. Legal protection and support services for victims of violence Lack of access exacerbates the problem and keeps women and children from adequate compensation and protection.

Although the fields of violence against children (VAC) and violence against women (VAW) have historically developed separately, the international community is committed to addressing shared risk factors, common underlying social norms, and intergenerational effects. These diverse and complex relationships indicate greater collaboration between those working on VAC and VAW policies and programs. Evidence of overlapping drivers, risk factors, and consequences of VAW and VAC has accumulated in recent years (UNICEF, 2021). However, knowledge of how policies, programs, and services should address these overlaps is still preliminary. Important questions remain about strengthening collaborative approaches to combat VAC and VAW.

To enhance women's and children's resilience, addressing their vulnerability's root causes and empowering them with the tools and resources necessary to overcome adversity. Enhancing the resilience of women and children requires a multifaceted approach to promote empowerment and equality.

Masa Depan Adopsi *Edtech* dan Pendidikan *Hybrid* di Indonesia Pasca-Pandemi

Kuskridho Ambardi, Amelinda Pandu Kusumaningtyas, Zita Wahyu Larasati, M. Perdana Sasmita-Jati Karim, Ruth Tarullyna Simanjuntak, Sri Handayani Nasution, Anisa Pratita Kirana Mantovani, Dewa Ayu Diah Angendari, Jasmine Noor Andretha Putri, Janitra Haryanto

Center for Digital Society dan Google for Education Indonesia berkolaborasi terkait pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Selama setahun terakhir, peneliti dari CfDS telah melakukan riset di enam provinsi di Indonesia untuk memahami pemanfaatan teknologi dalam pendidikan serta memetakan keberlanjutan penggunaan teknologi pendidikan pasca pandemi Covid-19, dengan judul penelitian “Masa Depan Pendidikan Hybrid di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Memetakan kebutuhan, kesadaran, dan pemahaman (termasuk keterampilan digital) para pelaku di bidang pendidikan tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi dalam hybrid;
- Memahami dampak teknologi dalam pembelajaran hybrid;
- Memahami potensi teknologi dalam pendidikan di era pasca pandemi.

Riset Indeks Kualitas Perencanaan 2022 dan 2023: Menakar Dinamika Pembangunan Kota Balikpapan

Satyabhakti Bela Nagari, S.I.P., M.Ec.Dev. dan Saffanatul Afifah, S.I.P.

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya yang sistematis dan kontinu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pencapaian tujuan harus mempertimbangkan kondisi masa lalu dan sumber daya yang tersedia. Upaya-upaya yang saling berkaitan satu sama lain dan terus-menerus juga harus dilakukan agar tercipta konsistensi, keselarasan, dan keterkaitan antara apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan maupun apa yang ingin dicapai dengan bagaimana mencapainya. Untuk menyikapi hal tersebut, maka proses perencanaan pembangunan daerah tidak bisa hanya menggunakan satu pendekatan saja, melainkan harus menggunakan berbagai pendekatan karena aktivitas merencanakan merupakan aktivitas yang kompleks dan melibatkan banyak *stakeholders*. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyikapinya dengan merumuskan proses perencanaan pembangunan dari berbagai pendekatan, seperti politik, teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom up. Kelima pendekatan tersebut kemudian disempurnakan dalam Permendagri No. 86 tahun 2017 melalui pendekatan substantif yaitu pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial. Kerangka konseptual dan kebijakan pemerintah ini dijadikan dasar untuk merumuskan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) yang selanjutnya digunakan untuk menilai kualitas perencanaan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 dan 2023.

Isi

Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) disusun untuk mengukur kualitas perencanaan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi perencanaan pembangunan yaitu mulai dari proses perumusan, substansi yang terdapat di dalam muatan dokumen perencanaan, hingga jaminan tindak lanjut dari dokumen perencanaan. Pada proses perhitungannya penilaian IKP dibagi ke dalam beberapa tahapan yaitu penentuan dimensi dan sub dimensi perencanaan, penentuan bobot dari setiap dimensi dan sub dimensi perencanaan, penyusunan instrumen penilaian, pengumpulan data, dan pengolahan data. Penentuan dimensi dan sub dimensi IKP didasarkan pada teori, konsep, dan praktik perencanaan pembangunan sehingga ditetapkan 3 dimensi perencanaan. Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi proses, isi, dan jaminan tindak lanjut yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa sub

dimensi yang menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penilaian IKP. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri dari kuesioner yang disebarakan kepada sejumlah responden dan formulir penilaian yang diisi oleh tim ahli perencanaan.

Metode perhitungan IKP mengkombinasikan metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk mendapatkan hasil yang komprehensif. Metode yang digunakan dalam kajian IKP di antaranya yaitu metode Slovin's yang digunakan untuk menghitung jumlah responden kuesioner, *Analytical Hierarchy Process (AHP)* digunakan untuk menentukan bobot dari setiap dimensi dan sub dimensi terhadap nilai IKP, uji reliabilitas dan validitas untuk memastikan kuesioner dapat digunakan, serta teknik Delphi untuk menentukan nilai pada setiap instrumen penilaian dalam formulir penilaian.

Perhitungan IKP dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai terbobot dari setiap sub dimensi dan instrumen penilaian. Hasil penilaian IKP Kota Balikpapan pada tahun 2022 mencapai 7,23 dan 7,44 pada tahun 2023 sehingga dapat dikategorikan “cukup”. Meskipun masuk dalam kategori “cukup”, selisih nilai sebesar 0,21 poin menunjukkan adanya korelasi dari penilaian IKP di tahun sebelumnya dengan peningkatan kualitas perencanaan Kota Balikpapan. Peningkatan nilai IKP di Kota Balikpapan didongkrak oleh beberapa subdimensi yang mengalami kenaikan secara signifikan, namun peningkatan hasil IKP di tahun 2023 juga bergantung pada tindak lanjut pemerintah Kota Balikpapan terhadap rekomendasi IKP karena adanya penurunan beberapa nilai subdimensi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa korelasi antara penilaian IKP Kota Balikpapan tetap memerlukan tindak lanjut maupun perbaikan dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk dapat mengalami peningkatan.

Penutup

IKP di Kota Balikpapan dirancang secara komprehensif, mulai dari proses hingga substansi, dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Nilai IKP Kota Balikpapan masuk ke dalam kategori “cukup” yang mengindikasikan bahwa terdapat korelasi antara penilaian IKP pada tahun sebelumnya dengan peningkatan yang terjadi di tahun 2023. Proses perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan sudah cukup memadai karena telah disusun berdasarkan prosedur, namun belum cukup berkontribusi dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, secara sistem belum cukup diandalkan baik dari sisi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, sehingga adanya penilaian IKP membantu dalam proses perbaikan dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kota Balikpapan.

Tanah yang Rumit: Papua, Konflik, dan Kemungkinan Solusi

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., Daud Arie Ristiyono, S.I.P., Reza Fajar Raynaldi, S.I.P.

Konflik Papua yang telah berlangsung sejak tahun 1969 adalah salah satu yang terlama dalam sejarah manusia modern. Sebagai sumber utama ketidakstabilan politik, konflik yang disertai kekerasan merupakan penghambat besar bagi kemajuan suatu bangsa. Kasus Papua memiliki implikasi yang signifikan bagi peminggiran kemanusiaan, mulai dari banyaknya pengungsi domestik, kelaparan, tutupnya sekolah dan fasilitas kesehatan, hingga lumpuhnya aktivitas pemerintahan. Ada sejumlah inisiatif pembangunan yang dilakukan pemerintah, termasuk otonomi khusus, pemekaran, dan infrastruktur. Namun, konflik di Papua terus terjadi dan semakin berkembang. Ini menunjukkan konflik Papua memiliki beragam motif dan derajat kompleksitas yang tinggi. Akibatnya, banyak korban jiwa baik Orang Asli Papua (OAP) maupun pendatang yang membuat perdamaian yang sulit terwujud. Hal ini seolah menunjukkan bahwa pembangunan dan perdamaian merupakan dua realitas yang tak saling menyapa. Dengan kata lain, pembangunan yang kini gencar dilakukan belum mampu menjadi solusi. Berbagai ikhtiar selama ini dinilai juga tak mampu menyentuh masalah konkret Papua. Melalui kasus Papua, studi ini menyoroti konflik yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai faktor historis, politik, dan sosiokultural. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan didukung oleh sejumlah data resmi. Temuan menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas memiliki korelasi yang signifikan dalam mempengaruhi bagaimana konflik terbentuk. Selain itu, perlu adanya terobosan kebijakan yang mampu menyentuh persoalan konkret Papua.

Energy-Extractive Nexus

A Research Project of PolGov 2023
Part of Citizen Participation in Resource Governance and Sustainable
Transition (SUSTAIN) Program

This study aims to investigate how identities, narratives, symbols, and practices are mobilized and exploited in the process of gaining local control over valuable natural resources and their revenues. It delves deeper into the need to examine how 'local demands' are conceptualized within participatory frameworks and to explore the role that affected populations play in resisting and shaping transnational extractive policies and practices.

Three key aspects are taken into consideration. Firstly, the research question arises from the inherent conflict between the bottom-up, community-led participatory mechanism for decision-making in extractive governance and the official techno-regulatory and corporate schemes for citizen engagement (Kurniawan et al., 2022). Secondly, the future net-zero emission economy requires the massive deployment of renewable energy and clean electrification, which will necessitate a wide range of raw (strategic) materials for renewable energy, such as nickel, cobalt, lithium, copper, graphite, and rare earth (Energy Transitions Commission, 2023). Thirdly, energy is becoming a material that is mutable and contingent. Energy is the largest globally traded commodity and the meta-resource that drives all other commodity chains and the provision of most essential goods and services (van Veelen & van der Horst, 2018). This makes it an appealing arena for states, corporations, and other powerful entities to insert themselves into the daily lives of today's citizens, as well as those in the future (Balmaceda et al., 2019).

This study employs citizen engagement as a framework to examine the changing relationship between citizens and the state, incorporating a cross-scalar notion of power and relationality in the energy transition era. This framework aims to expand conventional spatial metrics of space to include elements such as (i) global political initiatives influencing local participation in sustainable development, such as initiatives for environmental and social governance (ESG), transparency in extractive sector management (EITI), and initiatives for responsible mining assurance (IRMA); (ii) the complexity of the global economy and its relations to local societal development in regions with valuable natural resources. It is emphasized that citizen engagement in the energy transition also serves as an effort to shape an imaginary concept of 'energy democracy,' influencing not only citizens' attitudes but also

envisioning new roles and modes of citizenship across nation-state boundaries as part of the emerging complex interconnections within globalization (van Veelen & van der Horst, 2018). Furthermore, it is also an effort to promote 'energy justice,' encompassing three dimensions: popular sovereignty, participatory governance, and civic ownership (Szulecki, 2018).

In summary, using citizen engagement, this study examined the materiality of energy and the discursive struggles over access, control, and the meanings of resources, resource revenues, spaces, and landscapes, and how these relate to the formation of 'agency' through the construction of citizenship. To explore the complex relationship between citizens and the state, the research conducted a series of fieldwork studies on the case of nickel decision chains, covering the three nickel-producing areas in Sulawesi (Kolaka, Morowali, and Sorowako), and the nickel policy process in Jakarta during October 2023. We interviewed 75 relevant resource persons representing various stakeholder backgrounds, including government, companies, communities, civil society, and academia.

HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S-3

Konten Budaya Jawa dan Konstruksi Identitas Masyarakat Transmigran: Studi pada
Transmigran Jawa di Lampung

Dhanik Sulistyarini
Departemen Ilmu Komunikasi

Media dan teknologi menjadi salah satu cara masyarakat diaspora dapat terhubung dengan tempat asal dan budayanya. Peran media dan teknologi dalam konstruksi identitas budaya juga dapat terjadi pada masyarakat transmigrasi. Lampung merupakan daerah tujuan transmigrasi utama pada masa kolonisasi hingga masa kemerdekaan, baik transmigrasi dengan program pemerintah maupun transmigrasi spontan. Saat ini, etnis Jawa merupakan etnis terbesar di Lampung dengan komposisi sebesar 64,06%, bahkan jauh lebih besar dari masyarakat etnis Lampung sebesar 13,56% (Sensus Penduduk Provinsi Lampung, 2010). Komposisi penduduk di Lampung yang didominasi etnis Jawa menyebabkan media di Lampung pun menampilkan berbagai konten budaya Jawa. Oleh karena itu penting untuk diteliti bagaimana peran konten budaya Jawa dalam konstruksi identitas budaya pada masyarakat diaspora transmigran Jawa di Lampung.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana peran konten budaya Jawa dalam konstruksi identitas budaya masyarakat transmigran Jawa di Lampung? Pertanyaan tersebut akan dirinci ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu (RQ1) Bagaimana media di Lampung menampilkan konten budaya Jawa? (RQ2) Media apa yang dikonsumsi oleh para keturunan transmigran Jawa di Lampung? (RQ3) Bagaimana konten budaya Jawa di media berperan dalam konstruksi identitas budaya para transmigran Jawa di Lampung?

Kajian literatur yang dilakukan menunjukkan bahwa media sangat berperan pada masyarakat diaspora internasional, sedangkan kajian tentang media pada masyarakat diaspora dalam suatu negara belum banyak dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji peran media pada konstruksi identitas budaya masyarakat diaspora transmigran Jawa di Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode etnografi. Peneliti melakukan observasi partisipatif pada masyarakat keturunan transmigran Jawa di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap 8 orang informan keturunan transmigran Jawa dan 3 orang pengelola media lokal di Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Berdasarkan hasil observasi terhadap media lokal di Pringsewu, media radio merupakan media yang banyak menampilkan konten budaya Jawa. Konten budaya

yang paling populer adalah acara lagu-lagu Jawa (campursari). Setiap radio lokal memiliki program acara campursari.

Para informan para keturunan transmigran Jawa pada umumnya mengonsumsi media yang berisi konten budaya Jawa. Media yang dikonsumsi cukup bervariasi, baik media tradisional maupun media baru. Namun terdapat perbedaan pola konsumsi media di antara informan generasi ketiga dan kelima, dari pilihan media dan konten yang dikonsumsi. Para informan yang berusia lanjut pada umumnya mengonsumsi media tradisional seperti media cetak, radio, televisi, dan media baru seperti Youtube, namun media tradisional lebih mendominasi. Terdapat 2 informan yang melanggan majalah berbahasa Jawa *Panjebar Semangat* selama lebih dari 40 tahun. Di sisi lain, informan remaja lebih banyak mengonsumsi media baru seperti Youtube dan TikTok yang dianggap lebih menarik daripada media tradisional.

Dari aspek konten, generasi yang lebih tua pada umumnya mengonsumsi konten berupa kesenian tradisional seperti wayang kulit, lagu-lagu berbahasa Jawa (campursari), dan kesenian tradisional lainnya. Sementara generasi muda mengonsumsi konten yang mengandung budaya Jawa namun dalam versi yang lebih modern, misalnya konten lucu berbahasa Jawa atau kisah-kisah masa lalu tentang Jawa.

Media yang dikonsumsi oleh para transmigran Jawa membantu para transmigran Jawa untuk menjaga identitas kejawaannya. Konten budaya Jawa yang dikonsumsi memperkuat rasa kejawaan dan memberikan kebanggaan, bahwa budaya Jawa dilestarikan melalui media. Bahasa Jawa yang digunakan dalam konten di media menjadi daya tarik utama bagi para informan.

Destabilizing Knowledge Assemblage: Dinamika Teknologi, Sains, dan Sosial dalam Pengembangan Thorium untuk Energi Nuklir di Indonesia

Eko Bagus Sholihin
Departemen Politik dan Pemerintahan

Studi ini tentang *knowledge assemblage* yang menganalisis relasi sains dan politik di arena publik. Dengan menganalisis debat keterbuktian sains dan teknologi 'thorium untuk energi nuklir' di arena publik, studi ini mengajukan proposisi bahwa betapapun sains terbukti kuat di ranah akademik, ia selalu diuji di arena publik karena berhadapan dengan bias objektif, variasi background sosial, dan afiliasi politis dari publik atas tema tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, studi ini meminjam studi kasus perdebatan sains dan teknologi terkait rencana pembangun PLTN Thorium di Bangka Belitung, yang dimulai sejak tahun 2013.

Meskipun kajian sejenis telah banyak dilakukan dalam literatur STS (*science and technology studies*), kebaruan studi ini adalah memahami sains dan teknologi sebagai kerja *assemblage*. Melalui *assemblage*, sains dan teknologi dipahami sebagai kumpulan dari entitas-entitas *human* dan *non-human* yang interdisipliner dan heterogen. Entitas *human* antara lain: pemerintah, lembaga tekno-sains (BATAN dan BAPETEN), investor (PT. ThorCon), ahli teknik nuklir, *local experts*, aktivis anti nuklir, dan penduduk lokal. Sedangkan entitas *non-human* antara lain: bidang-bidang sains dan sosial, lokasi tapak, material thorium, teknologi reaktor, imajinasi bahaya nuklir, dan pengetahuan tradisional. Entitas *human* dan *non-human* tersebut kemudian berinteraksi secara kompleks, terus menerus, tidak terstruktur, dan tumpang tindih.

Artikel ini menemukan bahwa PLTN Thorium adalah *reassembling knowledge* untuk mengembalikan kepercayaan publik atas energi nuklir pasca tragedi Fukushima. Kemudian, kerja-kerja tersebut dilakukan dengan melakukan *making of knowledge assemblage*. Secara teknis, kerja *knowledge assemblage* thorium berlangsung di dalam lima tema interdisipliner namun spesifik: teknologi pemurnian thorium; PLTN Thorium lebih murah, aman, dan efisien; anti proliferasi nuklir; penanganan limbah; dan kemandirian energi.

Di arena publik, tema-tema di atas didesiminasikan melalui berbagai forum, secara digital melalui media sosial dan channel youtube, forum-forum energi di tingkat nasional, serta diseminasi di Bangka Belitung dengan bekerja sama dengan *local experts* di Universitas Bangka Belitung dan Pemprov Bangka Belitung. Di samping itu, ThorCon juga memfasilitasi pembentukan Indonesia Nuclear Youth Society (INYS) di Bangka Belitung dan menyelenggarakan berbagai kegiatan

sosialisasi ke universitas dan sekolah-sekolah serta menyelenggarakan berbagai perlombaan yang melibatkan mahasiswa dan pelajar. Sayangnya, diseminasi kurang menyentuh masyarakat bawah dan tak terdidik, termasuk penduduk di Desa Beriga (desa terdekat dengan lokasi tapak).

Hasil dari kerja *assemblage* di atas tidak pernah final dan selalu mendapat destabilisasi dalam bentuk resistensi, evaluasi, dan revisi. Meskipun demikian, destabilisasi tidak menghasilkan relasi yang antagonistik. Ia mengubah bagian kecil (merevisi, mengurangi, atau menambah substansi) dan tidak menghentikan kerja keseluruhan *assemblage*. Temuan saya menunjukkan terdapat tiga bentuk destabilisasi. Pertama, perlawanan dari *local experts* dan aktivis anti nuklir lokal. Kedua, perlawanan melalui pengetahuan tradisional ‘taber laut’ oleh penduduk asli Desa Beriga. Ketiga, evaluasi dari pemerintah melalui kewajiban ‘uji coba’. Dua destabilisasi pertama menyangkut ‘lokasi tapak’ dan kedua menyangkut sains dalam kebijakan.

Pada akhirnya, studi ini berusaha menjembatani *the social* dan *the technical* dengan menolak depolitisasi *the technical* sekaligus menjaga sains dan teknologi agar tetap ‘politis’, karena ia merupakan kunci penting untuk mempertahankan demokrasi dan kebijakan berbasis sains.

Manajemen Media Sosial Pemerintah Daerah dalam Menciptakan *High Quality Engagement*; Studi Kasus pada Instagram dan Twitter (X) Pemerintah Kota Bandung, Indonesia

Nur Atnan
Departemen Ilmu Komunikasi

Di era transformasi digital, pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam membangun interaksi yang bermakna dengan publik. Manajemen media sosial yang efektif di lingkungan pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam membentuk *high quality engagement*. Studi ini mengangkat kasus Pemerintah Kota Bandung karena Pemerintah Kota Bandung sudah lebih dari 10 tahun menggunakan media sosial khususnya Instagram dan Twitter (X), namun manajemen media sosial yang diterapkan belum dapat menciptakan *high quality engagement*. Rendahnya *engagement* pada media sosial Pemerintah Kota Bandung menunjukkan bahwa ada persoalan pada manajemen media sosial-nya. Oleh karena itu, studi ini menganalisis mengapa manajemen media sosial yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bandung belum dapat menciptakan *high quality engagement*.

Dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis konten kuantitatif, studi ini menemukan bahwa *engagement* publik pada Instagram dan Twitter (X) Pemkot masih sangat rendah. Rata-rata skor *engagement*-nya adalah 21,2% untuk Instagram dan 0,03% untuk Twitter (X). Kondisi rendahnya *engagement* pada Instagram dan Twitter Pemkot Bandung terlihat jelas dari indikator *like*, *comment*, *share*, dan *create content*. Dari empat indikator, *share* yang memiliki skor paling rendah, yakni 0,1% untuk Instagram dan 0,04% untuk Twitter (X). Studi ini juga menunjukkan bahwa manajemen media sosial Pemerintah Kota Bandung belum efektif menciptakan *high quality engagement*. Tim belum mampu mengoptimalkan kegiatan perencanaan untuk membuat konten yang kreatif dan sesuai kebutuhan warga. Interaksi dan respon atas komentar publik masih belum konsisten dan kegiatan evaluasi belum optimal digunakan untuk improvisasi perbaikan strategi manajemen.

Tiga faktor, yang menyebabkan manajemen media sosial yang sudah dijalankan oleh Pemkot Bandung belum mampu menciptakan *high quality engagement*. Pertama, Konten yang disajikan sepanjang tahun 2022, baik pada Instagram maupun Twitter (X) belum mengikuti dan sejalan dengan kebutuhan atau keinginan publik. Publik membutuhkan konten yang santai, menghibur, dan ringan, sedangkan pengelola menyajikan konten yang serius. Kedua, Tim Pengelola Media

Sosial belum konsisten menanggapi setiap respon publik di media sosial. Dari sebanyak 1.932 pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh publik di Instagram, hanya 13,4% yang direspon. Demikian halnya yang terjadi pada Twitter (X), yakni dari 891 pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan, hanya 11,9% yang direspon. Ketiga, aktivitas evaluasi sudah dilakukan, namun temuan-temuan yang diperoleh belum ditindaklanjuti dengan baik. Selama ini, hasil evaluasi hanya digunakan untuk melihat capaian atau dampak dari konten yang sudah diposting, namun tidak dilakukan analisis kualitatif mengapa capaiannya seperti itu.

HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S-2

Survei Nasional Melalui Nasional Melalui Tayangan Iklan Facebook dan Instagram dalam Evaluasi *Citizen-Satisfaction* terhadap Kualitas Layanan *Telemedicine* di Indonesia

Aliya Oknawati
Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik

Proses transformasi digital di sektor publik terus berkembang sejalan dengan upaya pemerintah memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Terhitung sejak terjadinya pergeseran pola responsivitas birokrasi publik, peran masyarakat kini bergeser. Dari hanya bertindak sebagai pelanggan atau pembeli, konsep *new public service* menempatkan masyarakat sebagai warga negara, “*serve citizens, not customers*” (Denhardt dan Denhardt, 2003). Dengan demikian, penting untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintahan hari ini.

Telemedicine, produk digital sektor kesehatan, berpotensi untuk mentransformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Meskipun sudah banyak klaim atas kemudahan untuk mendapat akses kesehatan digital, sayangnya masih sulit ditemukan penelitian ilmiah berbasis pedoman klinis yang menunjukkan bahwa layanan *telemedicine* sudah memenuhi kepuasan masyarakat berdasarkan indikator kualitas pelayanan kesehatan.

Di tengah perkembangan teknologi *telemedicine*, penelitian ini kemudian menempatkan posisinya yang berfokus pada evaluasi *citizen-satisfaction* terhadap layanan *telemedicine* sebagai wujud transformasi sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan *telemedicine* di Indonesia dengan menerapkan metode survei nasional. Penilaian diukur menggunakan indikator sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh OECD (2006). *Health Care Quality Index* berisi 7 poin yang relevan dan kontekstual untuk diaplikasikan pada evaluasi kinerja *telemedicine*, diantaranya: efektivitas layanan, keamanan data dan privasi pasien, responsivitas pemberi layanan, aksesibilitas layanan, beban biaya diluar tarif utama layanan, kondisi psikologis pasien, dan tarif keseluruhan layanan.

Dari 1.165 responden, ditemukan bahwa secara umum kualitas layanan *telemedicine* dinilai “sukses” dengan nilai rerata kepuasan responden sebesar 89%. Dari tujuh indikator penilaian, aspek keamanan data dan privasi pasien dinilai “gagal” karena persentase kepuasan responden masih dibawah *threshold* (58,30%). Kemudian, penelitian ini merangkum tiga pembahasan penting.

Pertama, ketimpangan pembangunan infrastruktur ICT di negara berkembang seperti Indonesia menjadi akar dari kesenjangan digital di daerah pedesaan-perkotaan dan Indonesia bagian barat-timur. Tantangan kesenjangan digital tidak hanya terbatas pada ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada literasi digital masyarakat yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya *engagement* masyarakat pada layanan publik digital. Kedua, kekosongan regulasi atau peraturan khusus yang ditujukan untuk menjaga privasi data pasien berdampak pada sikap skeptisisme pengguna atau pasien layanan telemedicine terhadap peran negara dalam menegakkan hukum. Tidak adanya ketentuan hukum yang komprehensif untuk mengatur perlindungan privasi data pribadi meningkatkan kemungkinan pelanggaran terhadap hak konstitusional individu, eksploitasi data pribadi secara ilegal. Selain itu, konsekuensi negatif yang signifikan adalah lunturnya potensi Indonesia untuk merajai pasar kesehatan global dalam kategori perawatan kesehatan pasien yang hemat biaya (telemedicine). Terakhir, tayangan iklan facebook dan Instagram dapat dijadikan alternatif dalam mengumpulkan *feedback* organik dari masyarakat.

Sebagaimana sudah disampaikan Mergel et al. (2018) bahwa tujuan dari transformasi digital adalah untuk mendesain ulang dan merekayasa ulang layanan pemerintah dari bawah ke atas (*bottom-up approach*) demi memenuhi perubahan kebutuhan pengguna, maka siklus FAL menjadi elemen esensial untuk diterapkan dalam pengembangan ekosistem *telemedicine* yang berkelanjutan. Tim pengembangan layanan digital dituntut untuk menitikberatkan sisi inklusivitas terhadap kebutuhan pengguna ke dalam proses desain layanan untuk memberikan *public values* (Sanders & Stappers, 2008).

Digital Feminist Activism Networks in the Arena of Patriarchal Capitalism

Ambar Alimatur Rosyidah
Communication Sciences

Introduction

Social media has become a space for feminist activism to bring feminist issues through their artwork with its nature that crosses space and time and its accessibility (Hanson, 2020; Mouffe, 2007). The term 'activism' or artistic activism has two components: art and activism, which move in different domains but are related in forming 'affective affect' or 'æffect' (Duncombe, 2016). Under two interrelated systems, patriarchy and capitalism, women's work in activism is in vulnerable positions. Internet libertarian culture allowed women to voice their interests in the capitalist system; however, patriarchy has a mutually beneficial relationship with the capitalist system to maintain the continued existence of both (Bruneau, 2023).

Prior research on activism has been widely conducted (Rodal et al., 2019; Sanz & Rodriguez-Labajos, 2021; Thejaswini & Haneef, 2020; Wang & Liu, 2020), but the connection between feminist activism and the arena of patriarchal capitalism has not yet been carried out. Meanwhile, Azizi (2020) only explains the landscape of the feminist movement but does not use the concept of activism. From the previous research, we aim to explore the landscape of the digital feminist activism network in patriarchal capitalism in the case of the women's arts community. This research is qualitative research with a constructivist paradigm and multiple-case study research design in the Arts for Women and Puan Seni Indonesia communities.

Body

We identified three main themes that surfaced: actors in the digital activism network, feminist activism in patriarchal capitalism, and building networks as a form of feminist activism resistance. Feminist activism networks are inseparable from human and non-human actors. To form a large-scale connective action, feminist activism, with various issues raised by the artist, needs a connective leader who is the community's founder. The digital feminist activism networks exist in patriarchal capitalism, which is male-dominated, the problems in capital for communities's sustainability, and the masculine social media infrastructure. Popularity logic in social media plays a crucial part, from helping the proliferation of feminist ideas to facing cyber crime and features related to the process of capital accumulation.

The communities building network is a form of feminist activism resistance. Communities try to negotiate aspects of access and connectivity within the network. With the existence of the networks, women activists earned the chance to labor and gain visibility. Networking relies on individual action because social media personalization cannot be separated from the sharing feature related to a culture of participation that changes the dynamics of feminist activism.

Conclusion

Community resistance against patriarchal capitalism is by forming a network, which is the core of social capital, according to Lin (2017). Three main categories of connective action are seen in the two communities: artists do not have to commit to the community, display personal expressions rather than groups, and communication networks are the primary way of organizing the feminist art movement (Kristanto et al., 2021; Bennet and Segerberg, 2013).

Perempuan Pekerja Catur Varna; Negosiasi dan Resistensi sehari hari dalam Kegiatan Ritual Adat Keagamaan di Bali

Bandiyah

Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan

Disertasi ini mengambil judul “*Perempuan Pekerja Catur Varna; Negosiasi dan Resistensi sehari hari dalam Kegiatan Ritual Adat Keagamaan di Bali*”. Perempuan Hindu Bali memiliki peran penting dalam mempersiapkan sarana upacara adat keagamaan mulai dari *mejejahitan* yaitu membuat alat pelengkap *sesajen* dari daun janur hingga *metanding* yakni mengatur rangkaian kegiatan upacara adat keagamaan sampai selesai (Ayu Kartika, 2021: 196). Walby (1989) menilai pekerjaan sosial tidak berbayar sebagai bentuk kerja patriarki dalam mengeksploitasi perempuan. Kegiatan upacara adat keagamaan di Bali yang dilakukan setiap hari membuat perempuan pekerja melakukan reflektivitas terhadap tradisi yang mereka jalani dengan memaknai dan menegosiasikan kembali peranannya di ranah sosial adat, namun demikian mereka tetap mematuhi aturan dan tradisi adat yang sudah sedemikian ajeg. Studi ini mengeksplorasi pertama, bagaimana perempuan yang bekerja dalam *Catur Varna* memaknai bekerja dan peran di sosial adat. Kedua, sejauhmana tingkat agensi dan resistensi yang diorganisasikan perempuan pekerja *Catur Varna* dalam kegiatan ritual adat keagamaan membentuk kepatuhan diri. Ketiga sejauhmana kepatuhan yang diorganisasikan oleh perempuan pekerja *Catur Varna* dapat menguatkan atau melemahkan dominasi patriarki adat Bali. Penelitian ini menggunakan frame teoritik Saba Mahmood (2005) dengan metode etnografi feminisme. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menjelaskan pertama, perempuan Hindu Bali yang bekerja dalam *Catur Varna* baik *Brahmana Varna* (Guru, dosen, peneliti, seniman yang menjadi pemimpin agama), *Kesatria Varna* (birokrat, politisi, lawyer dll), *Weisya Varna* (pedagang, pengusaha) dan *Sudra Varna* (Buruh) memaknai bekerja sebagai sesuatu yang esensial bagi perempuan di era revolusi industrial saat ini. Kebutuhan hidup yang kompleks mendorong perempuan untuk bekerja agar memperoleh kehidupan layak berkecukupan. Namun demikian pekerjaan yang dilakoni perempuan dalam studi ini tidak dipilih berdasarkan kasta yang dimiliki, juga tidak atas dasar pilihan ajaran *Catur Varna* melainkan pada *passion*, peluang ekonomi, serta tingkat pendidikan yang dimiliki. Informan bahkan tidak memahami dengan baik konsep *Catur Varna* yang diajarkan dalam kitab suci Agama Hindu. Di ranah sosial

adat perempuan berkasta tidak memiliki kedudukan istimewa melainkan sepadan dengan perempuan dari kasta lain yang membedakan adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi dari kelompok masyarakat berkasta rendah kepada kasta lebih tinggi dengan Bahasa Bali halus. Perempuan pekerja *Catur Varna* tidak mempersoalkan pekerjaan domestik, mereka lebih mengorganisir *effort* lebih dalam pekerjaan sebagai sumber ekonomi dan peran sosial adat sebagai kewajiban seorang krama isteri di desa adat. Kedua, penggolongan masyarakat (kasta) dalam studi ini tidak berpengaruh terhadap agensi dan resistensi yang diproduksi oleh perempuan pekerja *Catur Varna*. Dalam studi ini jenis pekerjaan mempengaruhi tingkat agensi dan resistensi yang diorganisasikan oleh perempuan pekerja. Perempuan dengan profesi *Brahmana Varna* memiliki tingkat agensi yang tinggi dan resistensi rendah. Seorang *Brahmana Varna* dituntut memiliki kemampuan mengorganisasikan pelaksanaan ritual upacara keagamaan dengan baik dan profesional. Sehingga agensi untuk menggerakkan kepatuhan terhadap aturan adat dan agama sangat besar dan resistensi menjadi kecil. Meski adapula profesi *Brahmana Varna* yang resistensinya tinggi dikarenakan faktor ketidaksiapan lahir batin informan untuk menjalani profesi *sulinggih* yang dianggap tidak mensejahterakan secara ekonomi karena informan juga merangkap pekerjaan lain yang menjanjikan ekonomi masa depan.

Perempuan dengan profesi *Kesatria Varna* yang bekerja di institusi pemerintah daerah memiliki agensi rendah namun resistensinya tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang terikat waktu, orientasi mengejar karier, berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga menengah atas. Pendidikan tinggi mempengaruhi cara pandang perempuan dalam memaknai tradisi dan ritual kegiatan sosial adat keagamaan menjadi fleksibel. Berbeda dengan informan *Kesatria Varna* yang berasal dari keluarga *puri* memiliki agensi tinggi namun resistensi rendah. Hal ini disebabkan keluarga *puri* merupakan keturunan raja yang diberi mandat untuk menjaga *taksu* (kekuatan suci Tuhan) dalam aktifitas sosial dan religiusitas kehidupan masyarakat Hindu Bali. Dalam konteks inilah perempuan keluarga *puri* berupaya mengorganisir nilai-nilai tradisi keluarga yang telah lama melekat dalam sejarah *puri*.

Dalam pekerjaan lain perempuan dengan profesi *Wesia Varna* (pedagang dan pengusaha) memiliki agensi dan resistensi bervariasi yakni rendah dan tinggi. Seorang *Wesia Varna* yang memiliki agensi tinggi dan resistensi rendah ditemukan pada perempuan pedagang yang tinggal di lingkungan mayoritas *Brahmana* yang ketat aturan adatnya. Di samping itu terdapat pengusaha *banten* atau *upakara* yang juga berprofesi sebagai *serati banten* dimana informan memiliki keahlian membuat *banten* dan perlengkapan upacara keagamaan lainnya. Profesi *serati banten*

menuntut informan profesional melayani konsumen pada pesanan *banten* upacara keagamaan agar kepercayaan masyarakat terhadap jasa dan profesinya terawat dan menjadikan usahanya semakin eksis. Dalam kapasitasnya sebagai seorang *serati banten* kemampuan mengorganisasikan diri untuk mematuhi aturan agama dalam konsep beryadnya semakin besar dan kecil resistensi. Sebaliknya informan *Wesia Varna* yang memiliki agensi rendah dan resistensi tinggi dikarenakan orientasi kehidupan informan adalah ekonomi sehingga kegiatan ritual adat keagamaan bisa diwakilkan keluarganya. Sementara perempuan dengan profesi *Sudra Varna* yakni bekerja sebagai buruh rata rata memiliki agensi rendah dan resistensi tinggi meski ada pula yang agensinya tinggi dan resistensi rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh pekerjaan buruh yang bersifat kasar, adanya pengawasan karena hubungan kerja yang menuntut perempuan buruh fokus bekerja keras sepenuh waktu semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Di samping perempuan pekerja buruh juga minim pendidikan dan berasal dari keluarga kelas bawah. Studi ini menyimpulkan bahwa besar kecilnya resistensi dan agensi pada perempuan pekerja Catur Varna dipengaruhi selain oleh jenis pekerjaan juga pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kelas sosial ekonomi yang dimiliki informan.

Ketiga, analisis studi menjelaskan bahwa tingkat agensi dan resistensi yang diproduksi oleh perempuan yang bekerja di arena *Catur Varna* tidak meruntuhkan norma dalam patriarki adat Bali. Namun sebaliknya pemerintah daerah di era Gubernur Wayan Koster 2018-2023 membuat kebijakan menguatkan ajeg Bali dengan dibentuknya MDA (Majlis Desa Adat) dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali yang outputnya adalah pemberian bantuan program hibah untuk operasionalisasi kegiatan desa adat sejumlah 300 juta per desa adat/pertahun di seluruh wilayah Bali. Selain itu dibentuk organisasi PAKIS (*Paiketan Krama Isteri*) yang bersifat mengikat dibentuk Sebagai tuntunan untuk mengarahkan krama isteri terhadap kewajiban (*swadharma*), hak (*swadikara*) di desa adat yang menjadi penyokong agama dan budaya Bali.

Hasil temuan riset ini mengkonfirmasi pemikiran Saba Mahmood (2005) yang menyatakan bahwa agensi adalah kemampuan seseorang untuk menghidupkan norma-norma agama yang sudah ada melalui praktek religiusitas untuk memperoleh kesalehan tertentu. Resistensi menjadi modal dalam menggerakkan agensi, ketika resistensi tinggi maka tinggi pula agensi yang diorganisasikan sebagaimana agensi perempuan dalam gerakan masjid di Mesir dalam upaya perlawanan terhadap wacana feminisme sekuler liberal (Saba: 2005). Argumen ini tidak berlaku dalam konteks studi di Bali, dimana agensi dan resistensi tidak bisa saling berkontribusi karena keduanya memiliki nilai dan tujuan berbeda. Dimana agensi diorganisasikan

untuk membentuk kepatuhan, sementara perlawanan dalam *everyday resistance* muncul tidak untuk mendukung agensi namun dorongan pada orientasi ekonomi. Oleh karenanya perlawanan keseharian perempuan pekerja *Catur Varna visibel* dan dinamis sebab ikatan solidaritas kelompok masih terjaga seperti 'rasa malu dan tidak enak' yang selalu muncul ketika perempuan melakukan resistensi sebagaimana hal ini dijelaskan Durkheim (Ridwan Muzir: 2003) bahwa sebuah ritual keagamaan tidak selamanya menjadi beban namun bisa menjaga *collectivness* atau kelompok bersama yang memberi kesadaran arti penting sebuah kelompok yang memiliki identitas yang sama.

Manajemen Inovasi Jabar *Digital Service* dalam Mewujudkan *Smart Governance* di Jawa Barat

Bhakti Gusti Walinegoro, S.IP.
Departemen Manajemen Kebijakan Publik

Jabar Digital Service (JDS) merupakan unit khusus yang menangani inovasi dan digitalisasi di Jawa Barat. JDS bertujuan untuk merespons perkembangan era digital sekaligus mewujudkan Jawa Barat sebagai Provinsi Digital, terutama berkaitan dengan *Smart Governance* (layanan publik, manajemen birokrasi, dan kebijakan publik). Terdapat tiga hal utama yang menjadi sorotan berkaitan dengan JDS. *Pertama*, JDS telah membentuk berbagai produk inovasi untuk mewujudkan *smart governance* di Jawa Barat. *Kedua*, dengan bentuk organisasi khusus, JDS dapat melakukan pengelolaan inovasi secara mandiri dan tidak birokratis. *Ketiga*, JDS memiliki beberapa permasalahan/tantangan yang dapat menghambat upayanya, seperti adanya kendala teknis penyajian data untuk pembuatan kebijakan, adanya kesenjangan digital, dan indeks literasi digital di Jabar yang masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen inovasi yang dilakukan oleh JDS. Kerangka manajemen inovasi memungkinkan peneliti untuk menganalisis tentang bagaimana manajemen ide, pembangunan produk/proses, dan peluncuran/pengembangan lanjutan inovasi dilakukan. Target khusus yang ingin dicapai adalah mengetahui secara mendalam tentang manajemen inovasi dilakukan oleh suatu unit khusus pemerintah daerah tentang inovasi dan digitalisasi. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya yaitu untuk memberikan gambaran atau kajian ilmiah tentang bagaimana seharusnya inovasi dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini sebagai bentuk kontribusi untuk mendorong peningkatan inovasi pemerintah daerah yang sampai saat ini masih belum optimal dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatori melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dengan memanfaatkan *big data* yang tersedia, dan observasi lapangan. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JDS telah bertransformasi layaknya *startup* digital yang gesit dalam merespons perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut misalnya ditunjukkan dari komposisi DigiTeam dan cara kerja. Meskipun demikian, dikarenakan berada di lingkup pemerintah, maka terdapat perbedaan dibandingkan dengan *startup* digital, yaitu berkaitan dengan tujuan dan

pertanggungjawaban, status pegawai, dan pendanaan. Hal tersebut pada akhirnya memengaruhi bagaimana JDS melakukan manajemen inovasi. JDS telah menciptakan berbagai produk digital yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, manajemen birokrasi, dan kebijakan publik. Namun, produk-produk tersebut masih jauh dari kata berhasil untuk mewujudkan *smart governance* di Jawa Barat sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi keberlanjutan inovasi JDS, seperti pemerataan akses dan penerima manfaat, patologi birokrasi, otonomi daerah, dan saluran aduan atau aspirasi masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa JDS dengan manajemen inovasi berbasis startup digital yang diterapkan belum mampu mewujudkan *smart governance* seperti yang diharapkan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa konsep manajemen inovasi JDS akan lebih efektif jika diterapkan/diadopsi oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, terdapat prasyarat sebagai penyesuaian dalam hal sistem kerja organisasi, kemampuan dan *political will* pimpinan, sumber daya manusia dan anggaran, serta lingkungan kerja.

Budaya Demokrasi Masyarakat Sipil Manggarai di Media Sosial

Ferdinandus Jehalut dan Nyarwi Ahmad
Departemen Ilmu Komunikasi

PENDAHULUAN

Sejak diterbitkannya *The Civic Culture* Almond dan Verba (1963) indikator budaya demokrasi diukur berdasarkan orientasi dan perilaku politik warga. Seiring evolusi demokrasi, Inglehart dan Welzel (2005) menunjukkan pergeseran indikator budaya demokrasi. Menurut mereka, publik kontemporer sedang mengembangkan nilai-nilai yang lebih asertif dan ekspresi diri yang kritis yang bertentangan dengan model normatif *The Civic Culture*. Selain itu, Habermas dan Mouffe juga menunjukkan pergeseran indikator budaya demokrasi. Alih-alih menekankan orientasi dan perilaku politik warga, keduanya justru menekankan partisipasi warga negara dalam diskursus publik dalam konteks Habermas dan kontestasi diskursif dalam konteks Mouffe. Riset ini ingin memperluas pembacaan terhadap model budaya demokrasi menurut Habermas dan Mouffe dengan melakukan studi kasus di Grup Facebook MBB. Di bawah judul “Budaya Demokrasi Masyarakat Sipil Manggarai, Nusa Tenggara Timur di Media Sosial: Studi Kasus di Forum Grup Facebook Manggarai Bebas Berpendapat”, penelitian ini bertujuan menjelaskan budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai, NTT, di media sosial. Dua kasus yang diangkat di sini ialah kasus pengangkatan THL dan kasus “50 kg kemiri”.

TEMUAN

Ada beberapa temuan dalam riset ini. *Pertama*, terdapat tiga model partisipasi politik masyarakat sipil Manggarai di Grup Facebook MBB, yakni *information provision*, deliberasi, dan upaya memengaruhi kebijakan publik. *Kedua*, dalam lensa pemikiran Habermas dan Mouffe diskursus publik dan kontestasi diskursif di Grup MBB tampak dalam bentuk *user generated framing*. Di grup tersebut juga *like* dan *share* diidentifikasi sebagai model baru diskursus publik dan kontestasi diskursif. Temuan lain ialah diskursus publik di grup tersebut lebih dikendalikan oleh sentimen daripada argumen. Penulis juga menemukan kurangnya implementasi prinsip-prinsip budaya demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik di Grup MBB. *Keempat*, dari analisis penulis, budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di Grup MBB cenderung menggambarkan budaya demokrasi pasca-kebenaran daripada budaya demokrasi deliberatif dan demokrasi agonistik. Budaya demokrasi pasca-kebenaran

ditandai dengan peminggiran fakta-fakta objektif dan argumentasi rasional dalam diskursus dan debat publik. Alih-alih menempatkan fakta-fakta objektif dan argumentasi rasional ke dalam pusat diskursus dan debat publik, masyarakat justru mengeksploitasi sentimen dan emosi untuk mempertajam friksi dan polarisasi *online*.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, penulis menyimpulkan bahwa secara umum budaya sipil (budaya demokrasi masyarakat sipil) merupakan konsep yang dinamis. Tidak ada konsep tunggal tentang budaya sipil yang berlaku di semua konteks. Oleh sebab itu, setiap konsep perlu di-dekontekstualisasi dan di-rekontekstualisasi supaya menjadi kontekstual. Lebih lanjut, berdasarkan sejumlah temuan riset ini, penulis juga menyimpulkan bahwa deliberasi dan kontestasi diskursif *online* di Grup Facebook MBB mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh deliberasi dan kontestasi diskursif *offline*. Deliberasi dan kontestasi diskursif *online* di Grup Facebook MBB memungkinkan munculnya *user generated framing* yang tidak pernah muncul dalam deliberasi dan kontestasi diskursif *offline*. Selain itu, deliberasi dan kontestasi diskursif *online* di Grup MBB juga mempromosikan kesetaraan akses kepada semua orang. Jadi, dalam deliberasi *online* terjadi proses desentralisasi demokrasi atau diskursus publik yang dalam deliberasi *offline* cenderung dimonopoli oleh elite politik, ekonomi, dan media. Terakhir, berdasarkan sejumlah temuan dalam riset ini, penulis menyimpulkan bahwa budaya demokrasi masyarakat sipil Manggarai di Grup MBB lebih cenderung menggambarkan budaya demokrasi pascakebenaran.

Kepemimpinan Keamanan Siber dalam Menjaga Data Pemilih Pemilu (Studi Kasus Penerapan Sistem Informasi SIDALIH oleh KPU RI)

Muhammad Iqbal Khatami
Departemen Ilmu Komunikasi

A. Pendahuluan

Penerapan teknologi informasi dalam pemilu Indonesia telah mempercepat digitalisasi proses pemilihan, meningkatkan kualitas pemilu, dan keamanan data. Namun, juga membuka ancaman serangan siber baru. KPU RI, bertanggung jawab dalam memastikan keamanan pemilu, termasuk validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) melalui Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH). Kendati aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas DPT, juga memiliki kerentanan terhadap serangan siber yang terbukti dari beberapa kali serangan siber yang terjadi terhadap data pemilih. Kesenjangan pengetahuan dalam keamanan siber dan tata kelola kebijakan menjadi tantangan dalam menjaga data pemilih.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah melihat bagaimana Kepemimpinan keamanan siber KPU menjaga keamanan data pemilih dalam menerapkan SIDALIH (Sistem Informasi Daftar Pemilih) di Pemilu 2024. Sedangkan tujuan penelitian adalah memahami peran komunikasi kepemimpinan dalam pengamanan data pemilih.

Pada penelitian terdahulu, Gale et al. (2022) menemukan kurangnya pemahaman pimpinan organisasi terkait pengawasan keamanan siber. Lalu, Hussain et al. (2020) menggarisbawahi pentingnya tata kelola komunikasi dalam strategi keamanan siber dan faktor suksesi dalamnya.

Kerangka teori merujuk pada Ozkaya (2021) mengidentifikasi lima pilar kepemimpinan keamanan siber: 1) Membangun perhatian terhadap keamanan siber; 2) Membangun strategi keamanan siber; 3) Menceritakan keamanan siber; Mempresentasikan keamanan siber kepada *stakeholders*; dan 5) Kerja sama dan kepemimpinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi paradigma Interpretif dan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan studi kasus dengan fokus pada penerapan SIDALIH di KPU RI, dengan data primer dan data sekunder. Analisis data mengacu pada lima pilar kepemimpinan keamanan siber, berdasarkan teori Ozkaya (2021).

C. Temuan

Dalam membangun perhatian terhadap keamanan siber, KPU menyiapkan Peraturan KPU (PKPU). KPU juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kapasitas sumber daya manusia secara terstruktur.

Strategi keamanan siber yang dijalankan oleh KPU adalah dengan pembentukan Gugus Tugas Keamanan Siber, dengan menggunakan sistem tata kelola yaitu Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Dalam upaya menceritakan keamanan siber, tidak didapatkan data secara lengkap bagaimana prosedur dijalankan. Selain itu, KPU mengklaim telah mengkomunikasikan keamanan siber ke setiap elemen pimpinan terbatas melalui program sosialisasi dan pelatihan internal, serta mewajibkan KPU di tingkatan daerah untuk melakukan hal yang serupa. Sedangkan kepada pihak eksternal, upaya presenting to the board dilakukan melalui wadah Gugus Tugas Keamanan Siber. Terakhir, ada temuan indikasi ketidaksinkronan komunikasi dalam kerja sama menjaga keamanan data pemilih.

D. Diskusi

Penerapan cybersecurity leadership yang dijalankan oleh KPU telah terlihat berjalan dalam roadmap yang selaras dengan pilar dari Ozkaya (2021). Meski begitu, masalah transparansi dan komunikasi kepada publik dan pemangku kepentingan masih menjadi catatan. Di mana KPU masih banyak terfokus pada aspek teknis dibanding aspek tata kelola kepemimpinan.

E. Penutup

Penelitian menyoroti pentingnya tatakelola kepemimpinan dalam keamanan siber KPU. Integrasi regulasi, pengembangan strategi kepemimpinan, dan kolaborasi lembaga penting untuk mendukung adaptasi terhadap transformasi digital. Rekomendasi akademis meliputi penggunaan metode lintas disiplin. Sedangkan secara praktis, KPU perlu fokus pada kepemimpinan, tata kelola, transparansi, dan regulasi. Perhatikan keberlanjutan Gugus Tugas Keamanan Siber dan alokasi anggaran yang memadai untuk sistem keamanan data pemilih yang kuat.

Potret Eksistensi Awig-Awig dalam Mewujudkan Well-being di Desa
Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali

Putu Ananda Sanjiwani Saskita
Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Studi ini secara teoritis memandang *well-being* tidak hanya diwujudkan secara individual, melainkan secara komunal dengan mengutamakan keberlangsungan proses. *Awig-awig* (hukum adat) sebagai representasi hukum non-formal yang intervensi perilaku komunitas nyatanya tetap dijadikan pedoman hidup di tengah gempuran modernitas. Kepatuhan terhadap *awig-awig* mengarah pada tatanan kehidupan yang lebih harmonis dan bahagia. Dalam pandangan White (2009) *Well-being* tidak sebatas pada subjektivitas individu dan relasi antar individu, tetapi juga relasi dengan sumber daya. Interaksi antara aspek material, subjektif dan aspek relasional dibangun melalui struktur sosial, budaya dan hubungan kekuasaan. Sehingga dimensi sosial, budaya dan politik melekat erat dalam konteks ini. Kondisi ini menjadi kekhasan perwujudan *well-being* pada masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan, Bali. Dengan demikian pertanyaan penelitian utama adalah bagaimana praktik *awig-awig* mewujudkan *well-being* pada komunitas masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan?

Riset ini menggunakan metode kualitatif dan berfokus mendeskripsikan praktik menjalankan *awig-awig* dalam menghadirkan *well-being* pada masyarakat komunal ritualistik di Desa Tenganan Pegringsingan. Dengan demikian pendekatan studi kasus dipilih untuk menyediakan pemahaman mendalam tentang kasus yang dianalisis. Dengan menggunakan analisis deskriptif tematik membantu mengidentifikasi pola dan menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Praktik keseharian masyarakat yang timbul dari manifestasi *awig-awig*, menempatkan *well-being* sebagai proses holistik dan dinamis karena interkoneksi antara aspek material, kultural, spiritual dan relasional. Peneliti menemukan bahwa *awig-awig* dianggap sebagai instrumen pengelola dan proteksi aset desa yang paling *legitimate*, karena mengatur sedemikian rupa hubungan harmoni antara manusia dengan tuhan, sesama manusia dan alam. Tidak seperti desa lain, dimana pemahaman *awig-awig* berdasarkan kebiasaan, internalisasi *awig-awig* Desa Tenganan Pegringsingan dipelajari secara khusus melalui upacara *metruna nyoman*. Prosesi ini juga bertujuan kaderisasi agar saat berkeluarga, pemuda siap mengambil alih tanggung jawab sebagai krama adat (organisasi lembaga adat). Secara spesifik *awig-awig* mengatur tentang praktik pernikahan endogami sebagai pernikahan yang diakui di masyarakat, tata dasar pekarangan yang mengatur secara rinci pola dan bentuk sehingga seluruh rumah warga seragam distribusi aset desa, proteksi

konsumsi hasil hutan dan alam, pelaksanaan tradisi dan ritual sebagai cara mencapai harmoni serta menempatkan komunitas desa adat sebagai keluarga besar.

Dalam refleksi kolektif *well-being* dicapai dengan bersama-sama menjaga keberlangsungan tradisi, alam dan identitas untuk mewujudkan rasa aman. Aman secara ekonomi, biologis, sosial, budaya dan politik. Kepatuhan terhadap *awig-awig* tidak muncul secara natural, setidaknya terdapat dua determinan yang menjelaskan hal tersebut. *Pertama*, kentalnya karakter komunal membuat mereka loyal terhadap segala bentuk nilai bersama. Kedua, aturan *awig-awig* yang cenderung mewujudkan praktik-praktik *equality* dan *sustainability*. Dalam mempertahankan *well-being*, purifikasi dilakukan sebagai narasi untuk mengikat kelompok berdasarkan aturan *awig-awig* diantaranya pernikahan endogami, aturan tidak menjual lahan desa kepada pihak luar, sistem kepemimpinan *ulu apad* (berdasarkan senioritas perkawinan *krama adat*), akses masuk desa yang terbatas, pelaksanaan upacara *metruna nyoman* untuk melatih kerja sama. Dengan demikian *awig-awig* juga berperan sebagai sarana negosiasi dari pengaruh kepentingan luar.

HIBAH PENELITIAN MAHASISWA S-1

Strategi Bisnis Media *Online*: Studi Kasus Penerapan Model Bisnis pada Akun
TikTok @tribunjogja Periode September 2022-Januari 2023

Afifah Ananda Putri
Departemen Ilmu Komunikasi

Reuters Institute pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sumber berita yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia adalah media daring, yaitu sebanyak 89% (Reuters Institute, 2021). TikTok merupakan *platform* yang saat ini banyak diminati. *Platform* media sosial yang diciptakan pada tahun 2016 oleh ByteDance itu berhasil memiliki pengguna dengan jumlah yang fantastis hanya dalam waktu yang relatif singkat. Indonesia sendiri merupakan pasar kedua terbesar di TikTok pada tahun 2020 lalu dengan pengguna aktif bulanan mencapai 22,2 juta (Annur, 2021).

Salah satu media yang juga melebarkan diseminasi berita pada *platform* TikTok adalah Tribun Jogja. Tribun Jogja merupakan surat kabar harian yang terbit pertama kali di Yogyakarta pada 11 April 2011. Selain memproduksi berita melalui koran cetak, Tribun Jogja juga mengelola portal berita *online* tribunjogja.com dan media sosial. Meski Tribun Jogja merupakan media regional yang cukup baru, namun popularitasnya di tengah masyarakat sudah cukup tinggi. Tribun Jogja telah memiliki lebih dari 2,2 juta pengikut pada akun TikTok. Jumlah tersebut melebihi jumlah pengikut media nasional, seperti Tempo dan Kompas. Penggunaan TikTok digunakan untuk menggaet audiens dari kalangan muda, sekaligus untuk menunjang pemasukan. Lantas, bagaimana penerapan model bisnis Tribun Jogja pada penggunaan *platform* TikTok? Penelitian ini akan menggunakan konsep komponen model bisnis sebagai pisau analisis.

Komponen pertama adalah *value proposition*. Dalam hal ini, Tribun Jogja menargetkan generasi Z dan milenial sebagai audiens mereka. Sebagai *digital native*, mereka cenderung mengonsumsi berita dengan *shareability* tinggi, sehingga mereka menekankan nilai *proximity*, *human-interest*, dan aktualitas. Konten yang mengandung informasi yang mengundang gelak tawa dan air mata adalah jenis konten yang dinilai cocok di *platform* TikTok oleh manajer digital Tribun Jogja.

Komponen kedua adalah *key resources*, yang meliputi sumber daya manusia, teknologi, brand, saluran, dan fasilitas. Seluruh sumber daya tersebut dipadukan untuk menciptakan *value proposition*. Caranya adalah dengan menciptakan kolaborasi antardivisi dan membekali mereka dengan kemampuan teknologi yang mumpuni untuk menunjang proses kreatif. Di samping itu, mereka juga secara

konsisten menggunakan konsep *micro-people* sejak awal berdirinya Tribun Jogja yang akhirnya menjadi karakter bagi media tersebut.

Berikutnya adalah *key processes* yang menekankan pada sistem dan rutinitas yang terbangun di Tribun Jogja untuk menciptakan *value proposition*. Alur kerja dibangun secara sistematis. Kemudian, budaya kerja juga cenderung dibuat egaliter dan fleksibel agar produktivitas dan kreativitas dapat tetap terjaga.

Komponen terakhir adalah *profit formula* yang berfokus pada bagian *revenue model*. Secara keseluruhan, TikTok berkontribusi sekitar 10% bagi perusahaan. Kontribusi tersebut berasal dari *advertising*, *live-streaming*, dan *referral traffic revenue*. Pemasukan dari TikTok yang terbesar adalah *advertising revenue* melalui pengadaan paket iklan pada beberapa media sosial, termasuk TikTok. Akan tetapi, Tribun Jogja belum memanfaatkan TikTok secara menyeluruh, misalnya belum secara aktif menggunakan fitur *live-streaming* untuk menampilkan berita.

Secara umum, Tribun Jogja telah memanfaatkan *platform* TikTok dengan baik untuk memberikan informasi dan menambah keuntungan Perusahaan. Akan tetapi, masih ada banyak peluang lain di platform tersebut yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk menyediakan informasi dan meningkatkan kontribusi bagi perusahaan Tribun Jogja.

Negara Selatan dalam Negosiasi Perlindungan Lingkungan
Internasional: Strategi Manajemen Stigma oleh Cina pada *Conference of
Parties 15*

Albert Nathaniel
Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Di antara negara-negara Selatan, peningkatan emisi karbon Cina menjadi yang paling signifikan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi Cina pada abad 21. Kondisi tersebut kemudian memicu tekanan dalam bentuk stigmatisasi oleh negara-negara Utara kepada implementasi kebijakan perlindungan lingkungan di Cina. Negara-negara Utara melekatkan stigma kepada Cina dengan menggunakan kerangka norma perlindungan internasional oleh UNFCCC. Dalam struktur tripartit norma oleh Winston (2017), Solusi dari isu krisis iklim internasional –yang digambarkan oleh nilai perlindungan lingkungan UNFCCC– adalah dengan menerapkan pengurangan total agregat emisi karbon global. Struktur tersebut berfungsi untuk menciptakan sejumlah gambaran perilaku yang dianggap 'sesuai' oleh norma perlindungan lingkungan, terkhusus para negara Utara sebagai audience of normal, yaitu implementasi target pengurangan emisi karbon yang absolut dan pasar karbon internasional. Praktek pembangunan ekonomi yang mengurangi emisi karbon kemudian didefinisikan oleh negara-negara Utara sebagai praktik yang 'normal'. Sementara, pembangunan ekonomi Cina yang masih menghasilkan emisi karbon merupakan penyimpangan dalam norma perlindungan lingkungan internasional.

Dengan menyasar pada konstruksi penyimpangan dari norma perlindungan lingkungan UNFCCC, Pelekatan stigma kemudian dilakukan oleh aktor-aktor dari negara Utara melalui proses labelisasi, stereotip, pemisahan Cina dari masyarakat Internasional, serta penghilangan status Cina dan diskriminasi terhadap Cina. Namun begitu, Cina sebagai subjek yang aktif dan rasional kemudian juga menyusun strategi manajemen respon terhadap stigma yang dilekatkan kepadanya pada COP 15. Sejumlah strategi ini didasarkan pada aspek pengakuan Cina terhadap norma internasional yang sejalan dengan kondisi kebutuhan energi domestik dan isu polusi domestik Cina. Namun begitu, Cina juga menegaskan penolakan stigmatisasi kepada dirinya yang menarasikan bahwa Cina tidak mendukung agenda perlindungan lingkungan internasional.

Pertama, walaupun Cina menolak pengurangan emisi karbon yang absolut pada COP 15, Cina menawarkan pengurangan intensitas emisi karbon Cina sebesar

40 hingga 45 persen berdasarkan PDB nasional. Strategi yang pertama ini menunjukkan bahwa Cina sejatinya mengakui norma perlindungan lingkungan internasional, tetapi dengan menyesuaikan kemampuannya untuk mendukung agenda perlindungan lingkungan internasional. Pengakuan Cina terhadap norma internasional tersebut juga dikuatkan oleh sejumlah inisiatif transisi energi di daerah rural Cina serta upaya reforestasi di wilayah gurun Gobi. Dukungan Cina terhadap agenda perlindungan Internasional ini sejatinya juga sejalan dengan kebutuhan keamanan energi Cina di masa depan serta isu dari polusi yang banyak menghambat kegiatan perekonomian nasional Cina.

Kedua, Penolakan tegas dari Cina terhadap tekanan Amerika Serikat dan negara-negara pendukungnya dalam mengimplementasikan target pengurangan emisi yang absolut mencerminkan perlawanan terhadap intervensi dari Amerika Serikat terhadap kepentingan domestik Cina. Stigmatisasi tersebut menjadikan Cina dan negara-negara Selatan sulit untuk dapat mengupayakan pembangunan ekonomi, bahkan sulit untuk mendorong percepatan transisi energi secara mandiri. Karenanya, stigma yang diterapkan dalam kerangka norma perlindungan lingkungan UNFCCC sejatinya tidak hanya bertujuan untuk mendorong kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih ambisius, tetapi memiliki kepentingan politik tertentu dari negara-negara Utara yang melakukan pelekatan stigma.

Dengan menggunakan teori manajemen stigma oleh Adler-Nissen, penelitian ini menemukan bahwa posisi dari sejumlah negara Selatan yang menolak kesepakatan dalam pertemuan COP 15 tidak hanya mencerminkan upaya dari negara Selatan tersebut untuk menggagalkan agenda perlindungan lingkungan internasional. Melainkan, negara-negara Selatan juga mengoperasikan strategi manajemen stigma yang sesuai dengan kondisi negaranya dan posisinya terhadap norma perlindungan lingkungan internasional pula.

Konstruksi Realitas Pengukuran Tanah di Wadas dalam Media *Online*
Nasional: Analisis *Framing* Pemberitaan Isu Wadas di Tempo.co Periode 8-
11 Februari 2022

Bonifatius Wisnumurti Bayuaji, Zainuddin Muda Z. Monggilo
Departemen Ilmu Komunikasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji framing pemberitaan media online Tempo.co terkait kasus pengukuran tanah agraria di Wadas pada periode 8-11 Februari 2022. Penelitian ini menggunakan paradigma kognitif dengan pendekatan kualitatif. Model kerangka Pan dan Kosicki digunakan peneliti untuk menilai framing media pada 10 berita online Tempo.co. Penelitian ini menggunakan data dari teks berita serta wawancara dengan redaksi Tempo.co untuk menyelidiki proses di balik layar pemberitaan serta framing dan nilai-nilai Tempo.co. Tempo.co menampilkan framing negatif terhadap aktivitas polisi di Wadas melalui proses analisis dengan menggunakan teknik framing Pan dan Kosicki, menyoroti tindakan polisi yang melanggar standar hak asasi manusia dan menekankan dampak konflik terhadap masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Tempo.co, sebagai organisasi media independen, mereka mengikuti norma-norma pemberitaan yang jujur, tidak memihak, dan tidak merugikan siapa pun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Tempo.co dalam pemberitaannya memang lebih membawa nilai sosial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Wadas.

“Untitled” (2021): Kritik Estetika Dekolonial terhadap Referendum Kaledonia Baru

Emma Amelia

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Kaledonia Baru telah menyelenggarakan referendum ketiga sekaligus terakhir dalam kerangka Noumea Accord pada 12 Desember 2021 dengan hasil kemenangan kontroversial kelompok loyalis yang menghendaki Kaledonia Baru tetap berstatus teritori luar negeri Prancis berotonomi khusus (*sui generis collectivity*). Pasalnya, sebanyak 56,13% penduduk Kaledonia Baru yang terqualifikasi sebagai pemilih, yang sebagian besar berlatar belakang orang asli Kanak, tidak memberikan suaranya pada referendum ketiga ini (“Final results,” 2021). Dua referendum terdahulu yang terselenggara pada 2018 dan 2020 menghasilkan kemenangan tipis suara loyalis atas suara pro kemerdekaan dengan tren menurun pada tiap referendurnya sehingga suara pro kemerdekaan diprediksi akan memenangi referendum ketiga (Connell, 2021). Hingga pertengahan 2023, pemutusan sengketa atas hasil referendum ketiga masih terus berlangsung dan penentuan status final Kaledonia Baru yang diatur dalam Noumea Accord belum dapat diputuskan.

Berkali-kali referendum Kaledonia Baru ternyata gagal mewujudkan status merdeka yang tidak dapat diganggu gugat, lebih-lebih mendekolonisasi. Untuk itu, referendum sebagai narasi dominan dalam wacana dekolonisasi Kaledonia Baru perlu untuk dikritisi. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sains, teknologi, dan hubungan internasional (STAIR), serta dekolonialisme dengan mengkaji mural dan proyeksi video berjudul “Untitled” karya seniman kontemporer berdarah Kanak, Nicolas Molé, untuk memahami poin kritik masyarakat Kanak terhadap referendum Kaledonia Baru.

Dengan menggunakan pendekatan estetika dekolonial (lihat Bleiker, 2001; Bleiker, 2009; Mignolo & Vazquez, 2013) dan metode dramaturgi gerakan sosial untuk menganalisis data kualitatif berupa arsip pameran dan hasil pembacaan karya oleh pakar seni rupa, penelitian ini menjawab pertanyaan: (1) Apa kritik yang dibangun dan dikembangkan dalam karya “Untitled” untuk merespons dominasi narasi referendum pada wacana dekolonisasi Kaledonia Baru? dan (2) Bagaimana kritik tersebut dipertunjukkan dan direpresentasikan dalam karya “Untitled”? Pengumpulan data penelitian dilakukan menggunakan metode tinjauan arsip pameran dan tinjauan literatur melalui *desk study*, serta *mini focus group discussion* secara daring yang diikuti oleh partisipan berlatar belakang akademisi seni rupa. Data

yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode dramaturgi gerakan sosial Benford dan Hunt (1992), yakni telaah terhadap teknik-teknik dramatis yang meliputi *scripting*, *staging*, *performing*, dan *interpreting* untuk mengetahui apa argumen dan bagaimana argumen tersebut dipertunjukkan dalam karya seni rupa.

Di satu sisi, Molé mempertunjukkan kritiknya dengan menggunakan teknik dramatis *scripting*, *staging*, dan *performing* yang merepresentasikan realitas kolonialisme dan referendum di dalam pilihan, hubungan, dan makna simbol-simbol. Pengamat karya “*Untitled*” dapat mengembangkan interpretasinya terhadap realitas kolonialisme dan referendum di Kaledonia Baru dengan dibantu pemingkaian dan petunjuk tekstual dalam karya. Di sisi lain, karya “*Untitled*” juga memberikan liminalitas akan makna kemerdekaan yang sesungguhnya kepada pengamat. Pengamat dapat menangkap makna universal mengenai kemerdekaan meskipun tidak mengetahui konteks sosial politik yang melahirkan karya tersebut.

Kajian terhadap pilihan, hubungan, makna simbol-simbol, dan tafsir pengamat karya “*Untitled*” menguak wawasan bahwa referendum Kaledonia Baru bukan upaya dekolonisasi yang berhasil karena penindasan dan eksploitasi dalam relasi kolonial antara Prancis dan Kaledonia Baru masih terus langgeng. Keengganan Molé menunjukkan posisinya terhadap opsi yang ditawarkan dalam referendum, “YA” atau “TIDAK”, pada karyanya dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan tersirat mengenai ketidakpercayaan sang seniman terhadap sistem referendum. Bagi Molé, seiring dengan terpecahnya masyarakat Kaledonia Baru karena pilihan “YA” atau “TIDAK” dalam referendum, luaran dekolonisasi yang lebih penting justru terlupakan, yakni reparasi pasca kolonial dalam segala aspek kehidupan komunitas Kanak.

Rezim Pengetahuan Perdamaian dan Kekuasaan: Dekonstruksi Klaim Sukses Misi Stabilisasi PBB di Haiti, 2004-2017

Ina Yosia Wijaya
Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Operasi MINUSTAH (*Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti*) yang dilaksanakan selama 13 tahun, sejak 2004-2017, diklaim sukses untuk memberi perubahan kondisi di Haiti oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dua klaim sukses yang dominan adalah bahwa pelaksanaan MINUSTAH mampu membawa Haiti menuju konsolidasi demokrasi—adanya pelaksanaan pemilu yang kondusif—serta keberhasilan untuk restrukturisasi HNP yang dianggap sebagai masalah utama dari problematika sosial-politik yang ada. Namun, apabila merefleksikan beberapa kondisi yang terjadi selama pelaksanaan misi, klaim sukses tersebut cukup diragukan.

Kesuksesan yang di klaim MINUSTAH terbukti problematik karena meski telah dilaksanakan selama 13 tahun, keberadaan misi tersebut tidak mengubah struktur politik yang konflikatif. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya operasi MINUSTAH, eskalasi kekerasan berhasil dihentikan. Ini nampak pada hilangnya eksistensi kelompok paramiliter sebagai aktor dominan kudeta di tahun 2004 yang diperangi oleh pasukan MINUSTAH. Garis besarnya, misi ini diklaim mampu membawa perubahan kondisi yang cukup signifikan di Haiti. Ini dilihat melalui adanya pelaksanaan pemilu berlangsung kondusif yang artinya transisi pemerintahan dilaksanakan, berhasilnya misi untuk menginduksi pengetahuan mengenai keamanan pada HNP yang selanjutnya berpengaruh pada sikap HNP, dan turunnya tren kekerasan jalanan. Maka, klaim sukses secara keseluruhan atas misi stabilisasi MINUSTAH bisa dikatakan tidak objektif karena didasarkan pada kategori tertentu yang cenderung bias pada rezim pengetahuan perdamaian liberal. Sementara, apabila misalnya ditinjau dari rezim pengetahuan yang lain, belum tentu klaim serupa didapatkan karena diskursus perdamaian yang diyakini juga mempunyai penilaian yang berbeda. Memang, seharusnya hal ini tidak menjadi masalah, tetapi menjadi problematik ketika berusaha untuk dijadikan sebagai standar universal untuk mencapai perdamaian. Sedangkan, diskursus mengenai perdamaian yang sifatnya elusif.

Skripsi ini akan melakukan dekonstruksi pada klaim tersebut melalui pemikiran Foucault mengenai relasi ideologi/pengetahuan dan kekuasaan. Dengan lensa

tersebut, skripsi ini berargumen bahwa secara dominan intervensi PBB melalui pembentukan misi di negara konflik pada dasarnya tidak pernah netral dan selaras dengan ideologi tertentu. Skripsi ini akan fokus untuk meneliti dua hal, yaitu pada bagaimana klaim sukses oleh PBB pada MINUSTAH ada di bawah rezim pengetahuan khusus dan pada dampak dari operasi—yang ada di bawah rezim pengetahuan khusus—pada aspek politik-sosial masyarakat Haiti. Secara dominan, operasi-operasi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB diasumsikan dibangun selaras dengan teori perdamaian liberal. Teori ini percaya bahwa sistem demokrasi dan juga liberalisasi berguna untuk mendorong penciptaan perdamaian di negara-negara konflik karena akan mengatasi permasalahan utama dari kondisi konflik. Posisi ini dibangun melalui praktik-praktik khusus yang selanjutnya mampu menciptakan diferensiasi antara subjek dan objek dari misi perdamaian melalui penciptaan rasionalitas dan mentalitas yang merefleksikan kepentingan rezim berkuasa. Maka melalui upaya dekonstruksi klaim sukses dalam operasi MINUSTAH, skripsi ini menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan atau ideologi akan selalu berhubungan dengan rezim berkuasa karena ia merupakan hasil konstruksi yang berguna untuk menjalankan kepentingan-kepentingan rezim berkuasa.

Siblinghood dalam Komunitas Biososial: Studi Fenomenologi pada
Grup Jaya Musik (Komunitas Pengamen Difabel Netra di Malioboro,
Yogyakarta)

Ismada Firdaus Mandala Putra
Departemen Sosiologi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna Grup Jaya Musik (GJM) bagi para anggotanya dan untuk mendalami bagaimana dinamika ikatan persaudaraan mereka. GJM merupakan komunitas pengamen difabel netra Malioboro yang didirikan oleh anggotanya sendiri tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang sering mengalami diskriminasi yang berujung pada marginalisasi, difabel biasanya berafiliasi dengan komunitas difabel guna mengatasi berbagai tantangan yang ada terutama dari segi sosial dan ekonomi. Kajian tentang komunitas difabel yang berdiri sendiri secara independen masih sukar ditemukan karena mayoritas literatur menjelaskan bahwa sebuah komunitas difabel umumnya dibentuk oleh pihak lain seperti pemerintah, swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah riset yang muncul. Berbekal konsep komunitas biososial yang dipadukan dengan konsep *siblinghood* dalam bingkai metode fenomenologi, penelitian ini menemukan bahwa GJM berperan penting bagi mereka sebagai difabel netra yang berprofesi pengamen. Mereka mampu melawan diskriminasi dan marginalisasi setelah tergabung dalam GJM. Bahkan, mereka bisa lolos dari situasi krisis yang membuat mereka sempat vakum bekerja. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa anggota GJM memiliki ikatan persaudaraan khas yang berlaku secara internal dengan sesama rekan GJM maupun dengan orang lain di luar komunitas. Karakteristik ikatan persaudaraan mereka terbentuk karena adanya kesamaan latar belakang kehidupan yang kemudian juga semakin kuat setelah diuji dalam krisis yang disebutkan sebelumnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bagi para anggotanya, GJM menjadi wadah untuk bertahan hidup dari tantangan sosial dan ekonomi sekaligus menjadi tempat bagi mereka untuk menjalin relasi secara intensif.

Praktik Jurnalisme di Media Sosial (Adaptasi Logika Media Sosial pada
Berita Narasi Daily oleh @narasinewsroom)

Maftukhatun Deritanti
Departemen Ilmu Komunikasi

Pendahuluan

- i. Mediatisasi jurnalisme di media sosial berpengaruh pada bagaimana berita diproduksi dan didistribusikan
 - Media sosial telah menjadi gerbang penting dalam distribusi berita terutama di kalangan anak muda. Terbaru, survei Reuters 2022 menyebutkan bahwa media sosial berada di urutan kedua (66%) sebagai medium pencarian berita saat ini, dengan media daring (berserta media sosialnya) sebanyak 88%.
 - Dalam rutinitas jurnalistik, media sosial telah memengaruhi adopsi *crowdsourcing* (proses mendapatkan sumber, ide cerita, atau topik) untuk mengetahui wacana yang ramai di publik (Ferrucci, 2018).
 - Media sosial dimanfaatkan untuk mengamati feedback audiens, memperhatikan preferensi audiens, hingga membentuk bagaimana berita disajikan pada audiens (Tandoc dan Vosm dalam David et al, 2019). Kemampuan yang dimiliki media sosial terus dioptimalkan untuk memberikan pengalaman terbaik.
 - Salah satu model yang membingkai mekanisme platform media sosial dalam mempengaruhi interaksi sosial dan pemilihan informasi di antara penggunanya ini yakni logika media sosial (Kalsnes, 2016).
- ii. Penelitian ini menggunakan salah satu lembaga pers digital yang memanfaatkan media sosial yakni Narasi. Melalui program Narasinewsroom dengan subprogram Narasi Daily untuk memberitakan berita harian dan dikemas sedemikian rupa mengikuti platform media sosial yang digunakan serta menyasar audiens generasi milenial hingga generasi Z.

Isi

- i. Media sosial memiliki peran vital di Narasi Daily
- ii. Penerapan logika media sosial pada level pra-produksi
 - a) Programabilitas
 - Berkaitan dengan kemampuan media sosial dalam mempengaruhi interaktivitas penggunanya seperti algoritma,

teknologi komputasi dan sebagainya yang tidak bisa dikendalikan pengguna

- Narasi beradaptasi dengan memperhatikan algoritma yang berpengaruh pada bagaimana format berita disajikan, seperti format, tanggal, tagar, dan isi konten.

b) Konektivitas

- Merujuk pada bagaimana keterlibatan audiens dengan konten berita Narasi Daily
- Narasi beradaptasi dengan mengamati *engagement* konten untuk menavigasikan praktik jurnalistiknya seperti suka, bagikan, dan komentar untuk mengetahui preferensi audiens dan pembuatan judul yang menarik audiens.

c) Popularitas

- Merujuk pada konten populer atau konten viral yang diidentifikasi lewat jumlah *engagement* yang tinggi
- Narasi menyikapi dengan pengerjaan konten viral yang memiliki nilai kepentingan publik dan dikemas dengan menambahkan pengetahuan tambahan serta memperhatikan pola penyajian berita populer untuk jadi salah satu pedoman pembuatan konten berita selanjutnya.

d) Datafikasi

- Mengacu pada bagaimana Narasi memanfaatkan kesediaan data lewat teknologi
- Narasi menggunakan beragam sumber primer dan *open source* termasuk media sosial sebagai data maupun sumber ide, riset, dan sumber informasi.

iii. Penerapan logika media sosial pada level distribusi

a) Konektivitas

- Penggunaan caption yang memancing emosi atau atensi audiens

b) Popularitas

- Pengunggahan konten berita pada momen yang tepat sesuai dengan diskusi yang sedang terjadi di publik

Penutup

- i. Mediatisasi telah berpengaruh pada adaptasi jurnalis Narasi Daily dalam praktik jurnalistik untuk berita yang didistribusikan melalui media sosial Instagram

- ii. Adaptasi logika media sosial oleh jurnalis Narasi Daily terjadi pada tahap pra-produksi dan pasca-produksi
- iii. Adanya tantangan bagi Narasi Newsroom dalam menanggapi perubahan cepat pada platform media sosial seperti algoritma maupun preferensi audiens
- iv. Narasi Newsroom melalui konten Narasi Daily tetap menerapkan verifikasi dan kaidah serta etika jurnanisme dalam berpraktik di Instagram

Ordenar La Casa Policy and the Exclusion of Migrants: Sebastian Piñera's Anti-Immigrant Policy in Chile, 2018-2022

Ni Made Diah Apsari Dewi
Departemen Ilmu Hubungan Internasional

The anti-immigration discourse resurfaced in Chile through the enactment of the *ordenar la casa* or cleaning up the house policy, implemented from 2018 to 2021. This migration governance under Sebastian Piñera administration is framed as a logical response to the massive increase of South-South migration in Chile in the 2010s, worsened by the arrival of Haitian and Venezuelan migrants. Instead of creating a “safe, orderly and global” migration governance, the policy has unprecedentedly radicalized social polarization and violence towards migrants. This thesis has focused its analysis of the policy on two central questions: under what social condition was the cleaning up the house governance established, and how has the policy shaped political transformation in Chile.

In the first part of the findings we have seen how the *ordenar la casa* policy emerged from distinct social conditions and has been highly political in nature. While anti-migration discourses have long existed in Chile, they were largely unpopular in domestic politics until after the 2010s when Chile became a migrant-receiving country and migration became predominantly South-South. The arrival of Latin American migrants is seen by Chileans to contribute to economic inequality. However, it is apparent that the economy is not the primary driver of anti-immigration sentiment; racism is. Chile's economic slowdown only provides a context for a long-dormant racist view towards non-white migrants to arise. Seeing how the tension behind the migration issue increasingly heightened, politicians like Piñera started using anti-immigration rhetoric as a political tool during his 2018 election.

In the second part of the findings, the discussion focuses on the complex mechanisms of exclusion in the *ordenar la casa* policy and the far-reaching consequences towards Latin American migrants and Chilean politics in general. Inherent in the policy is a stereotype that Latin American migrants are “bad migrants” and potential victims of violence. Terms such as “illegal”, “criminal”, and “uneducated” are attached to Latin American migrants, despite statistics showing otherwise. As a consequence of this stereotype, the cleaning up the house policy further strengthens the state's supremacy. Naming migration as an urgent issue allows the Piñera governance to divert the domestic gaze from state's failings in the 2019 protest, the 2020 plebiscite, and the covid-19 crisis. As a consequence, the anti-immigration

rhetoric gained more resonance in the Chilean community. Chileans continually blame migrants for day-to-day problems, which pushes them to deny migrants equal access to jobs, housing, and safety. This perspective that migrants are second-class citizens, echoed by the state and the community, eventually incited communal-based violence towards migrants.

The findings and analysis in this thesis have highlighted two interlinked contentions through the lens of a poststructuralist security framework. First is the fact that migration policy is political as it is a product of security discourse. Second, this thesis shows how migration governance constitutively creates identity. Public sentiment informs the creation of the cleaning up the house policy, which in turn institutionalized and radicalizes the perspective of migrants as a threat to the community. Thus, discourse is a cyclical contestation of meaning-making.

Kapabilitas dan Relasi Antar Aktor Pemerintah dalam Penanganan Stunting: Studi di Kabupaten Gunungkidul

Roichan Rochmadi Irwanto
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gunungkidul untuk mengupayakan hak kesehatan, terutama bagi ibu dan balita. Kabupaten Gunungkidul ditempatkan sebagai satu-satunya wilayah di D.I. Yogyakarta yang masih berada di atas target nasional yakni 15,75% pada tahun 2021. Selain itu, topik mengenai kebijakan stunting telah mencapai titik jenuh pada pembahasan mengenai kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya. Oleh karenanya, tulisan ini akan memberikan perspektif baru mengenai penyebab kapabilitas dan relasi aktor yang rendah. Melalui kerangka konseptual mengenai kapabilitas dan jejaring aktor, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kapabilitas dan relasi aktor pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting. Artikel ini didasarkan pada studi kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kapabilitas pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi kebijakan tergolong belum mumpuni. Hal tersebut dikarenakan aktor yang terlibat memiliki keterbatasan infrastruktur, fasilitas, dan jumlah SDM. Terlebih terdapat aktor yang memiliki motivasi kerja yang rendah akibat dari pemangkasan anggaran. Ini berdampak pada perspektif bahwa stunting bukan lagi hal yang prioritas. Selain itu, kolaborasi antar aktor masih tergolong lemah. Hal ini dibuktikan dengan nilai densitas sebesar 0,186 yang berarti sifat relasionalnya lemah karena kurang dari 1. Pada visualisasi jejaring menunjukkan masih terdapat aktor yang belum terhubung. Ini terjadi dikarenakan perspektif kolaborasi bukan hal yang mendesak. Kolaborasi dimaknai sebagai partisipasi setiap entitas, di mana masing-masing entitas bergerak selaras dengan tugas dan fungsinya. Pandangan ini menunjukkan pengabaian unsur berbagi sumber daya. Padahal berbagi sumber daya dapat mendukung peningkatan kapabilitas. Oleh karenanya peneliti berargumen perlu adanya re-alokasi anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana, penguatan komitmen bersama, mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan, pembentukan forum komunikasi, hingga dukungan finansial dan sosial serta inovasi program.

Inklusivitas dalam Jurnalisme: Studi Kasus Praktik Jurnalisme Inklusif di Media Daring Tirto.id pada Tahun 2016-2022

Salsabilla Amiyard Siwi
Departemen Ilmu Komunikasi

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menghindar dari proses komunikasi. Komunikasi sebagai fitrah manusia ini mestinya harus mendukung aspek inklusivitas bagi siapa saja. Namun, kenyataannya informasi yang beredar di lini media saat ini belum sepenuhnya mendukung aspek inklusivitas. Oleh karena itu, institusi media memiliki peran penting untuk mendorong jurnalis menghasilkan berita yang inklusif guna membentuk ruang yang aman dan nyaman di media bagi seluruh masyarakat. Indeks Media Inklusif 2020 menunjukkan bahwa Tirto.id menjadi media dengan peringkat pertama dalam indeks tersebut. Maka dari itu, inklusivitas dalam jurnalisme pada penelitian ini dilihat menggunakan studi kasus praktik jurnalisme inklusif di media daring Tirto.id pada tahun 2016-2022. Penelitian ini menjawab pertanyaan “*Bagaimana praktik jurnalisme inklusif yang diterapkan oleh media daring Tirto.id dalam proses produksi beritanya?*” untuk mendeskripsikan praktik jurnalisme inklusif yang dilakukan oleh ruang redaksi Tirto.id.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Model Hierarki Pengaruh Media oleh Shoemaker dan Reese, serta menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus Robert K. Yin untuk memahami bagaimana Tirto.id mempraktikkan jurnalisme inklusif pada ruang redaksinya. Subjek dalam penelitian ini adalah tim redaksi Tirto.id yang terdiri dari wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, redaktur, dan jurnalis Tirto.id. Penelitian ini menggunakan sumber data primer serta data sekunder untuk meneliti objek serta subjek penelitian. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian. Sedangkan, data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam penelitian ini adalah pemberitaan inklusif di media daring Tirto.id yang dapat diakses oleh publik di internet serta relevan dengan objek dan subjek penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi jurnalis dan institusi media terkait bagaimana mewujudkan inklusivitas dalam media melalui praktik produksi beritanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tirto.id sudah memiliki semangat serta visi misi yang sejalan dengan nilai-nilai inklusivitas. Seperti halnya dalam menjunjung kesetaraan dan kebebasan berpendapat bagi pekerja media dalam ruang redaksi, memunculkan keragaman dalam liputannya, menampilkan perspektif korban dalam liputan terkait kelompok marginal, serta tidak meletakkan kelompok marginal sebagai

objek berita. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rutinitas ruang redaksi dan kebijakan organisasi Tirto.id yang belum dijalankan berdasarkan konsep jurnalisme inklusif pada penelitian ini. Misalnya belum adanya kebijakan standar jurnalisme di Tirto.id dalam meliput isu terkait kelompok marginal yang sesuai dengan kaidah atau kode etik jurnalistik. Selain itu, Tirto.id juga belum mengadakan pelatihan khusus tentang isu inklusivitas secara umum, ataupun tentang kebutuhan kelompok marginal bagi pekerja medianya. Dalam konteks sumber daya pekerja media pun, Tirto.id belum mendesain perekrutan karyawan dari kelompok marginal. Oleh karena itu, Tirto.id masih memiliki beberapa pekerjaan rumah untuk dapat dikatakan menjadi media yang inklusif sepenuhnya. Rekomendasi yang peneliti berikan untuk menjadikan Tirto.id sebagai media yang inklusif di antaranya yaitu: mengadakan pelatihan khusus bagi para jurnalisnya terkait bagaimana cara meliput kelompok rentan atau kaum marginal sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik; membuat panduan tertulis bagi para jurnalis terkait prinsip-prinsip dan standar penulisan pemberitaan yang ada di Tirto.id; serta memenuhi fasilitas penunjang fisik maupun non-fisik yang inklusif di ruang redaksi medianya.

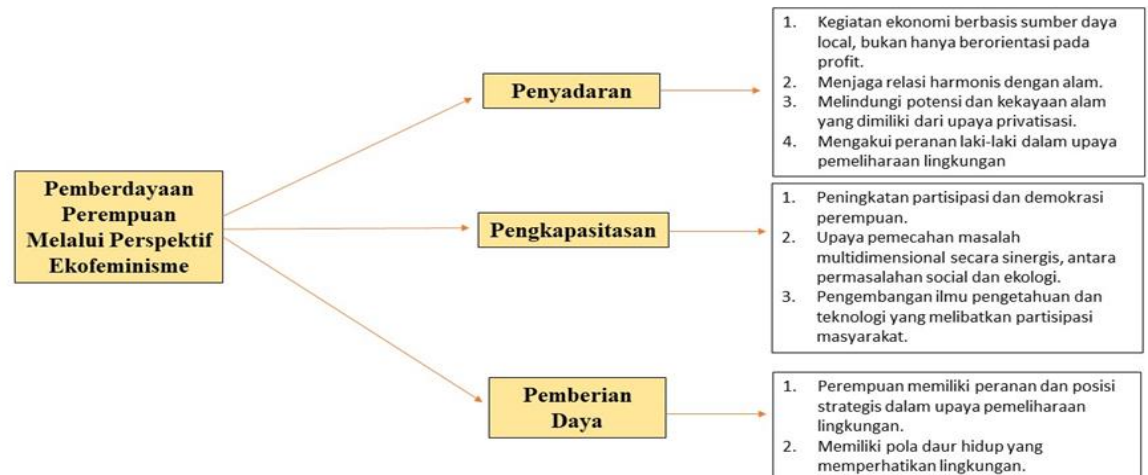
Pemberdayaan Perempuan Melalui Perspektif Ekofeminisme (Studi Kasus di Bank Sampah Wirosaban Mandiri, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta)

Salsabilla Meidiana Azzahra
Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan

Perempuan dan lingkungan memiliki keterkaitan khusus dalam kajian ekofeminisme. Fokus penelitian ini yaitu permasalahan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta karena merupakan salah satu representasi fenomena degradasi lingkungan, hal ini berpengaruh terhadap kesejahteraan perempuan yang banyak bersinggungan langsung dengan sumber daya yang terdampak. Melalui aktivitas pengelolaan sampah oleh BSWM, terdapat upaya pemberdayaan perempuan yang menempatkannya sebagai aktor utama dalam merawat dan melestarikan lingkungan. Industrialisasi dalam pembangunan saat ini cenderung mengeksploitasi alam dan lingkungan, hal ini memiliki titik kesamaan dengan perempuan perihal ketidakberdayaan dan posisi rentan dalam kajian ekofeminisme. Sama halnya dengan konstruksi sosial yang mayoritas masih berpandangan patriarkis menempatkan perempuan sebagai “kelas dua” dalam tatanan hidup bermasyarakat (Fahimah, 2017).

Tujuan Penelitian ini yaitu mengetahui praktik pemberdayaan perempuan pada program bank sampah dilakukan dalam perspektif ekofeminisme. Adapun teori pemberdayaan yang digunakan yaitu menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yang terintegrasi dengan konsep *subsistence perspective* sebagai implikasi konsep gerakan ekofeminisme oleh Vandana Shiva dan Maria Mies. Penelitian ini menekankan konsep relasi perempuan dengan lingkungan yang akhirnya membawa mereka pada proses pemberdayaan akibat kerentanan yang dialaminya.

Gambar 1.1 Kerangka Teoritis



Sumber: Shiva & Mies, 1997; Wrihatnolo & Nugroho, 2006

Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif untuk memahami makna terhadap fenomena sosial, dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah operasional BSWM. Uji kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam perspektif ekofeminisme pada BSWM telah melalui tiga tahapan, dimulai dari tahap sosialisasi dan edukasi yang akhirnya membawa kesadaran kelompok perempuan terkait kedekatannya dengan lingkungan; peningkatan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah level rumah tangga; hingga terwujud pendirian kebun sayur dan penurunan volume sampah sebagai representasi keberdayaan mereka.

Namun, dalam proses pemberdayaan perempuan tentunya BSWM memiliki beberapa tantangan. Suatu proses pemberdayaan tentunya memerlukan partisipasi dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu, belum optimalnya proses regenerasi BSWM dikarenakan kurangnya minat partisipasi generasi muda untuk berkecimpung dalam ranah pengelolaan bank sampah. Kesadaran akan urgensi pengelolaan sampah belum inklusif mencapai semua kalangan usia hingga saat ini.

Apabila dilihat melalui perspektif ekofeminisme, pemberdayaan perempuan pada Bank Sampah Wirosaban Mandiri telah berupaya mengimplementasikan kerangka ekofeminisme dalam kegiatannya. Namun, belum secara optimal dapat merepresentasikan kesetaraan kerja antara perempuan dan laki-laki dalam mengambil tanggung jawab bersama melakukan upaya penyelamatan lingkungan melalui pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Artinya, masih terdapat beberapa praktik ketidakadilan gender. Peran perempuan dalam ranah penyelamatan lingkungan kurang mendapat penghargaan dan berpotensi menyebabkan praktik-praktik subordinasi gender dalam masyarakat.

Kesimpulannya, Dalam konteks BSWM masih terdapat beberapa hal yang perlu dikembangkan dan diteliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan konsep ekofeminisme di perkotaan. Mengingat perempuan di perkotaan juga mengalami kerentanan akibat degradasi lingkungan berupa pencemaran limbah sampah yang dihasilkan oleh proses produksi-konsumsi mereka sehari-hari. Proses ini tidak hanya menimbulkan limbah yang berdampak bagi lingkungan, namun juga berdampak pada kehidupan mereka.

Politik dan Ruang Publik: Studi tentang Negosiasi dalam Implementasi Kebijakan Revitalisasi Trotoar di Sepanjang Jalan Sudirman, Yogyakarta

Tiur Maulina Putri Sitompul
Departemen Politik dan Pemerintahan

A. Pendahuluan

Agenda revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Sudirman yang digaungkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memelihara Kawasan Cagar Budaya Kotabaru menimbulkan konflik kepentingan dengan para Pedagang Kaki Lima. Semenjak ditetapkannya Kotabaru sebagai salah satu Kawasan Cagar Budaya melalui Surat Keputusan Gubernur No.186 Tahun 2011, pemeliharaan dan pengembangan kawasannya menjadi sorotan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengembangan kawasan ini termanifestasi dalam kebijakan revitalisasi trotoar yang memantik konflik antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PKL sebagai penerima kebijakan yang termarginalisasi. Penelitian ini berfokus pada dinamika negosiasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PKL dalam implementasi kebijakan revitalisasi trotoar sebagai kerangka studi kasus. Sebagai upaya untuk menelaah penelitian ini, penulis menggunakan kerangka teori dari Grindle (1980) untuk menganalisis substansi dan implementasi kebijakan revitalisasi trotoar. Selain itu, terdapat teori negosiasi yang digagas oleh Sawyer dan Guetzkow (2006) yang digunakan sebagai pisau analisis substansi dinamika antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PKL dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi trotoar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua kategori, yaitu data primer melalui wawancara dengan beberapa *stakeholder* Pemerintah Kota Yogyakarta dan perwakilan PKL. Sementara data sekunder melalui studi literatur dan observasi selama satu bulan, yakni bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai proses negosiasi yang dinamis.

B. Isi

Kajian ini menemukan adanya proses negosiasi yang berlangsung selama delapan bulan dari Februari 2021 hingga Desember 2021 (sebelum - saat pengerjaan revitalisasi). Berlangsungnya dinamika negosiasi ditandai dengan adanya tarik ulur kepentingan antara Pemkot Yogyakarta dan PKL dalam menciptakan konsensus. Perbedaan kepentingan ini dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa dan perbedaan tujuan, dimana Pemkot Yogyakarta sebagai pemangku kebijakan memiliki

kepentingan mempercantik wajah kota dan PKL yang memiliki *power* relatif kecil menyampaikan kepentingannya untuk mempertahankan lapaknya sebagai lumbung pendapatan. Dalam dinamika negosiasi terdapat lima tahap proses negosiasi yang menggunakan komunikasi persuasif melalui berbagai pendekatan yang dilakukan oleh beberapa *stakeholder*. Tahapan tersebut diantaranya adalah rapat rutin internal PKL di bawah PPKLY, rapat antara PKL dengan Kelurahan Kotabaru dan Kelurahan Terban, rapat antara PKL dengan Kemantren Gondokusuman, audiensi dari DPRD Kota Yogyakarta bersama instansi terkait dan PKL serta proses kesepakatan hasil negosiasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PKL dalam menemukan alternatif kebijakan. Beberapa alternatif yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses negosiasi tidak langsung diterima oleh PKL. Tawaran alternatif relokasi di Jalan Sam Ratulangi dan Jalan Wahidin Sudirohusodo dirasa belum representatif sehingga PKL melakukan *counter offer* untuk melahirkan alternatif baru yang mengarah pada *win-win solution*.

C. Penutup

Proses implementasi kebijakan revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Sudirman bersifat politis, dimana Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kepentingan dalam mempercantik wajah kota. Sementara PKL tereksklusi akibat relokasi dan memiliki kepentingan untuk mempertahankan lapaknya. Perbedaan kepentingan ini menuai konflik dan negosiasi menjadi langkah yang ditempuh untuk menciptakan alternatif kebijakan yang inklusif. Dalam temuan di lapangan, negosiasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan PKL berjalan terbuka serta menghasilkan konsensus yang *win-win solution*. Namun, negosiasi tersebut terjadi tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemangku kepentingan (*powerful*) dan PKL sebagai pihak yang tereksklusi akibat relokasi revitalisasi trotoar (*powerless*).

Inklusivitas dan Politik Anak Muda dalam Pengorganisasian Aksi Kamisan Yogyakarta Periode 2018-2023

Viola Nada Hafilda
Departemen Politik dan Pemerintahan

A. Pendahuluan

Inklusivitas begitu penting bagi sebuah gerakan agar tidak terfragmentasi dan menghambat dalam mencapai tujuannya. Mengambil kasus gerakan gender, Weldon (2006) menunjukkan bahwa gerakan bisa masif dan memiliki banyak pencapaian karena adanya inklusivitas. Berkaca dari pentingnya inklusivitas dalam gerakan, penelitian ini mencoba menggali bagaimana inklusivitas mampu menjaga konsistensi Aksi Kamisan Yogyakarta.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian hanya dilakukan pada Kamisan Jogja dan tidak berupaya untuk membandingkan dengan Aksi Kamisan di daerah lain. Subjek yang diteliti merupakan pegiat Kamisan Jogja yang aktif terlibat dari tahun 2018—2023.

B. Isi

Sebagai platform ekspresi politik, Aksi Kamisan Yogyakarta menampung banyak keresahan dari berbagai partisipan. Isu yang luas membuat siapa saja dapat bergabung dalam gerakan ini selagi memiliki perspektif HAM. Adapun HAM di Kamisan Jogja tidak dibatasi, partisipan hanya merasa bahwa mengikuti Kamisan adalah selayaknya manusia yang peduli manusia lainnya. Beberapa juga melihat bahwa diri mereka cukup rentan dan bisa saja mengalami pelanggaran HAM yang sama.

1) *Self-organizing*

Partisipan yang terlibat Kamisan Jogja beragam mulai dari mahasiswa, NGO, kelompok terdampak, akademisi, dan individu-individu yang tak terikat apapun. Semuanya diberi kesempatan yang sama dalam jalannya aksi. Itu dapat dilihat dari rangkaian Kamisan Jogja yang dimulai dengan berdiri di pinggir Tugu Jogja, lalu dilanjutkan refleksi di selasar Tugu. Pada kegiatan refleksi itulah terjadi tukar gagasan antarpartisipan. Semua yang hadir akan diberi kesempatan menyampaikan pendapat terkait isu yang diangkat saat itu.

Namun, mereka memiliki porsi keterlibatannya masing-masing. Terkait pengorganisasian gerakan, mahasiswa adalah partisipan yang dominan terlibat. Meski begitu, mereka tetap membuka ruang bagi siapapun yang ingin terlibat dalam manajemen gerakan, terutama bagi kelompok yang berhubungan langsung dengan isu tertentu. Sebagai contoh, Orang Tua Bergerak berkesempatan memberi pendapat tentang bagaimana cara mereka menyuarakan isu terkait anaknya yang menjadi korban salah tangkap klitih Gedongkuning.

2) *Descriptive representation*

Dalam penentuan isu, Kamisan Jogja sangat mempertimbangkan suara dari kelompok yang terdampak. Perwakilan dari kelompok bersangkutan sering kali hadir di Kamisan Jogja dan menyampaikan keinginan mereka. Namun, apabila tidak ada momentum, terkadang perwakilan dari kelompok terdampak tidak hadir dan ikut merumuskan isu.

3) *Search for agreement and institutionalized dissent*

Mengingat Kamisan Jogja terdiri dari partisipan yang beragam, dipastikan gerakan ini akrab dengan perbedaan pendapat. Nyatanya, perbedaan yang ada dapat diatasi dengan baik. Meski berbeda konsentrasi isu, partisipan tetap disatukan dengan identitas kolektif sebagai manusia yang memperjuangkan hak sesama manusia.

C. Penutup

Inklusivitas terbukti mampu menjaga napas panjang Aksi Kamisan Yogyakarta. Penerapan *self-organization*, *descriptive representation*, dan *search for agreement and institutionalized dissent* telah dijalankan dengan semestinya.

Namun, inklusivitas yang diterapkan juga membawa dampak lain. Gerakan ini memang inklusif, tetapi menjadi terlalu cair. Kesetaraan yang ada membuat partisipan aksi kurang memiliki tanggung jawab yang mengikat dalam pengorganisasian aksi. Hal tersebut berbuntut kepada banyak hal mulai dari tanggung jawab di orang yang itu-itu saja, keterlambatan aksi, sampai sedikitnya partisipan yang hadir. Tentu saja kesetaraan tersebut tidak salah, hanya saja diperlukan manajemen yang lebih rapi.

Hal yang harus digarisbawahi yakni inklusivitas saja tidak cukup untuk menjaga napas Kamisan Jogja. Partisipan merasa bahwa gerakan ini monoton dan perlu ide segar atau inovasi agar mampu menjangkau lebih banyak lagi partisipan.

Sinopsis

2023 Research Days